



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA MARGA DAN DIRJEN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : Pukul 10.18 WIB s.d. 14.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP)/Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2024
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
38 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
4. Ir. Sudjadi
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
6. Sri Rahayu
7. Ir. Effendi Sianipar
8. Harvey B. Malaihollo
9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
10. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Cen Sui Lan
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. Athari Ghauthi Ardi
 4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.);
2. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si):

Kita sudah lewat 15 menit ini.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita mulai rapat dengar pendapat kita dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur pada pagi hari ini, siang hari ini sesuai jadwal kita sampaikan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajaran yang hadir,**

Hari ini rapat juga dihadiri juga oleh seluruh Kepala Balai ya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, para Kepala Balai dari seluruh Indonesia yang kita undang.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada rapat siang hari ini, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 17 menit yang sedianya kita mulai tadi jam 10.

Menurut informasi dari sekretariat telah hadir, ya dari 22 Anggota dari 6 unsur fraksi yang berbeda yang sudah menandatangani absen maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini sudah memenuhi kuorum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.18 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta semua seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada rapat siang hari ini.

Rapat dengar pendapat hari ini seperti yang tadi saya sampaikan menghadirkan kepala, para Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional seluruh Indonesia dengan agenda membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Para Dirjen yang hadir pada hari ini beserta seluruh jajarannya,**

Sebagaimana kami pernah sampaikan ya, kita ketahui bersama bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Rabu yang lalu tanggal 30 Agustus, *sorry*, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 yang lalu telah disepakati beberapa hal di antaranya pagu Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun 2024 Kementerian PUPR adalah sebesar 146,98 triliun.

Dari alokasi tersebut anggaran untuk Dirjen Bina Marga adalah sebesar 55,40 triliun yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain, pembangunan jalan baru, pembangunan dan duplikasi jembatan, peningkatan aksesibilitas *flyover* dan *underpass* serta dukungan terhadap Inpres Jalan Daerah.

Selanjutnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar 159,5 miliar yang akan dipergunakan untuk kegiatan di antaranya: peningkatan alternatif, pendanaan proyek-proyek infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan fasilitas bantuan Pembiayaan Perumahan seperti FLPP dan Tapera

Sejalan dengan itu dalam kesempatan ini, kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu ini agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya Pasal 80 Huruf C yang berbunyi: "*Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya*".

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur antara lain:

1. perlu peningkatan kualitas jalan di daerah yang meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
2. perlu peningkatan konektivitas di wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan;

3. perlunya penyederhanaan prosedur administrasi dalam bantuan pembiayaan perumahan utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. perlunya selalu dilakukan evaluasi dan kajian yang komprehensif agar seluruh kegiatan yang didanai dengan skema KPBU selesai tepat waktu dan tepat sasaran.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Demikianlah pengantar rapat hari ini untuk saya sampaikan.

Teman-teman Anggota Komisi V yang saya hormati,

Saya kemarin baru kembali dengan Pak Dirjen dan Menteri PUPR ke Kalimantan, Pak, tepatnya Kalimantan Barat, kita melihat *progress* pembangunan paralel perbatasan. Memang PR kita di paralel perbatasan ini masih, masih lumayan berat ya, terutama kemarin menuju ke arah Kaltim. Kemudian saya dapat informasi juga kalau kita dari Aruk ke Jagoi itu, Pak Dirjen, kita tidak bisa langsung rupanya per hari ini, Pak, masih ada beberapa titik yang tidak bisa dilewati, jadi kalau kita mau meninjau itu, padahal Komisi V rencananya mau ke sana, Pak, kunjungan kerja kali ini, kita ke Kalimantan Barat tepatnya nanti ke Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu agendanya, kita mau meninjau jalan paralel perbatasan yang memakan dana cukup besar di APBN tetapi kami Komisi V belum pernah sampai ke sana.

Ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke sana Oktober nanti, ini sebagai pemberitahuan, sudah kami putuskan di agenda, nanti kita akan ke sana bulan Oktober, tanggal pastinya nanti akan kami kabari. Ini masih memerlukan kerja keras terutama untuk Nanga daerah batas Kaltim, itu Pak Dirjen kemarin jalannya sama-sama kita lihat ya, ada peningkatan dan jembatan yang harus menurut saya perlu segera kita tangani sehingga masyarakat yang berada di ujung jalan sana bisa menikmati jalannya sudah kita buka. Itu informasi awal saja.

Kemudian, jalan daerah sebagai informasi awal juga sebelum nanti masuk ke paparan, ini saya berdiskusi juga dengan Pak Menteri, apakah nanti kita patenkan saja jalan daerah ini? karena kalau skemanya seperti yang sekarang memang ada kesulitan di PU-nya, juga teman-teman sekalian kesulitan juga di PU-nya, teman-teman di PU ini dikenakan lagi aturan Kementerian Keuangan bahwa melihat fiskal dulu dan seterusnya dan seterusnya.

Kemudian, Pak Dirjen juga di Komisi V ini, kami mendapat surat dari Banggar kemarin terkait dengan apa namanya, DAK, Pak, DAK Infrastruktur, ya salah satunya juga di dalamnya juga ada jalannya. Tapi DAK itu, Pak Suryadi, kita *enggak* pernah bahas di sini, Pak. Kami memang Pimpinan tidak mau membahasnya, Pak, karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan DAK, tetapi secara aturan disuruh di, apa namanya disuruh di, disahkan di sini di Komisi V. *Nah*, kami sendiri tidak tahu prosedur DAK-nya kami tidak tahu, kemudian besaran anggaran DAK pun kami tidak pernah

diberitahu tapi komisi ini diminta untuk melegalformalkan DAK itu yang ke daerah, tentu sebagai Pimpinan, kami menolak. Saya sudah bikin surat resmi, kebetulan Pak Hamka baru datang ya, sebagai Pimpinan Komisi, saya sudah bikin surat resmi ke Pimpinan DPR bahwa Komisi V tidak membahas DAK, *gitu loh*. Jadi kalau skemanya seperti itu kita *enggak* usah bahas, Pak Hamka, DAK-nya, nanti timbul masalah di DAK, Pak. Padahal kita cuma teken doang di sini, kena lagi kita di sini, saya tidak mau, Pak. Kecuali, kecuali ya, kalau memang dibahas di sini, *gitu loh*. Harusnya kan kriterianya kan dibahas di sini, Pak, harusnya sesuai ketentuan. Kriterianya harus dibahas di sini, kriterianya pun kita *enggak* pernah bahas, Pak, DAK ini ya. DAK Infrastruktur ya *enggak* pernah kita bahas.

Oleh karenanya, karena ada suratnya kemarin Bu Nunik ya? *nah*, sudah dikirim kan? Kita sudah kirim, Pak, surat resmi. Saya tidak mau, dulu pernah ada masalah DAK, untung aja Pak, kita *enggak* pernah bahas di sini, jadi kita tidak ikut dipanggil-panggil. *Nah*, tapi kalau memang itu dibahas di sini, kewenangan diserahkan ke sini, tentu tugas itu kita ambil, kita ambil, Pak, apapun tantangannya, tentu kita akan bahas dan kita bicarakan di sini, kita putuskan di sini. Oleh karenanya ini tidak, Bapak-Bapak dari terutama yang berkaitan dengan jalan Pak Dirjen, jadi *enggak* usah minta pendapat ke kami di sini untuk DAK-nya, karena memang kalau tidak detail kami dilibatkan, kami tidak mau bahas, Pak, hanya nanti menimbulkan persoalan saja. Ini seolah-olah sudah disahkan oleh komisi yang membidangi infrastruktur, padahal kita *ndak* pernah dilibatkan membahasnya di sini. Karenanya DAK ini saya tegaskan ini Pak Suryadi ya, kan kita kan memang tidak pernah dikasih bahan, tidak pernah tahu berapa anggarannya dan seterusnya. Saya rasa itu.

Saya persilakan selanjutnya Pak Dirjen Bina Marga ya untuk menyampaikan paparannya nanti berturut-turut, setelah itu nanti baru dilanjutkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami persilakan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih.

**Bu Pimpinan yang kami hormati,
Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kami menyampaikan paparan, izin kami melaporkan Pak Ketua bahwa saat ini turut hadir para Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, kita ada 33 balai tapi kami laporkan mohon maaf, mohon izin bahwa Kepala Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena diwakilkan karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit.

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira mengenai mungkin kami mengomentari dulu masalah DAK ini, memang kami juga partisipasinya minimal, karena DAK ini di Kementerian PUPR pun itu dikoordinasikan di Sekretariat Jenderal yaitu di Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah. Jadi *leading*-nya adalah di Sekjen, Pak, bukan di Bina Marga, kita adalah bagian dari tim yang salah satunya adalah tadi itu melihat pada kriteria teknis.

Baik.

Kami laporkan, Pak, untuk Tahun Anggaran 2024 bahwa awalnya adalah usulan kami 62,09 triliun, selanjutnya berdasarkan Surat Menteri PUPR Pagu Indikatif Ditjen Bina Marga menjadi sebesar 49 triliun.

Perkembangan selanjutnya ini berdasarkan Surat Menteri PUPR juga adalah sebesar 55,40 triliun dengan prioritas adalah penyelesaian program utamanya adalah PSN dan kegiatan prioritas terutama dalam *multiyears contract* karena ini mengikat, kemudian juga fokus kepada Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi atau OPOR dan pelaksanaan direktif Presiden.

Nah, postur pagu anggaran berdasarkan sumber dana, ini yang Rupiah Murni 39,73 triliun atau 71,72% dan ini di dalamnya sudah termasuk dukungan IKN dan dukungan Inpres Jalan Daerah. Jadi Inpres Jalan Daerah, kami laporkan tahun depan ada yang masuk ke dalam pagu anggaran ini, itu untuk yang sifatnya adalah lanjutan *multiyears contract*, karena *multiyears contract* tidak mungkin dari dana BUN. Jadi kami terpaksa *secure* di anggaran reguler ini, kami laporkan, Pak Ketua. Kemudian SBSN adalah sebesar 13,23 triliun, PHLN 1,88 triliun dan RMP sebesar 0,56 triliun.

Nah, ini kami laporkan, Pak Ketua, bahwa kami mohon nanti ada kesimpulan karena kami ada sedikit perubahan di sini yaitu adanya kebutuhan sumber dana Pembiayaan Dalam Negeri atau PDN untuk penyesuaian tol Serang-Panimbang Seksi 3 sehingga ada perubahan kami usulkan dalam postur Anggaran Ditjen Bina Marga yang semula sumbernya disebutkan hanya PHLN menjadi PHLN dan PDN, dan kami mohonkan ini bisa masuk ke dalam kesimpulan.

Kemudian untuk anggaran 5,54, 55,4 triliun ini, kita bisa bagi ke dalam dukungan manajemen sebesar 2,391 triliun, kemudian program infrastruktur konektivitas sebesar 53,008 triliun di dalamnya termasuk IKN 16,67 triliun dan tadi IJD untuk menampung kebutuhan *multiyears contract* yang dibiayai oleh

BUN di tahun ini, yaitu sebesar 1,545 triliun serta kegiatan reguler biasa adalah sebesar 34,793 triliun.

Nah, ini untuk IKN, kami laporkan, anggaran 2024 itu adalah sebesar 16,67 triliun. Jadi walaupun anggaran kami cukup besar, Pak, tapi ini anggaran ini sebenarnya banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sangat spesifik seperti IKN ini. Ini ada 18 paket, Pak, di antaranya adalah pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4, penggunaan Jalan Lingkar Sepaku tahap 2 dan seterusnya.

Kemudian adapun distribusi untuk reguler tadi yang sisanya tinggal 34,793 triliun adalah untuk pemenuhan yang sifatnya *committed*, karena ini *multiyears contract* itu ada tiga koma, *eh* pembangunan jalan 3,93 triliun, kemudian jembatan dan *flyover* atau *underpass* itu 3,519 triliun termasuk sudah dimulainya pembayaran KPBU-AP Jembatan CH. Kemudian penggunaan jalan tol, ini yang sifatnya dukungan konstruksi untuk tol Betung-Jambi sebesar 4,942 triliun. Kemudian untuk Turbinwas, cadangan bencana, untuk lahan tol, BOPP lahan tol satu koma delapan satu koma delapan enam delapan empat enam triliun.

Untuk preservasi jalan, jembatan, dan pembangunan jembatan gantung 20,544 triliun, untuk preservasi jalan jembatan, terdapat 14,9 triliun dari 20,54 triliun yang sifatnya *committed*. Jadi ini memang kita ruang fiskal kita memang semakin sempit dalam arti fleksibilitasnya. Kemudian untuk di dalamnya sudah termasuk pemeliharaan rutin, rehab, rekon, dan penanganan-penanganan di luar, di luar *eh* di luar perkerasan seperti untuk drainase untuk penanganan lereng dan sebagainya. Kemudian juga ada pembayaran KPBU, Jalan lintas Sumsel dan Riau sehingga yang sifatnya *non committed* hanya sebesar 5,569 triliun, yang ini adalah untuk kegiatan prioritas bagaimana kita memastikan jalan kita terpelihara dan juga untuk termasuk di sini jembatan gantung.

Nah, kami laporkan, Pak Ketua, Bapak-Ibu Anggota sekalian bahwa IJD tahun 2024 terindikasi sebesar 15 triliun, di mana tadi 1,54 triliunnya sudah dialokasikan di reguler sehingga yang nanti kita harapkan dari BUN adalah 15 kurangi satu setengah, jadi kira-kira 13,5 triliun. *Nah*, ini akan di, *eh* kita usulkan nanti segera begitu tahun anggaran berjalan melalui BA-BUN. Namun demikian, Pak, kami sampaikan bahwa ini kita ingin agar pelaksanaannya IJD tahun depan tidak terlalu mepet seperti tahun ini kita sehingga dari saat ini kita sudah mempersiapkan daftar proyek prioritasnya.

Kemudian untuk yang dua ribu dua, kami laporkan IJD 2023-2024 antara lain: pembangunan jalan dan Jembatan Sirombu-Afulu di Sumut, rekonstruksi jalan Mirit Tambakmulyo di Jateng, peningkatan jalan akses Pelabuhan Kenyamukan di Kaltim, pembangunan akses jalan Samola lanjutan di NTB, pembangunan jalan Aboru-Haruku di Maluku, pembangunan Jalan Torea-Mumre di Papua Barat dan pembangunan Jembatan Bian di Papua serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk 2024, untuk infrastruktur jalan ada 17,21 triliun yaitu di antaranya adalah pembangunan Geumpang-Pameue di Aceh pembangunan jalan, kemudian di Pansela terutama Jawa Timur, kemudian di Papua yaitu Kemiri Depapre.

Kemudian untuk peningkatan kapasitas dan preservasi sebesar 2.117 kilometer antara lain di Riau, Sudirman-Ma Lembu, kemudian Pemenang-Bayan di NTB, Kolaka-Rate rate di Sultra dan lain-lain.

Kemudian dukungan jalan dan jembatan DPSP Borobudur sepanjang 12,53 kilometer antara lain untuk jembatan Borobudur Highland, jembatan Kali Progo serta melalui dukungan Inpres Jalan Daerah sebesar 26,26 km antara lain untuk Jembatan Air Kambau di Kepri, Jembatan Ngelembu di Jatim, kemudian akses Pelabuhan Kenyamukan.

Untuk jembatan, kita alokasikan sebesar 3,05 triliun diantaranya adalah untuk Krueng Peudada di Aceh, kemudian juga jembatan paralel Perbatasan V di Kaltim, Elelim Mamberamo. Kemudian preservasi penggantian jembatan sebesar 7.120 meter antara yang di Pulau Baai, kemudian di Cibareno, di Sagea-Patani dan lain-lain.

Untuk Infrastruktur IKN sebesar 16,7 triliun, untuk preservasi jalan dan jembatan yang *non committed*-nya kami laporkan 4,71 triliun dan jembatan gantung sebesar 860 miliar. Untuk *flyover*, *underpass* terowongan sebesar 470 miliar antara lain untuk *flyover* Bantaian, Gelumbang, Nurtanio, Aloha, Canguk dan lain-lain.

Kemudian untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sebesar 4,94 triliun, kemudian preservasi rutin jalan serta revitalisasi drainase dan jembatan gantung 5,1 triliun, dan dukungan manajemen 2,39 triliun.

Untuk Padat Karya dianggarkan sebesar 2 triliun, ini yang di antaranya kita bagi dua itu yang sifatnya memang swakelola dan yang sifatnya adalah bagian dari kontrak dengan target tenaga kerja 20.000 orang.

Kemudian untuk jaringan jalan tol, kami sampaikan yang sudah beroperasi ada sepanjang 822 kilometer, yang tahap konstruksi 7 ruas 303 kilometer dan terdapat 9 ruas jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 1.823 kilometer yang rencananya selesai melebihi Tahun Anggaran 2024.

Kemudian untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang akan selesai tahun 2023 ditargetkan 5 ruas yaitu Kuala Tanjung, Tebing Tinggi-Parapat seksi 1, 4, kemudian Indrapura-Kisaran seksi 1, 2, Binjai-Langsa seksi 2, Pekanbaru-Padang seksi Bangkinang-Pangkalan dan Sigli-Banda Aceh seksi 1.

Kita harapkan, kita targetkan di 2024 ada 3 ruas yang selesai yaitu Padang-Sicincin, kemudian Binjai-Langsa seksi 3 dan Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 2.

Untuk Jabodetabek ada 18 ruas sepanjang 491 kilometer dengan *progress* sebagai berikut: jalan tol yang telah beroperasi 8 ruas sepanjang 332 kilometer, jalan tol yang sedang tahap konstruksi sebanyak 9 ruas sepanjang 81 kilometer, dan terhadap satu ruas jalan tol sepanjang 77 kilometer yang sedang dalam proses persiapan.

Yang untuk tahun 2023 Jabotabek, Jabodetabek, kita harapkan dua ruas akan selesai yaitu Cinere-Jagorawi seksi 3B dan Ciminggus, Cimanggis-Cibitung seksi 2B.

Untuk Jabodetabek yang akan selesai 2024 terdapat dua ruas yaitu Serpong-Balaraja seksi 1B dan Bogor Ring Road seksi 3B.

Jadi, jaringan jalan tol di Pulau Jawa saat ini terdiri dari 38 ruas dengan panjang 6.322 kilometer dengan *progress* sebagai berikut: yang beroperasi sebanyak 28 ruas sepanjang 1.727 kilometer, tahap konstruksi ada 8 ruas 240 kilometer 5 ruas jalan tol sepanjang 4.300 kilometer yang dalam tahap proses persiapan.

Kita harapkan di 2024 ada 4 ruas yang selesai yaitu Cikampek II Selatan paket 2 dan paket 3, kemudian Serang-Panimbang seksi 2 dan 3A, serta Solo-Yogyakarta- Kulonprogo tahap 1, serta Jogja-Bawen seksi 1 dan 6.

Kemudian untuk jembatan gantung ada 86 paket jembatan gantung pada Tahun Anggaran 2023 ini yang tersebar di 25 provinsi dengan *progress* fisik baru mencapai 27%, dan ada 7 paket yang dalam persiapan kontraknya *e-katalog* dan satu paket belum tender untuk *e-katalog*.

Beberapa kendala dalam jembatan gantung dan kami mohon juga dukungan dari Bapak-Ibu Anggota DPR yang memberikan usulan bahwa, seringkali usulan ini datangnya agak telat, Pak, jadi pertengahan tahun 2023, sehingga kita sering kali kesulitan agar itu bisa disesuaikan di tahun anggaran yang bersangkutan karena kita masih butuh waktu untuk *readiness* kriterianya terutama desainnya. Kemudian juga beberapa lokasi jembatan gantung masih terdapat masalah dengan lahan, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Kemudian juga terutama di beberapa daerah di Papua proses surveinya agak sulit karena masalah keamanan.

Jadi, kami usulkan Pak Ketua untuk jembatan gantung terutama untuk tahun depan bahwa finalisasi usulan bisa ada percepatan, sehingga kita bisa lakukan *design* dengan baik dan *readiness* kriterianya kita pastikan apa, tidak ada masalah terutama masalah lahan sehingga pengadaannya bisa segera dilakukan dengan tender ini. Kemudian juga kami harapkan bahwa usulan-usulan berada pada daerah yang cukup aman untuk dilakukan surveinya.

Saya kira itu yang bisa kami laporkan, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Pak Dirjen Bina Marga.

Mempersingkat waktu, kami persilakan langsung Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Sebentar, ya, baik, terima kasih, makasih mohon maaf.

Izinkan kami untuk menyampaikan rencana kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024. Dalam rangka pemenuhan terhadap capaian target Renstra DJPI membutuhkan alokasi 206,07 miliar sesuai dengan prioritas Kementerian PUPR tahun 2024 dan alokasi yang apa, yang tersedia adalah sebesar 159 miliar 498 juta. Hal ini sesuai dengan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan tanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2024.

Postur anggaran di DJPI adalah sebagai berikut di mana berdasarkan program ada yang untuk kebutuhan Dukman/dukungan manajemen dan PKP, di mana sebesar 130 miliar untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 29 miliar. Alokasi pagu anggaran tersebut kalau berdasarkan Unit Eselon II sebanyak 60 miliar untuk Sedirjen dan selebihnya dibagi berdasarkan 4... 6 Unit Eselon II.

Kemudian target bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2024 adalah sebanyak 173.251 unit dengan anggaran sebesar 19,83 triliun, 19 triliun berasal dari APBN dan 0,83 triliun berasal dari dana masyarakat yang terdiri dari 166.000 unit fasilitas FLPP dengan anggaran sebesar 13,72 triliun. Kemudian 166.000 unit subsidi uang muka, ini adalah pendamping yang dari FLPP, juga terdapat subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin yang ini hanya untuk membayar *progress* yang sudah dilakukan sebelumnya sebesar 4,60 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya sebanyak

751.735 unit, dan 7.251 unit Tabungan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar 0,83 triliun sehingga secara total terdapat 173.251 unit yang berasal dari penjumlahan target FLPP dan BP Tapera.

Selanjutnya, indikasi proyek KPBU Infrastruktur PUPR, untuk tahun 2024 tahap penyiapan sebanyak 16 proyek, di mana 7 proyek di antaranya merupakan inisiasi pemerintah dan 9 lainnya diinisiasi oleh badan usaha. Kemudian tahap transaksi sebanyak 23 proyek di mana 11 proyek inisiasi pemerintah dan 12 lainnya merupakan inisiasi badan usaha.

Indikasi di masing-masing proyek KPBU di masing-masing sektor antara lain sektor Jalan Jembatan ada 6 proyek saat ini dalam proses penyiapan dengan investasi total sebesar 50 triliun antara lain ada Malang-Kepanjen, Bandung Intra Urban serta 4 proyek lainnya merupakan inisiasi dari badan usaha. 5 proyek dalam tahap, tahap transaksi diharapkan nanti pada tahun 2024 antara lain Gede Bage-Tasikmalaya-Ciamis, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Tuban-Babat-Lamongan-Gresik dan Demak-Tuban.

Untuk sektor pemukiman umumnya adalah mendampingi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur air minum dan sejenisnya. Ada 7 proyek tahap penyiapan dan 4 proyek tahap transaksi. Kemudian untuk perumahan terdapat satu proyek pada tahap penyiapan dan 4 proyek yang diharapkan nanti masuk ke tahap transaksi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur atas paparannya.

Sekarang kita masuk ke pendalaman. Yang pertama Pak Irwan Peco silakan.

F-P. DEMOKRAT (DR. H. IRWAN, SIP., MP.):

Ikuti arahan Pimpinan, Bang Boy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Ses Ditjen, Pak Direktur, Ibu Direktur serta seluruh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional setanah air yang hadir

pada hari ini khususnya Kapala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bang Reza,

Pimpinan, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR di tengah apa namanya direktif Presiden, fokus Presiden membangun IKN, kita masih bisa 3 tahun ini khususnya 2 tahun terakhir ini fokus dalam membangun baik konstruksi maupun rekonstruksi jalan di Kaltim, yang mana rencana 2024 juga masih fokus terutama ini Pak Dirjen, saya sangat pesan ini, ruas dari perbatasan Tenggarong Senoni Kota Bangun ini jalanan dulu pernah kita aspal tetapi hancur karena angkutan khusus tambang dan ini ada *multiyears*-nya mulai tahun ini, ini betul-betul ada percepatan termasuk lanjutan tahun depan, termasuk juga dari Kota Bangun, Busik, Melak sampai Kutai Barat ini juga *alhamdulillah* untuk tahun 2024 juga masuk, artinya ini bisa tuntas. Karena di Kaltim kita sejak 2020, dari 75% bisa sampai kemudian 86% ini, saya pikir ini prestasi yang kami sangat-sangat apresiasi, tetapi kalau segmen ini tidak tuntas, tentu kita tidak adil karena dari yang selatan dari batas Kalsel ke Paser, PPU Balikpapan-Samarinda itu udah tuntas, kemudian dari Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Berau ke perbatasan Kalimantan Utara juga *Insyallah* tahun depan juga tuntas. *Nah*, minta tolong segmen ini, karena ini menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia. *Nah*, di sini juga saya lihat tapi mohon ini diperhatikan betul saya dulu kunjungan sama Kepala Balai juga sampai dengan Mahakam Ulu ini, untuk segmen Teringong Bagun ini baru rencana tuntas sampai tahun depan itu sampai dengan segmen Long Bagun 4, Tering 4, sementara dari Jembatan Sungai Ratah yang *Insyallah* selesai ini, sampai ke-Teringnya malah *enggak* ada lanjutannya 40 kilometer. Kita kalau tahun depan Pak Presiden upacara di IKN Agustus, 17 Agustus masih belum tuntas jalan ini pasti *rame nih* di medsos *nih*.

Nah, menurut saya *sih* sayang sekali kita sudah tuntasin dari Long Bagun sampai dengan Sungai Ratah dan kita sudah buat jembatannya. Saya berharap 40 kilometer ini juga bisa dituntaskan tahun depan karena ini aspal pun cukup ini, Pak Dirjen. Saya sangat mohon ini, saya sangat memahami masyarakat perbatasan sekarang, teman-teman kita masyarakat Dayak dari Mahakam Ulu Kutai Barat ini sangat kesusahan, karena jalannya juga belum tembus, belum layak, tetapi sekarang musim kering, sungainya tidak bisa dilayari ya. *Nah*, saya sangat mohon Pak Dirjen untuk bisa dimasukkan dari Jembatan Sungai Ratah ke Tering ini, segmen 678, mungkin kawan-kawan Balai Besar tahu segmennya itu.

Kemudian tetap untuk jalur dari Bontang-Sangatta yang *multiyears* tahun ini sama Sangatta-Siporbodo juga tuntas kalau semuanya itu sudah tuntas, *alhamdulillah* akhir tahun 2024 Kaltim jalan nasionalnya bisa tuntas.

Saya tidak banyak Pimpinan hanya ini betul-betul pesan terutama yang Mahakam Ulu ini agar pada saat 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan di Kaltim di IKN, ini jalanan nasional di Kaltim juga bisa tuntas.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Irwan.

Bu Cen silakan, siap-siap Pak Ilham Pangestu.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga dan Pembiayaan dan seluruh
jajaran,**

Saya langsung ke Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen udah *ngangguk-ngangguk*, udah tahu saya mau nanya. Pak Dirjen, terima kasih, saya lihat program penanganan tahun 2024 banyak jembatan di tempat saya, karena di Kepri itu sebenarnya lebih perlu jembatan walaupun jalan daerah sangat diperlukan, tetapi jembatan sangat diperlukan juga. Saya melihat ada beberapa di Dapil saya, dan saya ingin menyampaikan permintaan saya satu lagi, Pak Dirjen, di Senayang-Sebangka itu di Kabupaten Lingga, Kecamatan Senayang, kami di sana sangat memerlukan jembatan untuk ke Pulau Sebangka, karena itu bisa untuk konektivitas dan perkembangan ekonomi. Saat ini saya lihat banyak yang dapat di kabupaten lain, tetapi Lingga ini mohon diprioritaskan, karena sesuai dengan azas pemerataan di situ memang sangat urgensinya. Tolong Pak Dirjen diakomodir untuk Senayang-Sebangka. Terima kasih Pak Dirjen juga terima kasih ke Tim Kabalai, Pak Kabalai dan tim sangat *men-support*. Jadi sampai ke daerah hampir seluruh Kepri, mereka melaksanakan survei dan hasilnya adalah di program penanganan ini, terima kasih Pak Dirjen. Itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen.

Selanjutnya Bu Sri Rahayu, bersiap-siap Bu Irine.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, saya *enggak, anu* hanya satu poin saja terkait dengan anggaran Inpres ya, Pak. Itu anggarannya kecil sekali kalau kemarin

kebutuhannya kan banyak ya, itu hanya satu koma ya Pak ya, kalau saya melihat dari Inpres yang ada yang di Bapak ini, di halaman berapa ini, halaman 6 itu Inpres Jalan Daerah hanya 1,5. Saya *enggak* bisa bayangkan kalau 1,5 berapa titik itu hanya, karena kalau kemarin kan masing-masing temen-temen itu ada kesempatan untuk mengajukan gitu ya, dan ajuannya kemarin, yang kemarin pasti tidak direalisasi semua sehingga ini sisanya bisa disampaikan pada tahun 2024. Mohon menjadi perhatian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Bu Sri.

Bu Irene?

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S. Sos., MCOMN&MEDIASST):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setelah itu Pak Bob ya, silakan.

F-PDIP (IRENE YUSIANA ROBA PUTRI, S. Sos., MCOMN&MEDIASST):

Ya, terima kasih, Pimpinan, tidak, kami hanya ingin menyampaikan masukan dari Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Ini ada kepala daerah menitipkan beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas mereka, karena pada prinsipnya di Maluku Utara itu tantangannya soal konektivitas, Pak. Jadi tolong difokuskan pembangunan-pembangunan ataupun perbaikan jalan yang memang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain, karena masih banyak sekali wilayah yang terisolir.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Pak Bob silakan, Pak Sudjadi mau diambil kesempatannya? Ya, silakan Pak Bob.

F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Oh, Bu Irine mau menyerahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Irine, silakan. Ya, silakan Pak Bob.

F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya langsung saja. Pak Dirjen, saya di sini mau menyampaikan Pak Dirjen, pernah saya sampaikan juga dengan Pak Kepala Balai, bahwasannya Jalan Lintas Timur Pak, Lintas Timur itu dari batu, Kabupaten Batu Bara menuju perbatasan Riau ini sering terjadi kemacetan, Pak, karena aspal itu sudah menyatu di tengah Pak, jadi mobil, mobil yang agak rendah itu sering sangkut dan terjadi kemacetan. Mungkin ini tolong jadi perhatian, Pak, saya sudah koordinasi dengan Pak Kepala Balai. Mungkin ini saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Makasih singkat, Pak Bob.

Pak Sudjadi, silakan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Dirjen dan Bapak Direktur yang lain-lain,

Untuk Jawa Tengah sejak periode ini Bina Marga super hebat. Saya ingin menyampaikan kalau Bapak berangkat dari Jogja ke Purworejo, itu jalannya lebih bagus, lebih halus daripada jalan tol. Kemudian *flyover* Cangkuk Kota Magelang 2011 sudah saya usulkan baik dengan bupati maupun walikota tidak pernah ada yang peduli, baru kepemimpinan sekarang ini Cangkuk direalisasi, itu super hebat, *flyover*, *flyover* itu panjang sekali nanti. Kemudian Purwodadi ke arah Solo juga akan diperbaiki dan hebatnya langsung ditinjau oleh Presiden. Kemudian Jalan Inpres Daerah berjalan dengan tertib, walaupun itu jalan kabupaten seluruh kepala desa dilibatkan dalam survei, jadi nanti kalau itu selesai tidak ada satupun kepala desa di daerah kami merasa ditinggal.

Yang terakhir saya usul, Pak, dulu jembatan gantung itu dicat sehingga itu jadi objek wisata yang bagus, tapi katanya karena teknik lalu *enggak* boleh dicat, itu kalau bisa dikembalikan lagi itu jadi objek yang bagus untuk wisata, untuk foto-foto nanti tiap sore, lalu anak-anak pada main.

Terima kasih, Ketua. *Matur nuwun*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudjadi.

Bu Restu, silakan.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati, dan Bapak-Bapak Dirjen beserta jajarannya yang saya hormati,

Saya langsung saja ke Bina Marga dulu. Sama tadi disampaikan oleh Bu Sri Rahayu terkait Jalan Inpres yang anggarannya hanya 1,54 triliun. Padahal kita bicara beberapa daerah *nih* Anggota Komisi V pasti sudah usulannya mungkin cukup besar juga. *Nah*, begitu juga tempat saya, pasti saya akan *nyeruduk* untuk minta terus itu bisa dilanjutkan karena berkaitan dengan kawasan industri. *Nah*, namun ada satu pertanyaan Pak Dirjen, di usulan Jalan Inpres itu kan harus ada tanda tangan Anggota Komisi V, begitu ya? dari, karena dari pemerintah daerah bilang begitu. *Nah*, bagaimana kalau di daerah lain, kabupaten lain, tidak ada Anggota Komisi V. Seperti saya beberapa waktu yang lalu Bengkulu mengusulkan dan meminta saya menandatangani untuk merekomendasikan, dan itu sudah kami saya sampaikan ke Kementerian, Direktorat Jenderal Bina Marga, begitu juga waktu itu ada titipan juga dari Ponorogo.

Kemudian untuk jembatan gantung, Bapak. Memang jembatan gantung ini gampang-gampang susah ketika iya mereka meminta-minta diusulkan, begitu diusulkan terkait persoalannya adalah lahan yang harus di apa namanya, dilalui atau masuk untuk harus dibebaskan untuk pembangunan tersebut. *Nah*, ini juga menjadi persoalan sehingga juga mohon maaf kalau kemudian harus bolak-balik ganta-ganti, ganta-ganti, ya. Begitu juga dengan beberapa usulan kami yang lalu, ini usulan sudah beberapa, sudah berapa tahun ya? sudah 2 tahun kayaknya ya? yang mungkin Pak Dirjen waktu itu juga ikut meninjau langsung untuk pembangunan jembatan di Desa Banjar Agung yang terkena banjir dan pada waktu kita, saya melakukan kunjungan dengan Bina Marga, juga Bina Marga menyampaikan dalam rapat untuk disegera

dilakukan pembebasan untuk tanah untuk pelebarannya, dan itu sudah dilakukan, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, masyarakat sudah urunan untuk membebaskan tanah tersebut.

Begitu juga dengan yang jembatan Banjarsari yang sudah sangat mengkhawatirkan pun, itu juga belum ada tindak lanjut, ini sudah dua tahun. Maka dari itu tentunya kami mohon ada perhatian khusus untuk yang sudah lama dan sudah dijanjikan pembangunannya. Jadi saya kira itu untuk yang Bina Marga.

Kemudian untuk Pembiayaan, saya kira saya belum ada pertanyaan untuk Pembiayaan Perumahan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Bu Restu.

Selanjutnya, Pak Ilham tadi sudah sampai belum ya? Belum, oke, baik Pak Tamanuri silakan, bersiap-siap Pak Suryadi.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Pak, Pak Ketua, saya dikasih nomor urut, di urut terbelakang terus, *enggak enak loh*, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah hilang satu menit curhat *nih*, silakan.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai Pak Ketua beserta rekan-rekan Anggota,

Yang saya banggakan Pak Dirjen Bina Marga, Pak Pembiayaan Infrastruktur, Bapak-Bapak para Eselon II, khususnya Kepala Balai saya dari Lampung, Bu Susan yang ada di balkon, mantan Ketua Kepala Balai juga *nih* Bu Ririn yang sekarang sudah jadi besar, besar,

Saya, terima kasih, Pak, saya sudah dibantu dengan mungkin *enggak* ada yang lain, jembatan gantung konstruksi baja, mobil bisa lewat, *nah*, itu lebihnya saya, serius tanya lah sama Bapak itu.

KETUA RAPAT:

Pak Tamanuri, bisa dipercepat, Pak?

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Kemudian yang ada *enggak* enak nih ngedengarnya, jembatan gantung yang para kontraktornya *enggak* ada duit, begitu 30% hilang, sehingga tidak bisa dilanjutkan terpaksa buka lagi ke tender.

Kedua jalan tol yang sekarang banyak bergelombang ke Lampung, Pak, jadi naik turun naik turun, kalau kita kecepatan tinggi 140 itu loncatnya tinggi sekali. Kemudian mohon perhatiannya Jembatan Way Arem yang baru, itu tanahnya menurun, jadi sampai sekarang tidak bisa gunakan, kira-kira setengah meterlah anjlok ke dalam. Kemudian mohon perhatiannya kiranya bisa dimasukkan, disisipkan di usulan kita pada tahun ini, Jembatan Way Sabuk karena sekarang ini dari 6 jembatan yang ada di wilayah saya, hanya satu-satunya jalan yang masih satu jembatannya tidak *double* gitu, dan sedangkan ini lantainya selalu rusak, kemudian kita ketahui bahwa setiap tahun ada latihan militer di daerah Baturaja, itu alat-alat apa itu, perangkat-perangkat besar Alutsista itu lewat jalan itu yang ada 40 ton segala macam. Oleh karena itu, ini perlu mendapatkan perhatian. Saya rasa cukup, Pak.

Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Suryadi, silakan.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik.

Terima kasih

**Pak Ketua, dan rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Dirjen, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Dirjen Bina Marga dan seluruh jajaran,**

Jadi ada beberapa hal, Pak Ketua, yang saya mau perdalam, tapi saya awali dengan terima kasih Pak Dirjen, karena beberapa usulan sudah diakomodir dan ini sedang berjalan diantaranya adalah jalan pelebaran jalan di Pemenang Bayan dan juga Pemenang sampai ke Sembalun termasuk penggantian Jembatan Meninting ya, karena ini memang sering terjadi kecelakaan, Pak, itu sangat rendah jembatannya.

Namun demikian, sambil yang lain ini terus berjalan, kami berharap perencanaan terus berjalan beberapa program jalan yang sangat strategis, Pak, ya di antaranya adalah janji Pak Jokowi dulu ingin membangun jalan *port to port* ya dari Pelabuhan Lembar ke kota Mataram dan ke Labuan Lombok. Beliau pidato atas nama kepala negara menjanjikan akan membangun jalan itu. *Nah*, kita maklumi bahwa keterbatasan anggaran memang secara konstruksi belum bisa dilaksanakan, tetapi proses perencanaannya harus terus berjalan, Pak. Jadi setiap tahun harus ada anggaran untuk perencanaannya, karena memang ini membutuhkan anggaran besar, ya. Jadi termasuk juga jembatan di Lewamori di Kota Bima ya, dan nanti Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan di Kilo, Pak, tapi jalannya itu belum, belum direncanakan. Oleh karena itu, supaya terintegrasi pembangunan kita, beberapa ruas-ruas strategis yang akan dibangun yang membutuhkan anggaran besar ini supaya nanti tidak molor perencanaannya harus terus berlanjut gitu ya.

Kemudian berikutnya, Pak Ketua, ini terkait dengan program Padat Karya kita. Saya melihat tidak ada keseragaman di masing-masing provinsi, saya diskusi dengan teman-teman, ya supaya arahnya ini lebih, lebih seragam begitu ya sehingga Kepala Balai punya mekanisme dalam pelaksanaannya, termasuk di IKN ya, karena anggarannya kan 30% ke IKN, 16 triliun dari 55 triliun itu terpusat di satu titik, ini kalau kita bicara proporsional, proporsionalitas ini sebetulnya tidak proporsional. Tetapi kita harapkan selain punya target infrastruktur, target ekonomi ya di kalangan masyarakatnya juga perlu ditingkatkan, sehingga saya menyarankan bahwa di IKN ini juga polanya tidak saja kontraktual tapi juga bagaimana ini bisa dilakukan untuk Padat Karya ya.

Sedikit saya komentari tentang dana alokasi khusus, Pak Ketua, karena memang kebetulan saya juga di Banggar di Panja Transfer ke Daerah, ada banyak yang terkait selain Banggar kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, dan di komisi kita memang seharusnya dibahas, karena aspek teknis itu oleh Banggar diserahkan kepada komisi terkait kriteria teknisnya, ya pilihannya kita bahas sesuai dengan proporsi kita atau tidak sama sekali gitu, jangan sampai seolah-olah kita bahas, tapi ternyata tidak gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Ketua tadi kalau, memang kita bahas, kita bahas, ya karena ini pembahasannya memang ada di Kementerian Keuangan, di Bappenas, di Banggar dan komisi terkait. *Nah*, kita tentu aspek teknisnya gitu ya, kriterianya, kemudian mungkin perlu dipaparkan draft DAK di infrastruktur kita mana saja, kemudian kenapa ini menjadi prioritas dan seterusnya. Saya kira itu perlu kita bahas atau kalau memang tidak, saya setuju kalau dikembalikan saja kepada Banggar gitu ya. Jadi itu beberapa hal terkait dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Terakhir untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Jadi beberapa waktu lalu sudah ada pemrakarsa ya untuk KPBU revitalisasi irigasi di HLD ya, *High Level Deversion* di Lombok bagian Utara, dan ini perencanaannya sebetulnya sudah selesai, hanya saja saya belum tahu progresnya seperti apa jangan sampai molor lagi, Pak, karena pada tahun lalu

kita rapat itu dijanjikan Desember ini sudah *running* di konstruksinya gitu, tapi ini sudah 6 bulan molor ya karena ini program yang sangat strategis selain memang fungsi untuk irigasi di Pulau Lombok, tapi juga fungsi pariwisata, karena desainnya sangat keren, Pak. Jadi Lombok tidak saja keren dengan Mandalika nanti *InsyAllah* dengan saluran irigasi yang dibeautifikasi menjadi lintasan bersepeda, pejalan kaki itu dari Bendungan Meninting sampai ke seluruh Pulau Lombok.

Jadi ini saya minta secara khusus, Pak Dirjen, agar dipercepat prosesnya ya, jangan sampai ada kendala-kendala yang, walaupun ada melibatkan kementerian lain mungkin bisa disampaikan ke kita, karena tentu kita juga di DPR bisa komunikasi dengan Anggota di komisi yang lain gitu untuk membantu mempercepat. Misalnya dari Kementerian Keuangan, ya kita bisa minta tolong teman-teman di Komisi XI misalnya gitu. Jadi jangan sampai kendalanya itu kita tidak tahu, lalu kita tidak bisa ikut membantu mempercepat proses ini. Barangkali demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya mau *release* sedikit soal Inpres tadi Pak Suryadi untuk teman-teman yang ada di Banggar. Kebetulan juga bukan Inpres ya, DAK ya, di sini juga ada Wakil Ketua Badan Anggaran, ada Pak Syarif di sini. Kenapa kami di komisi putuskan untuk tidak dibahas Pak Hedy Rahadian, karena kami di komisi ini tidak punya kapasitas menentukan lokus, tidak punya kapasitas menentukan nilai, kalau kriteria itu kan teknis, Pak, teknis itu ada di PU tidak di sini *gitu loh*. Kalau kita bicara kriteria itu tidak di sini, Pak, tidak di DPR kriteria itu, kriteria itu ada di kementerian/lembaga, di mana mereka menentukan lokusnya, lokasinya, mereka yang menentukan nilainya. Terus kalau dibawa ke sini buat apa, hanya pengesahan *tok* Pak kalau di sini, ya kalau mengesahi *tok* saya *ndak* mau, komisi *ndak* mau *gitu loh*, silakan aja dibahas antara pemerintah dengan Badan Anggaran, antara pemerintah dengan Bappenas, apa Bappenas dengan Badan Anggaran silakan, tapi tidak di komisi itu *loh*.

Kita di sini menentukan juga tidak bisa, *ngusulin* juga nggak bisa di sini, buat apa? kita hanya mengambil masalah aja, ya udah *enggak* usah, biar *tuh* dibereskan di teman-teman di Badan Anggaran. Itu kesimpulan kemarin Pimpinan ambil bersama, *gitu* Pak Hamka. Tapi kalau memang kita bahas, kita boleh menentukan lokasinya, kemudian kita boleh menentukan nilainya, ayo kita bahas di sini, tapi ruang itu kan *ndak* ada, *gitu loh*. Saya sudah konsultasi juga dengan Banggar sebetulnya, nanti kita putuskan, Pak, kita putuskan sehingga kalau ada apa-apa dengan Inpres, *enggak* ada urusan sama, apa ada apa-apa dengan DAK, *enggak* urusan *ama* Komisi V, *gitu loh*.

Ini pengalaman ini kita ambil, kenapa? karena ini pernah ada kejadian soal DAK ini pada masa lalu, ya bukan sekarang, mudah-mudahan ke depan *enggak* akan adalagi ya, tapi pada masa lalu pernah ada kejadian dan *alhamdulillah* Pak, Puji Tuhan *enggak* ada kita yang dipanggil karena memang tidak dibahas di sini *gitu loh*.

Jadi kita nggak mau *cawe-cawe* lah urusan DAK *tuh* biarin aja, ya urusan pemerintah dengan Badan Anggaran dengan sektor-sektor lain yang memang punya kewenangan untuk itu. Kalau datang ke sini hanya untuk kita melegalisir saja atau melegal formal aja, buat apa *gitu loh*. Jadi kita bukan pada posisi itu untuk jadi Anggota DPR di sini ya, paling tidak kita bisa menentukan lokasinya, kita bisa menentukan jumlahnya, kita bisa mengatakan bahwa ini layak dapat DAK, ini tidak layak dapat DAK, itupun kita tidak punya posisi untuk itu kalau saya lihat. Oleh karenanya, ya sudah, kita lepas saja *gitu loh*, saya rasa *gitu* ya. DED juga kita ambil kesimpulan ini kenapa? karena ada undang-undang yang harusnya domainnya komisi kita juga bisa diambilalih oleh Baleg misalnya, kan kita di DPR kan begitu, kan begitu Pak Hamka. Ya, sudah, ini biar diambil alih oleh teman-teman di Banggar aja, tidak usah kita di sini.

Saya rasa itu ya, sepakat kita teman-teman ya?

INTERUPSI F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Boleh interupsi sedikit?

KETUA RAPAT:

Ya silakan, yang mau interupsi silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Saya interupsi terkait mengenai DAK itu, Pak Ketua, ya. Sependapat saya dengan, Pak Ketua. Kalau melihat ke belakang sejarahnya, DAK itu pernah bermasalah besar, kenapa? karena tidak ditangani secara teknis oleh Kementerian PUPR, hanya diserahkan penuh kepada daerah sehingga muncul masalah, masalahnya tidak beres itu bangunan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa harus diasistensi oleh Kementerian PU secara teknis, asistensi inilah yang dilakukan oleh Kementerian PU setiap tahun melalui apa namanya zoom, itu yang setahu saya.

Kenapa Komisi V tidak perlu terlibat di situ? karena bukan Tupoksi kita langsung, karena judul daripada DAK itu adalah judulnya Transfer Daerah, bukan ke Kementerian PU, bukan ke kementerian teknis. Jadi Tupoksinya itu adalah transfer ke daerah yang bertanggung jawab di situ adalah Bappenas, Menteri Keuangan, dan Badan Anggaran, itu pasti. *Nah*, oleh karena itu, Pak Ketua, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, itulah yang paling bagus dan paling baik untuk Komisi V dan tidak ada gunanya juga, *ndak* ada.

Jangan sampai ada masalah lari ke Komisi V, tetapi yang lain manfaatkan, yang berbuat salah, kita yang kena getahnya *gitu*.

Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya *replay* kembali, kenapa DAK itu sampai di-*handle over* mengenai asistensi teknis pembangunan jalan DAK itu, karena terlalu banyak masalah yang muncul pada waktu itu, Pak Ketua. Asal jadi DAK itu, buru-buru semua-semua anggaran itu hampir penuh lari ke DAK, DAK, DAK, akhirnya amburadul, timbul masalah besar.

Saya kira tepat apa yang diputuskan oleh Pak Ketua dan saya kira juga akan saya sampaikan kepada Rapat Badan Anggaran nanti, untuk memang tidak perlu melibatkan lagi Komisi V dan surat dari Banggar itu tidak perlu ada kata-kata membahas dibahas oleh Komisi V.

Saya kira itu saja penjelasan saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Hamka.

Saya sudah balas Pak, saya sudah jawab surat dari Banggar itu supaya *clear* secara administratif, Pak Syarif sebentar nanti akan kita kasih kesempatan.

Pertama, teman-teman sekalian saya mohon izin nanti rapat ini dilanjutkan oleh Pak Iqbal, kami hari ini diundang oleh semua Anggota Fraksi nanti PDI-Perjuangan, saya masih ada di sini Pak Sudjadi, Pak Effendi Sianipar, nanti kita.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Nunggu, nunggu Pak Ketua keluar, baru saya.

KETUA RAPAT:

Iya setelah ini saya akan, akan ini, mohon izin Pak kami ada komandan *call*, jadi fraksi untuk meninggalkan tempat sebentar nanti akan dilanjutkan, tapi selesai acara nanti kita kembali lagi, tapi saya takutnya nanti saya balik Bina Marga *nih* udah selesai rapatnya *gitu loh*. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, Pak Dirjen sesuai hasil kita kemarin ke lapangan, mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk Dapil.

Yang pertama, terkait dengan preservasi jalan dari Sanggau menuju ke Sintang, Pak. Ini jalannya sudah dilebarkan Pak Satrio, tapi jembatannya masih kecil, Pak, berbahaya sekali, jadi orang terbawa, waktu bawa mobilnya rasanya jalan sudah lebar padahal jembatannya masih satu, Pak. *Nah*, kemarin kebetulan Pak Dirjen, *sorry*, Pak Kapala Balai Kalimantan Barat, adakah di sini? Ya ada, ya ada, itu ada Pak Handiyana ya, Pak Handiyana pernah sama-sama saya satu mobil kita. *Nah*, kita sempat singgah dan ini berbahaya, Pak. Menurut saya jembatan yang masih satu-satu, rupanya Pak Dirjen Direktorat, ini kan beda *nih* Direktur Jembatan dengan Jalan ini beda, Pak. Jadi jalan ini menganggarkan untuk jalannya, tapi tidak berbarengan dengan jembatannya juga diperbaiki, harusnya preservasi yang tipikal jalan seperti Sanggau dengan Sintang ini harusnya ya, termasuk Sintang Kapuas Hulu harusnya ketika jalannya kita perbaiki pelebar, jembatan harus disentuh juga, Pak, ini sudah makan korban beberapa ini saya dapat laporan ya. Jadi mereka nabrak tiang jembatan yang di tengah jalan, Pak, jatuhnya, jalannya udah lebar, jembatannya kecil, dihajarlah itu jembatan, ada beberapa korban kena. Jadi saya mohon kalau bisa untuk yang sudah dikerjakan preservasinya jembatan tahun ini dianggarkan, Pak, ya.

Kemudian preservasi antara Sanggau dengan Sintang ini kalau udah mulus sebetulnya Pak Dirjen, Pak Satrio yang pernah lama di sana ya relatif, Pak, menuju, Sintang menuju Pontianak itu udah aman. Apalagi, Pak, bis di Sintang itu, itu satu malam itu ada 42 plus Kapuas Hulu itu ada 17, Melawi itu ada 24, Pak, satu malam itu dalam satu malam. Bayangkan berapa puluh bis itu yang bus besar sekali, dan itu kalau ketemu di jembatan yang satu-satu itu udah *enggak* ada sisa, Pak, paling sisanya hanya sekilan aja kiri kanan, Pak, kebayang kan Pak berbahayanya ini. Ini kemarin saya sudah ngomong sama Pak Kapala Balai akan saya sampaikan di rapat.

Kemudian yang kedua, hasil kita kemarin ke lapangan itu ya jembatan menuju Jemihen Jelai, Jemihen CS namanya, Pak, kalau di Paket Jembatan Jemihen CS namanya yang di Erak itu juga perlu kita tangani kemarin kita udah di lokasi ya menuju Talai itu. Kemudian peningkatan jalannya Erak batas Kaltim kemarin yang 7 kilo *tuh* masih sisa *tuh* kemarin Pak, Pak Dirjen.

Saya rasa itu barangkali. Kalau untuk yang paralel perbatasan itu saya rasa memang kita ya harus bersabar, Pak, *enggak* mampu kita selesaikan 2024 ya, sama-sama kemarin kita melihat dari batas kita kemarin itu, Pak, itu masih berhari-hari itu, tapi jalan kaki, Pak, ya, perlu batas 2 hari 3 hari jalan kaki lagi mungkin baru nyampai di batas Kaltim, Pak, padahal dari Kaltim ke sini juga masih jauh. Kemudian dari Erak dari apa, dari Aruk menuju ke Jagoi juga ada beberapa kita *enggak* bisa lewat, Pak, harus kita keluar lagi dulu ke jalan kabupaten baru kita bisa masuk lagi ke paralel perbatasan.

Jadi saya rasa konsentrasi kita di sana ya mudah-mudahanlah Presiden berikutnya nanti akan menyelesaikan ini, tapi yang paling *urgent* yang ini tadi yang saya sampaikan itu Jembatan Jemihen CS ini dengan paket peningkatan yang sisa yang 7 kilo aja kemarin, Pak, itu karena ada penduduk di atasnya, yang Erak batas Kaltim.

Saya rasa itu saja ini, Pak Iqbal mohon dilanjutkan rapat ini teman-teman sekalian. Saya mohon maaf tidak dapat melanjutkan mudah-mudahan rapat ini berjalan dengan lancar. Pak Dirjen ini sangat akomodatif, ya saya tahu lah kita semua Komisi V ini programnya sudah juga banyak dibantu, nanti siang jam 2 ya, Bu, ya? Ya, jam 2 nanti kita juga sudah dengan Bina Konstruksi, mudah-mudahan sebelum jam 2 Rapat ini sudah selesai. Pak Iqbal silakan dilanjut, saya mohon izin, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.Com) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Dirjen, saya melanjutkan karena Pak Lasarus ada acara fraksi.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anwar Hafid, kemudian nanti siap-siap Pak Soehartono, silakan Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Bapak Pimpinan dan teman-teman Komisi V yang saya hormati, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan sahabat semua Kepala Balai Besar Jalan Nasional se-Indonesia yang hadir,

Pada kesempatan ini yang pertama setelah saya membaca apa yang menjadi program kementerian tahun 2024 saya melihat terima kasih banyak, Pak, ada beberapa kegiatan yang sudah terakomodir dari Sulawesi Tengah.

Pak Dirjen ada beberapa usulan yang sering saya sampaikan lewat RDP kita, yang saya lihat tidak ada di 2024 ini. Yang pertama soal penanganan daerah kawasan industri yang ada di Morowali Pak Dirjen, itu berkali-kali kita sampaikan bahwa jalan negara yang ada di sana itu dipergunakan oleh perusahaan juga sebagai jalan karyawan sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat apabila bertepatan dengan jam-jam kerja, Pak Dirjen, itu bisa sampai berjam-jam padat, macet di situ karena karyawan sampai 40.000 orang menggunakan sepeda motor, keluar masuk dan menggunakan jalan negara kurang lebih 8 kilo. Saya mohon Pak Dirjen ini bisa mendapatkan penanganan yang serius ya, karena ini adalah juga salah satu prioritas nasional yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden pada setiap kesempatan. Masyarakat juga sudah sangat mengeluhkan kondisi ini, mungkin apa saya

tidak tahu secara teknis, Pak Dirjen bisa melihat apakah pelebaran jalan atau apapun khusus di area kurang lebih sekitar 8 kilometer itu.

Nah, kemudian yang kedua juga kemarin kita berterima kasih Pak Dirjen, Inpres Jalan Daerah untuk Sulawesi Tengah, *alhamdulillah* sebagian besar sudah berjalan, tersisa yang ada di kawasan industri ini, Pak Dirjen, itu lagi. Mudah-mudahan di 2024 ini bisa mendapat penanganan karena di area kawasan industri itu ada beberapa desa yang ada di sana, ini juga tentu sangat berpengaruh, berdampak terjadinya kemacetan karena jalan yang ada di kawasan industri beberapa desa kurang lebih 7 desa yang ada di sana itu sangat parah jalannya, tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah sehingga tentu berharap bahwa melalui Inpres Jalan Daerah ini bisa ditangani sehingga kawasan industri yang telah memberikan kontribusi pemasukan bagi negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di kawasan industri tersebut.

Kemudian yang kedua, kita beberapa kali melakukan kunjungan spesifik ya, bahkan kunjungan reses komisi di Sulawesi Tengah. Beberapa hal yang diusulkan oleh masyarakat saya lihat Pak Dirjen belum ada di sini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya walaupun berkali-kali jangan bosan Pak Dirjen, saya lagi akan menyerahkan beberapa usulan dari Pak, Bapak Bupati, Walikota yang ada di Sulawesi Tengah beberapa kegiatan prioritas yang mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian pada tahun 2024 ini.

Saya kira cukup sekian, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

*Walahumusta'an,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kemudian selanjutnya Pak Soehartono, silakan Pak. Lalu siap-siap nanti Bapak Aras.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO, M.Si):

Makasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, sebentar maaf maaf, penyerahan dokumen dulu, Pak Anwar Hafid, sebentar Pak ya ada lagi teman kita menyerahkan dokumen, oh sekalian Pak Aras, tapi harus difoto itu.

Silakan, Pak Soehartono.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO, M.Si):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga dan jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Direktur Pembiayaan dan jajarannya,**

Saya langsung aja ke Bina Marga terkait Instruksi Presiden tentang Pemakaian Butas, Buton, aspal Buton. Saat ini banyak proyek preservasi yang memakai aspal Buton termasuk di daerah saya, ya mungkin di Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara ini terkendala teknis karena Butas ini tidak seperti aspal apa ya, aspal minyak, saat ini di lab itu menjadi *problem*. Lucunya itu, lab yang satu dan yang lain tentang Buton ini, Butas ini ada yang masuk dan ada yang tidak dan ini menjadi *problem* yang harus segera diselesaikan oleh Pak Dirjen. Materinya Butas itu ada dua, PG 70 dan PG 70 *modified*. Kontraktor oleh pimpinan proyeknya sudah suruh beli barang tersebut, tapi tidak seragam, ada yang PG 70, ada yang *modified*. Akhirnya di lapangan itu terkendala oleh sulitnya pelaksanaan, karena balai sendiri juga tidak bisa mengambil keputusan.

Saya, Pak, saya orang awam di bidang teknis, tapi saya melihat hasil dari *trial*, itu menurut saya bagus, lebih bagus dari aspal minyak, dan sesuai dengan pengalaman saya tahun '90. Saya pernah memakai Butas, daya lekatnya itu memang luar biasa, cuma rincian atau apa secara teknis saya tidak bisa memberikan keterangan *gitu*, tapi visual bagus. Saya melihat di Jawa Tengah, saya melihat dua di Jawa Timur, di Malang dan di Madiun, bagus. Kendala teknis di IMP tidak masalah, karena Butas ini juga sudah *jelly, liquid jelly*, tidak ada bedanya dengan aspal minyak.

Gini, masalahnya yang terjadi adalah Inpres tadi, Pak. Sekarang saya tanya pada Balai waktu itu: "Pak Balai kalau ini dilarang, ini Instruksi Presiden", kalau memang dilarang larang saja, tapi kalau tidak dilarang ya harus diberi izin untuk dilaksanakan *toh* hasilnya baik. Oleh karena itu, saya minta Pak Dirjen penyeragaman, menurut saya, usulan saya, Pak, barang yang sudah dibeli oleh para kontraktor suruh *ngaspal*, apapun yang terjadi, karena itu Instruksi Presiden, kita *ndak* mungkin menolak instruksi Presiden apapun yang terjadi.

Kemudian yang berikutnya, kalau memang mau diteruskan lagi pilih diantara dua produksi itu: *modified* atau biasa. Kalau itu *des* itu ya *enggak* ada masalah, sebenarnya masalahnya ya ringan-ringan saja, menurut saya teknis ya tidak itu, *wong* barangnya itu udah lama diproduksi, dan bagi kontraktor lama-lama udah tahu itu, *enggak-enggak* ragulah itu. Itu, Pak, yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mengusulkan proyek Padat Karya Bina Marga itu bisa mendampingi proyek Inpres yang alokasinya di jalan kabupaten dan kota. Karena menurut pendapat saya untuk proyek Padat Karya di lingkungan jalan kelas utama itu sudah *enggak* ada, Pak, udah semuanya udah baik lah,

tinggal diberi kesempatan diizinkan untuk ke jalan-jalan Inpres kabupaten, *toh* Inpres kabupatennya juga dananya dari PUPR.

Saya kira itu untuk Bina Marga, jadi terkait proyek preservasi ini, karena ini proyeknya mendesak, Pak. Jadi proyek preservasi itu rata-rata kehilangan waktu dua bulan gara-gara tidak ada keputusan pemakaian tentang Butas.

Kemudian untuk Pak Direktur Pembiayaan. Perumahan murah, apakah istilahnya itu ya proyeknya Pak Presiden, 1.000 rumah, itu di mana-mana ada Pak, banyak sekali. Satu kelemahannya yang harus ditutup oleh Direktur Pembiayaan yaitu Fasum. Fasum, saya lihat kok *enggak* jelas, dan *enggak* jelas apakah masih ada? kalau *toh* tidak ada, tolong diadakan, karena banyak perumahan yang Fasumnya itu sangat jelek. *Nah*, di sinilah perlu kehadiran negara untuk membantu agar setiap perumahan itu menarik, menarik gitu, Pak. Karena kalau tidak begitu, itu ya kita *enggak* beres-beres *gitu*, dan memang tugas Bapakm saya kira itu untuk Fasum itu dihidupkan lagi bahkan diperbanyak.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Selanjutnya saya persilakan Pak Aras, setelah itu siap Pak Syarif.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen, Dirjen Bina Marga, Pembiayaan dan
seluruh hadirin yang sama berbahagia, *wabil* khusus teman-teman dari
Kepala Balai Besar dari seluruh Indonesia dan hadir juga dari Sulawesi
Selatan Pak Asep,**

Pertama-tama, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirjen atas atensi yang luar biasa terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan jalan jembatan di seluruh Indonesia khususnya juga di Sulawesi

Selatan yang tahun ini cukup luar biasa juga membantu kami di Sulawesi Selatan dalam hal menangani baik jalan nasional maupun jalan daerah.

Kemudian yang kedua, saya kembali mengingatkan Bapak kembali bahwa di Sulawesi Selatan memang kemantapan jalannya masih sangat rendah, baik jalan nasional maupun jalan daerah, bahkan dengan penyelesaian jalan yang cukup besar tahun ini saja belum mampu untuk bisa mencapai 97,60% yang diinginkan oleh Kementerian PUPR terkait dengan kemantapan jalan nasional. Oleh karenanya, sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih ya preservasi jalan yang memakan anggaran yang cukup besar dari Maros sampai batas Bone, tetapi yang belum termasuk penyelesaian untuk 2024 adalah jalan Kope Tacepe yang setiap saya suarakan mulai zamannya Pak Munir sampai Pak Asep terus saya suarakan, karena ini adalah jalan nasional, Pak. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilintasi oleh mobil-mobil yang menuju ke Sulawesi Tenggara, karena sampai saat ini, itu belum bisa dilewati karena jalannya masih rusak berat.

Yang kedua adalah sama juga yang di jalan yang di Kalimantan Barat disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa jalannya sebagian besar sudah mulus tapi jembatannya jembatan yang peninggalan Belanda ini masih lebarnya hanya 4 meter yang tidak bisa berpapasan sehingga mulus jalan dengan kecepatan tinggi sangat mengkhawatirkan pada saat ada berpapasan pas di tengah jembatan ini akan mengakibatkan kecelakaan yang tentu kita sama-sama tidak diharapkan.

Oleh karenanya, saya berharap untuk tahun ini, untuk 2024 bisa diselesaikan, ya saya kemarin sudah bincang-bincang dengan Pak Kepala Balai, itu hanya membutuhkan anggaran kurang lebih 80 miliar saja sudah bisa dituntaskan, dan *Insyallah* Jalur Makassar sampai Sulawesi Tenggara sudah bisa dilewati dengan tentu dengan waktu jarak tempuh yang cukup singkat, dan lebih untungnya lagi adalah bahwa tidak lagi berkelok-kelok dan tidak ada pendakian yang tajam sehingga ini bisa betul-betul memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk lewat di daerah situ.

Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan mandek sampai di Maros. Ini memang betul-betul butuh penanganan hampir setiap minggu ini mengalami kemacetan total. Apalagi ya kami hampir setiap pekan menuju ke daerah Dapil, Pak, dan di sini hampir setiap saat tertahan karena memang kendaraan akses dari daerah hanya satu jalur itu saja. Program Mamminasata yang diharapkan bisa mengurai kemacetan yang terjadi di sana sampai hari ini juga tidak memperlihatkan tanda-tanda akan selesai ya. Oleh karenanya, teman-teman dari Pembiayaan berharap bahwa ini upayakan untuk ada KPBU segera sehingga *progress* Mamminasata betul-betul bisa signifikan dan bisa mengurai kemacetan yang terjadi antara wilayah utara dan wilayah selatan, Pak.

Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Perumahan, ya ini tadi berkaitan dengan disampaikan Pak Soehartono saya juga salah satu pengembang di Sulawesi Selatan, ini juga teman-teman sangat mengharapkan

dukungan *support* dari Kementerian PUPR agar ini bisa dimudahkan ya karena sekarang ini lokasinya itu untuk dekat kota sudah sangat mahal, tanahnya sudah sangat mahal sehingga pengembang ini ya kalau mau dapat untung pasti kualitas bangunan dan Fasus Fasumnya pasti didiskon atau dikurangi. Oleh karenanya, *support* dari pemerintah sangat diharapkan agar masyarakat bisa menikmati rumah yang layak dengan harga terjangkau, Pak, ya.

Itu barangkali, Pak Ketua.
Terima kasih atas kesempatannya.

Wabillahitaufiq walhidayah.
Wallahul Muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Ya, saya persilakan Pak Syarif, kemudian nanti setelah itu siap-siap, Bu Novita *ndak* ada.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat,
Bapak Dirjen Bina Marga dan Pembiayaan dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Berkaitan dengan saya mau ingin sampaikan kepada Pak Sekjen berkaitan dengan mungkin mohon kejelasan terhadap penyelesaian DED Jembatan Kapuas 3, Pak. Selain itu, tentu kalau DED-nya selesai, yang mungkin perlu lanjutan berkaitan dengan KKJDT-nya, Pak, soalnya jangan sampai seperti Jembatan Sambas berapa waktu yang lalu berkaitan dengan kajian ini *gitu* sehingga saya berharap mudah-mudahan di tahun 2024 ya setelah terbentuknya pemerintahan baru itu bisa direlisasikan terhadap fisiknya, karena ini memang sangat diperlukan berkaitan dalam mempercepat terhadap arus lintas lingkaran luar, yang tentunya kita saat ini juga sudah melakukan tinggal nanti pembiayaan ini. Kemarin kita bicara terhadap *connect*, terhadap jalan tol yang direncanakan itu, Pak, sehingga nanti Jembatan Kapuas itu bisa *connect* terhadap jalan tol yang FS-nya katanya sudah selesai sehingga ini tentu mungkin dari sekarang ya tentu berkaitan dengan itu untuk dari sisi pembiayaannya makanya saya menyarankan itu terhadap kabupaten yang dilewati itu, sebaiknya dia ikut serta di dalam pembiayaan itu, minimal pembebasan tanahnya itu dibebaskan oleh Pemda, ya karena itu tentu akan

membawa dampak ungkit ekonomi kepada wilayah-wilayah yang dilalui itu, maka ini tentu menjadi harapan.

Yang kedua, Pak Sekjen eh Pak Dirjen, itu jalan dari anjungan ke Bengkayang sampai ke perbatasan Jagoi Babang itu kan sangat kecil sekali itu Pak, terutama dari Anjungan sampai ke Ibukota Kabupaten Bengkayang. Itu saya lihat tidak memenuhi standar jalan nasional, padahal itu merupakan jalan nasional ya. Saya berapa waktu yang lalu ke sana itu berpapasan saja mobil itu sulit ya, karena memang sangat kecil terhadap jalan itu, dan itu berkali-kali juga dah saya dengar diusulkan tapi masih belum bisa direalisasikan. Mungkin ini perlu menjadi perhatian terhadap ini, karena nanti ini juga akan menjadi lintas nasional, karena itu langsung ke perbatasan yang sekarang sudah dipersiapkan apa litas batasnya itu berkaitan dengan *border* di Jagoi Babang. *Nah*, ini tentu ini merupakan harus menjadi perhatian.

Kemudian berkaitan dengan jembatan gantung, memang tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, mungkin perlu pengkajian awal, Pak, sehingga antara dana dengan perencanaan jembatan itu bisa, bisa apa *connect gitu*, karena setiap setelah dijadikan lokusnya, kemudian setelah turun lapangan biayanya tidak memadai gitu, sehingga ini juga akan menghambat terhadap percepatan sehingga ini saya kira memang karena ini berkaitan dengan masalah apa, terhadap lokus yang akan dibangun itu, dan ini tentu memang saya kira sebelum kita menentukan, ya memang saya wanti-wanti setiap kita minta itu kita minta dulu kepada masyarakatnya terhadap pembebasan, *nah*, kita tidak, karena ini tidak ada biaya untuk ganti rugi. Cuma memang saya kira hal ini terhadap yang selama ini saya rasakan, yang dapat kami dapat laporan itu berkaitan dengan dananya sehingga agak terlambat mengusulkan kembali kemudian mendukung persetujuan sehingga ini tentu akan memakan waktu. Mungkin ini harus kita sinkronkan gitu terhadap lokusnya dari awal. Saya terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Pak Sekjen, eh Pak Dirjen tadi memang kita tentu kita lakukan dari awal untuk itu.

Kemudian berkaitan dengan, berkaitan dengan tadi saya salah dengar berkaitan kalau dana DAK berkaitan dengan pembiayaan DAK itu sebenarnya di Banggar pun kita tidak punya ini, apa tidak punya kapasitas juga, karena itu harus sesuai dengan Krisna. Jadi sekarang udah, udah terencana, kemudian juga kemampuan daripada anggaran itu. Sebenarnya ya sekarang itu kan diambil, saya kalau lihat kan transfer daerah kita jadikan dana Inpres *gitu*, kan sama juga itu sebenarnya, kalau itu, kalau kita, kalau dikaji-kaji kan Inpres itu sebenarnya Dana Transfer Daerah ya cuma diambilalih itu oleh pusat sehingga kewenangannya ada di pusat. *Nah*, padahal sama juga tuh apa ya Teh Botol juga *gitu* cuma mungkin kalau transfer daerah lewat DAK dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sekarang Inpresnya diambil oleh pemerintah pusat.

Nah, cuma saya, saran saya memang ini perlu juga suatu apa penataan, berkaitan dengan kemampuan fiskal di kabupaten yang bersangkutan, kemudian juga mungkin ya bisa dilihat dari urgensinya terhadap pembangunan itu sehingga dana itu, karena kalau kita tangani semua juga *ndak* mampu. Kebetulan saya di Banggar melihat dari kemampuan kita juga memang sulit,

tapi paling tidak pembangunan itu membawa dampak terhadap apa yang menjadi harapan kita, terutama berkaitan terhadap daya ungkit ekonomi, kemudian juga yang betul-betul terealisasi itu yang sangat *urgent* di daerah itu.

Nah, ini saya kira ada beberapa yang perlu kalau saya lihat ada perlu evaluasi terhadap itu apa yang selama ini, ya karena saya melihat hal-hal ini, kalau tadi sampai dikatakan ya kita kan ngusulin aja ya, tapi dalam hal ini ya memang, Pak, kadang-kadang ya apalagi udah musim-musim Pemilu itu kan dibawa ini, oh ini *anu* sana sini dan sebagainya biasa-biasa sajalah. Jadi artinya, tapi bagi saya yang penting terhadap daya manfaat untuk itu, siapapun dari hal itu, siapapun yang melakukan itu, tapi daya manfaat terhadap itu sehingga dirasakan. Ini mungkin perlu Pak Dirjen untuk dilihat ke depan terhadap pengajuan ini, saya kira untuk menjadi perhatian.

Kemudian yang lain saya kira, oh saya kira itu saja mungkin tadi udah tersambung dengan biaya ini, Pak, terhadap saya ingin tahu juga nih DED-nya udah selesai belum sama FS jalan tol itu supaya paling tidak kita sampaikan, karena pemerintah daerah sekarang sedang bertahap membebaskan lahan untuk ke pos 3, Pak, ya karena saya kira nanti duplikasi Kapuas 1 ini paling 3 tahun lah bisa mengatasi itu, setelah itu akan macet lagi Pontianak itu, karena ya kan saya bersyukur artinya Kalbar berkembang Pak terhadap itu dan terima kasih, cukup besar lah peran dari Kementerian PUPR dalam mensukseskan pembangunan di Kalbar.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syarif.

Ini Pak Dirjen, Pak Syarif ini salah satu Pimpinan di Banggar ini. Jadi beliau paham betul mengenai dana DAK, Transfer Daerah.

Saya persilakan kepada Pak Irmawan, kemudian setelah Pak Irmawan siap-siap Pak Boyman Harun.

F-PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V,
Bapak-Ibu sahabat saya Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Marga,**

Dirjen Pembiayaan Perumahan beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga yang kami hormati teman-teman dari Kepala Balai seluruh Indonesia yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini,

Pertama sekali saya hanya ingin ke Bapak Dirjen Bina Marga. Pertama ingin kami laporkan kepada Pak Dirjen terkait dengan kondisi jalan nasional yang ada di Provinsi Aceh. Selama ini kami dengan Kepala Balai Aceh, Pak Dedi sering berkoordinasi Pak terkait dengan kondisi jalan yang ada di Banda Aceh, jadi ruas-ruas jalan mana yang kondisinya harus kita perbaiki dan ruas-ruas jalan mana yang kondisinya hari ini memang sudah betul-betul bagus.

Pertama, Bapak-Bapak, Pak Dirjen yang ingin saya sampaikan di Provinsi Aceh itu ada satu ruas jalan yang masuk jalan pegunungan yaitu dari dataran tinggi Aceh Tengah ke Kabupaten Gayo Luwes, dan seterusnya ke Kabupaten Aceh Tenggara untuk menuju ke Tanah Karo ke Medan selanjutnya. Kondisi jalan ini karena keberadaannya di lereng Bukit Barisan sehingga kondisi jalan ini sangat rentan dengan seringnya terjadi longsor di sana, Pak. Jadi oleh karena itu, kita berharap kepada Dirjen Bina Marga agar ada penanganan khusus, khusus dengan ruas jalan yang di bagian Tengah ini Pak, karena selama ini sering sekali terjadi kendala terkait dengan mobilisasi para mobil penumpang maupun mobil barang, karena terjadi longsor di banyak titik. Jadi oleh karena itu, saya berharap kepada Dirjen Bina Marga agar ada skema baru untuk penanganan longsor ini sehingga ini tidak menjadi kendala untuk mobilisasi masyarakat di daerah pedalaman tersebut, Pak.

Kemudian ini juga saya sampaikan terkait dengan pembangunan Jalan Geumpang-Pameu. Hari ini kalau saya tidak salah sudah memasuki tahun ketiga, kalau saya tidak salah, Pak. Jadi ini juga perlu kita apresiasi kepada Dirjen Bina Marga mudah-mudahan ruas jalan yang sudah tiga tahun ini kita laksanakan di tahun 2024 ini bisa kelar sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan ini sangat membantu juga masyarakat yang ada di pedalaman di Aceh Tengah dengan menghubungkan daerah pesisir Aceh, Pak.

Kemudian di samping itu juga, kami ingin mengusulkan kembali, Pak, ini sudah berapa kali sebenarnya kami sampaikan terkait dengan pembangunan jalan dua jalur di kota Calang. Kota Calang ini adalah salah satu Ibukota Kabupaten Aceh Jaya di Aceh karena kondisi jalannya sudah sangat sempit, Pak, sehingga di pusat kota ini perlu ada perpanjangan daripada pembangunan jalan dua jalur ini sehingga kendaraan merasa nyaman ketika berlalu-lintas di ruas jalan tersebut. Di samping itu juga, di kota Calang ini ada sebuah pelabuhan yang selama ini pelabuhan tersebut sudah digunakan untuk ekspor komoditi CPO sehingga ruas jalan dari akses ke pelabuhan ini sangat tidak bagus kondisi jalannya, Pak. Jadi kami juga berharap bisa melakukan preservasi jalan menuju pelabuhan ini sehingga tidak terganggu kegiatan untuk ekspor komoditi CPO ke pelabuhan dari Calang ini juga.

Kemudian ada pembangunan jembatan di masjid di Keuchik Leumiek, ada sebuah masjid yang dibangun oleh masyarakat, kondisi masjidnya sudah

sangat bagus, Pak, dan ada bentangan sungai yang tidak bisa dilewati masyarakat dari seberang ke menuju ke masjid, dan ini sudah lama kita rencanakan, waktu itu semasih Pak Subeki sebagai Kepala Balai di Aceh sudah kita gagas ini Pak, tapi sampai tahun ini belum dapat terealisasi. Jadi kami berharap di tahun 2024 ini pembangunan jembatan gantung untuk menuju akses ke masjid di Keuchik Leumiek ini akan bisa terbangun di tahun 2024 ini.

Kemudian beberapa tahun yang lalu kita juga pernah membangun jalan dua jalur di Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kota Blang Pidie sepanjang 3,5 kilometer di tahun 2019 tahun 2020, tetapi 2021-2022 ini tidak ada lagi kelanjutannya, Pak. Jadi kita berharap di tahun 2024 pembangunan jalan dua jalur di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya ini juga pembangunan lanjutan, pembangunan jalan dua jalur di Alur Bilie Kabupaten Nagan Raya juga perlu kita prioritaskan kembali, Pak, di Tahun Anggaran 2024 ini, karena kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu untuk membangun akses dua jalur ini, tapi ini rasanya tidak dapat difungsikan secara optimal kalau tidak kita lanjut. Jadi kita berharap di tahun-tahun 2024 ini agar dapat kembali kita lanjutkan pembangunan jalan dua jalur baik di kota Blang Pidie maupun di Alur Bilie di Kabupaten Nagan Raya ini.

Saya pikir itu, Pimpinan dari kami.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya saya persilakan Pak Boyman, kemudian nanti setelah itu siap-siap Pak Eddy Santana, silakan Pak Boyman.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan Komisi V, dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati, Bapak-Bapak Dirjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Saya hanya ingin menyampaikan pertama terima kasih kepada Bapak Dirjen berkaitan dengan Inpres Jalan Kendawangan dan Pesaruan, juga terima kasih kepada Bapak Kabalai Kalimantan Barat, ada Kabalainya? wow, mantap Kabalai Kalimantan Barat, tepuk tangan *dong wah. InsyaAllah*, Pak Dirjen tidak lama lagi pelaksanaan pembangunan Jalan Ketapang-Pesaruan itu akan dilaksanakan atas perjuangan kita bersama keinginan masyarakat dari pada saat dilantik sampai sekarang terwujud. Semoga pelaksanaan ini harapan saya, Pak Dirjen, karena ini kan tahap pertama Pak, tahap pertama itu kalau *enggak* salah saya hanya sampai di Sungai Tengar itu, sampai di Sungai

Tengar, yang terpenting buat saya dalam kesempatan ini harus tetap dilanjutkan pada tahap kedua Pesaguan dan Kabupaten Ketapang, karena jalan tersebut termasuk jalan yang dilalu-lalangi oleh perusahaan-perusahaan besar, karena di situ ada perusahaan alumina Bauksit WHW yang menggunakan jalan tersebut. Jadi itu harapan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat tentunya agar diselesaikan pada tahap berikutnya.

Kemudian Pak Dirjen juga berkaitan dengan masalah Jalan Sungai Kelik-Tayap, Pak, itu kan sudah mulus Pak dibangunnya tetapi belum tuntas. Jadi harapan saya agar manfaat buat masyarakat itu benar-benar bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh Masyarakat, pembangunan itu harus bisa diselesaikan dengan baik dan masyarakat benar-benar merasa terbantuan dengan jalan itu sudah selesai dibangun oleh pemerintah.

Yang lain saya pikir sama dengan kawan-kawan berkaitan dengan masalah jembatan gantung, Pak. Rata-rata jembatan gantung atas usulan kita, menurut saya teknis perencanaan juga tidak turun ke lapangan melihat lokus yang akan dibangun. Jadi kadang-kadang, Pak, itu jembatan gantung itu betangannya sama, misalkan 120 meter atau 70 meter, anggarannya beda kadang-kadang, Pak, beda *gitu. Nah*, jadi karena lokusnya saya pikir tentu tidak sama dengan daerah Pulau Jawa dibandingkan dengan kami Kalimantan, jadi harapan kita ke depan agar manfaat jembatan gantung itu benar-benar bisa dirasakan dan tidak menyalahi aturan. Kebanyakan setelah jembatan gantung itu dibangun terjadinya temuan, ketemuan, terjadi adanya temuan-temuan Pak, temuan-temuan baik berkaitan masalah untuk masalah pondasi dan sebagainya, karena menurut saya memang anggarannya tidak sesuai dengan lokus yang dibangun daerahnya beda dengan daerah barangkali yang tidak rawa begitu.

Jadi ke depan, maksud saya agar manfaatnya jelas jembatan gantung ini harus betul-betul dari teknis maupun perencanaan menyesuaikan antara lokus dan anggaran yang harus diturunkan, agar jembatan itu menjadi jembatan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kekuatan dan kualitas dari jembatan itu. Saya pikir itu untuk Bina Marga.

Untuk Dirjen Pembiayaan, Pak, untuk sampai saat sekarang saya belum ada pertanyaan, tetapi saya tetap memberikan semangat terus, Pak, Merdeka, Indonesia maju, kita, Indonesia maju Merdeka, kalau *enggak* maju *enggak* merdeka *dong*, bagaimana Wan? Iya. Demikian Pak Ketua dan Pak Dirjen.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Tentu sudah mantap *tuh* slogannya.

Kami persilakan Pak Eddy Santana kemudian setelah itu siap-siap Ibu Novita.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi V yang saya hormati, beserta para sahabat Anggota Komisi V,

Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Dirjen Bina Marga dan jajaran seluruh jajaran, khususnya para Kepala Balai, selamat datang di Jakarta dari Sumsel ada juga, aja juga ex-nya jadi direktur Pak Budi, biasanya kalau dari sana jadi direktur, mudah-mudahan terus berlanjut,

Saya langsung saja, Pak. Jadi ada pertanyaan gitu, pertanyaan dari masyarakat yang harus saya jawab mengenai jembatan, Pak. Jembatan di kota Palembang itu ada Jembatan Ampera kan, disebut *tuh* Jembatan Musi 1, kemudian ada Jembatan Musi 2 sudah dibangun duplikatnya itu, bagus ini sudah sangat bagus yang menghubungkan akses Lingkar Barat Kota Palembang dari tol juga ya keluar, dari *exit* tol itu sudah sudah bagus ya, dan sekarang juga lingkaran baratnya sedang dibangun hampir selesai dengan pola kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. *Nah*, tapi pertanyaannya Jembatan Musi 2 ada, Jembatan Musi 4 juga ada, sudah selesai aksesnya ada hampir beres juga Pak Dirjen itu, Jembatan Musi 6 maksudnya, Jembatan Musi 4 belum beres akses di seberang hulu, Jembatan Musi 5 itu ada di tolnya, tol Palembang-Betung ya. *Nah*, di mana jembatan Musi 3, masyarakat? *Kok*, jadi 1, 2, 4, 6, *eh* 4,5,6 *gitu*, saya sampaikan karena saya tahu ceritanya gitu, nomenklatur itu nggak bisa dirubah sudah ada FS-nya, sudah ada *detail engineering design* gitu ya, tapi pertanyaan ya kalau udah ada, kenapa *ndak* dibangun *gitu* Jembatan Musi 3, *nah* ini nunggu. Pada saatnya saya sampaikan cepat atau lambat itu akan dibangun, tapi masyarakat ingin cepat, Pak. Karena itu tolong ini di, *file* ini dibuka kembali, ya *blue print*-nya ada, lengkap semua, DED ada, jadi Musi 3 itu memang akses nanti ke lingkaran timur gitu ya, lingkaran timur Kota Palembang yang juga belum ada itu jalannya. Jadi *nah*, itu kita kalau Palembang itu lingkaran barat ada, lingkaran selatan ada, tinggal lingkaran timurnya, betul-betul jadi kota yang dilingkari oleh jalan nasional yang, yang bagus saya kira ini ya. Jadi Jembatan Musi 3 itu, Pak, Pak Dirjen juga akses ke Tanjung Api Api-Tanjung Carat. Jadi itu nanti mobil-mobil besar tidak lewat dalam kota lagi, tapi lewat lingkaran timur itu diharapkan dari luar kota. *Nah*, tolong Pak ini, mungkin sudah lupa Bina Marga, masuk arsip aja *gitu* kan, ini dibuka Kembali, memang besar itu jembatan itu dari Jembatan Musi 4, Musi 6, kira-kira dua kali lipat *tuh* anggarannya.

Nah, kemudian jalan Pak, Jalan Lingkaran Barat oke sekarang, Lingkaran Timur belum, Lingkaran Selatan juga perlu dipreservasi sama seperti Lingkaran Barat, karena apa? pertigaan ini akses tol Palembang-Indralaya *gitu*, dari dalam kota mau ke Indralaya yang paling baik adalah melewati Jalan Lingkaran

Selatan, lewat poros Ampera. *Nah*, poros Ampera sendiri itu belum selesai sebetulnya, Pak. Jadi ada setelah Stadion Jakabaring itu ada penyempitan, jadi yang sudah selesai itu ada dua jalur empat lajur. *Nah*, di ujung kira-kira 2-3 kilo, itu semuanya 8 kilo, Pak persis, dari seberang dari Ahmad Yani sampai ke Lingkar Selatan itu 8 kilo, 8 kilometer dan saya ngukurnya, Pak, pada waktu itu jadi tahu ukurannya. Jadi tolong ini juga diselesaikan *gitu*, *nah* sehingga sekarang sudah apa sudah padat sekali, Pak. Waktu ada 17 Agustus ada acara, saya sampai ndak jadi, Pak, puter lagi kita, padat sekali di situ. *Nah* tolong ini juga diselesaikan penyempitan ini, *bottleneck* di sana.

Nah, tadi juga, yang selanjutnya adalah jalan tol, Pak, ini juga jadi pertanyaan. Di presentasi Bina Marga, jalan tol yang menjadi perhatian adalah Tol Trans Sumatera *gitu*, yaitu Ruas Betung-Terpino-Jambi seksi I dan seksi II, *ah* pertanyaannya kapan, Pak, selesainya. Jadi saya bisa nyampaikan, *oh* 2024 udah bisa dipakai atau 2025 *gitu* udah beres semua *gitu*. Tapi ada lagi pertanyaan yang menggelitik, itu kenapa jalan tol ini stop sampai Prabumulih yang ke arah, ke arah ini ya, ke arah barat *gitu* ya Palembang. *Nah*, ini dilihat hari Jumat kami akan ke sana *gitu*, melihat langsung ya Komisi V ada Kunspik Jalan Tol Palembang-Prabumulih, walaupun hanya di pintu tolnya atau sedikit saja *gitu*, karena jauh, Prabumulih jauh. Palembang-Prabumulih selesai, Bengkulu 17 kilo selesai, tapi masih panjang sekali, masih diharapkan kapan juga ini bisa dimulai, karena saya yakin semua udah beres ini, sudah siap semua pemerintah daerah juga urusan pembebasan lahan, sudah membantu, mungkin walaupun belum belum semuanya mulai, tapi saya yakin semua rencana itu sudah, sudah siap dan tinggal *mbangun* lagi. *Nah*, ini tinggal kalau kerjasama dengan Bapak sebelah ya kan, Pembiayaan Infrastruktur ini bisa cepat *gitukan*, ini penting sekali, kasihan teman-teman Bengkulu, Pak. Sebab Bengkulu itu ekonominya *enggak* akan berkembang sepesat yang di timur *gitu* kalau jalan tolnya belum *nyambung*, Pak.

Nah, terakhir Palembang-Tanjung Api Api, Pak, yang hilang itu, *nah*, ini Palembang-Tanjung Api Api perlu juga preservasi udah sangat bagus, tapi kan *spot-spot* *gitu*, *spot-spot*, ada yang sudah mulai rusak. *Nah*, saya bolak-balik ke situ juga. *Nah*, kemana jalan yang itu Palembang, Tanjung Api Api, Tanjung Carat yang sudah dianggarkan itu, lebih baik di Simpang ke Sungsang, Pak, Sungsang lebih dibutuhkan pada saat ini, karena Tanjung Carat memang belum mulai itu, tapi itu udah lubangnyanya besar-besar, Pak, ke, di Sungsang ini Saya kira ini, Pak.

Jadi yang lain-lain saya kira terima kasih Bina Marga, PUPR, Inpresnya sudah jalan, kemudian responsif sekali Bina Marga urusan apa yang kami sampaikan *tuh* urusan Jembatan Ampera juga ya semua. Saya mohon juga jembatan itu semua dipercantik lagi Pak semua, bukan hanya Ampera tapi, ada Jembatan Musi 4, Musi 6, Musi 5, Musi 2 juga.

Makasih Pimpinan, ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Novita, kemudian setelah itu siap-siap Pak Sumail.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan, Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen semua, Bina Marga dan Pembiayaan serta jajaran semua yang
hadir di sini sampai Ka.Balai, Kabalai Jawa Tengah kelihatan,**

Sekarang bukan Ka.Balai Jawa Tengah terus jadi kayak *enggak* pernah *ngeliat* ke saya, udah jadi direktur *enggak* pernah dilihat saya, Bu ya. Oh iya, Pak Yongki *ngelihat*, *enggak-enggak* bagus *kok*, Bu Wi dari tadi nunduk aja, perasaan udah nggak jadi Ka.Balai, terus dia nggak pernah hubungan *gitu* kan Pak ya, untung pengantinya Bu Rin cantik juga sama jadi.

Yah, Pak Dirjen, saya ucapkan terima kasih karena Ka.Balai dulu dan sekarang bagus semuanya, ya dan jajaran sampai PPK juga banyak program yang sudah turun, *alhamdulillah*, walaupun seperti tadi kayak teman-teman sampaikan pasti sudah dan minta lagi, karena kita juga kalau ketemu sama kabupaten, kemudian ketemu sama Kades pasti terima kasih Bu Novi tetapi minta tambah lagi, jadi pada saat sekarang pasti *gitu*, Pak Hedy.

Yang pertama, saya pasti ucapkan terima kasih karena banyak program, kemudian usulannya ada beberapa Inpres, Pak. Saya sebenarnya dengan adanya Inpres ini masyarakat senang banget di kabupaten khususnya Dapil saya, Banyumas Cilacap, tapi hari ini saya sudah komunikasi dengan Bu Rin *sih* beberapa kali. Sebenarnya teknisnya, teknis untuk mengusulkan yang *real* itu gimana? Memang ada beberapa yang sudah masuk usulan saya, tetapi ini karena ada beberapa kabupaten, ada satu kabupaten yang bagus komunikasi, tetapi ada juga yang kebetulan kurang, kurang inilah *gitu* karena seperti kita tahu kadang-kadang kalau garisnya beda kan pasti kurang nyambung. *Lha*, ini ada beberapa menjadi kendala. Kalau kemudian usulan kita ini harus lewat Pemda *gitu*, sedangkan Pemdanya *enggak* nyambung, itu kan agak susah. Apakah kita masuknya lewat Ka.Balai. Ini *inputnya* lewat mana? Ini saya pengen gamblang aja di sini, karena seliweran ini ada yang rekomnya dari dewan, tapi ya kalau mereka ngedengerin apa namanya kepala dinasnya, kemudian *nginput* sesuai dengan apa yang kita usulkan. Tapi kalau kemudian *nginputnya* *enggak*, lah, ini Inpres anggarannya dari kita, dari nasional, tetapi mereka ada yang bilang, *enggak tuh*, jangan kemudian harus Acc DPR, orang kita masukin aja kita bisa nyatanya. *Nah*, gitu itu ada teknis-teknis yang seperti itu kendala di situ, Pak. Kalau Ka.Balai, PPK itu udah bagus banget. Cuma

saya minta kejelasan teknis yang sebenarnya apakah bisa usulannya tidak harus dari Pemda, dari Kabalai, atau gimana, ada reguler atau dari kita, kemudian prioritasnya yang mana, karena jelas ini anggarannya, undang-undangnya kita yang bikin, karena kita ngerti kabupaten, desa itu banyak butuh bantuan kita, tetapi pada saat prakteknya, *kok* ada nih yang printilan kayak gini *nih gitu*, itu Pak Hedy.

Kemudian apa namanya usulan *flyover* mungkin ya, saya *nggak* ngerti jadi prioritas apa *nggak*, tapi di Dapil saya, Banyumas ada usulan *flyover* di Rawalo, kemudian ada juga *flyover* di Kroya, di depan Pasar Kroya yang memang waktu itu *crowded*, tapi masih sampai sekarang, masih diusulkan, siapa tahu nanti ke depan bisa dianggarkan.

Kemudian seperti tadi juga ada PR-PR jembatan gantung, walaupun Dapil saya sudah selesai, tapi ada juga ini, Pak, masukan. Pengusaha-pengusaha ini kadang-kadang mereka itu kan ikut lelang semuanya *gitu*, persyaratan beres semuanya, *enggak nyalahin* juga kalau dia kemudian menang, tetapi dalam perjalanannya itu baru berapa persen dia pergi, bikin PR ke kita, bikin sakit kepala. Akhirnya saya jadi harus ngurusin dengan Ka.Balai, dengan PPK-nya, Satkernya, itu kan jadi PR pengusaha-pengusaha seperti ini, walaupun kemudian itu bisa selesai, tapi ini catatan untuk pengusaha ini bagaimana *gitu*. Nanti kalau dibiarkan dia menang, menang, menang, ninggalin PR, ninggalin masalah untuk kita semuanya. Belum lagi ada PR yang lahannya konflik ini itu. Tetapi pengusaha ini harus ada catatan khusus, Pak. Kalau memang sudah beberapa kali ya kasih aja *blacklist* ke pengusaha ini, *enggak* bisa semua dia dapat menang sampai banyak titik, tapi dia *enggak* selesaikan, itu jadi masalah di bawah, itu aja.

Sama usulan jalan nasional Cilacap menuju Jogja itu, saya *enggak* ngerti sudah teranggarkan apa belum, yang Adipala ya Bu Rin ya, dan yang lainnya *sih* udah, yang jelas ini PR-nya Inpres, Pak, karena banyak banget yang mengusulkan di desa-desa di Dapil saya khususnya.

Kemudian *flyover* yang Bumiayu, Pak itu, yang makan korban 39 meninggal kecelakaan. Itu mohon sekali ada atensi solusinya apa *gitu*, karena walaupun sekarang mungkin *enggak* ada, belum *nih* dalam ini tidak ada kecelakaan, tapi kan bukan berarti kita biarkan. Jangan sampai nanti kemudian dari 35 ada nambah lagi nyawa melayang, kemudian korban nabrak rumah, nabrak segala macam itu di Bumiayu. Ya, jujur itu bukan Dapil saya, tapi semua minta tolong karena di sana *enggak* ada Komisi V, kan itu *nggak* bisa dibiarkan, Bumiayu-Brebes.

Sama saya mau tanya pembiayaan yang jalan tol Bandung-Cilacap dan Cilacap itu progresnya gimana, ya saya pingin dengar aja, mumpung rapat ini.

Serta terakhir Pak Eddy Santana, kalau *flyover* di sana, saya dulu berapa kali yang di OKU Timur ya Pak ya, kalau *enggak* salah ada jalan kereta api yang sejajar dengan jalan raya *gitu*, setiap 5 menit berhenti, macet,

kayaknya ada beberapa titik itu, 3 titik butuh *flyover*, Pak, penting banget di sana, karena sangat menghambat itu.

Makasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih, Bu Novi.
Itu Baturaja, Martapura.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Willem, silakan Pak Willem, karena Pak Boyman-nya lagi, Pak Sumail lagi keluar. Silakan, Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik, Pak Ketua.

Dari kami, saya merasa Pak Dirjen dan juga seluruh jajaran mungkin perlu lakukan apa namanya, pemetaan wilayah karena selama ini kami melihat selalu sering terjadi penyamaan definisi dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga ada kawasan-kawasan yang sering diabaikan dalam proses perencanaan dan pembangunan, seperti halnya di sini kami di wilayah timur itu seringkali diabaikan, karena kriteria yang dibuat itu tidak masuk, syarat dan kriteria yang dibuat oleh pusat itu tidak masuk sama sekali. Sementara dalam proses penyelenggaraan pembangunan itu lebih dengan syarat dan kriteria yang dibuat itu, anggaran lebih banyak dititikberatkan pada pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat industri, sementara di kawasan-kawasan terluar sana itu dengan situasi itu akhirnya diabaikan sehingga kami di luar sana jadi lahan keruh, walaupun kami punya potensi sumber daya alam besar, tapi hanya dijadikan lahan perahan, lahan keruh gitu dan jauh dari sentuhan peradaban pembangunan. Karena itu harapan kami ke depan mungkin perlu lakukan pemetaan. Kalau bisa untuk wilayah timur itu perlu punya ruang sendiri untuk mendiskusikan supaya dengan demikian bisa terjadi sinkronisasi program secara proporsional, sehingga apa yang menjadi harapan dan bagi daerah-daerah yang terluar sana, itu lambat laun bisa terkejar dalam mengejar ketertinggalan.

Dan berikut terkait dengan, terkait dengan dukungan Inpres Jalan Daerah. Kami melihat di sini sepanjang 26 kilometer, alokasi anggaran jalan daerah ini difokuskan untuk dukungan pembangunan jalan daerah di Jawa-Sumatera. *Nah*, sebenarnya ini tidak perlu ada, kalau memang seperti ini tidak perlu ada Inpres Jalan Daerah karena anggaran Bina Marga sudah banyak porsinya untuk daerah-daerah pusat pertumbuhan, karena itu dukungan Inpres Jalan Daerah kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya lebih diprioritaskan

pada jalan daerah yang berada di daerah 3T. Karena tujuan utama terbentuknya Undang-Undang Jalan Daerah adalah itu, tapi karena dengan sistem yang dibuat pusat sedemikian rupa sehingga walaupun sudah ada undang-undang tapi daerah yang masuk dalam kategori 3T ini akan selalu terabaikan, akan selalu ditinggalkan dari sentuhan penyelenggaraan pembangunan. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi perhatian kita bersama.

Dan juga terkait dengan jalan ruas Trans Nasional itu Usilimo-Karubaga, Karubaga-Kang Geme, Kang Geme-Ilu, Ilu-Mulia sepanjang 151,94 kilometer untuk preservasi jalan perlu diperhatikan karena ini menghubungkan berapa kabupaten dan akses utamanya masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang hari ini sudah menjadi provinsi Papua, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan juga Mamberamo Tengah, dan Lani Jaya, kalau dari Usilimo ke Wamena ke Puncak Mega, sisi kiri jalan itu dihuni oleh masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya dan juga Lani Jaya, terus sisi kanan ini dihuni oleh masyarakat Dalimo dan Mamberamo Tengah. Dan setelah kita melewati Puncak Mega ke sana itu masuk wilayah Tolikara. Dan terus ke sana itu masuk wilayah Puncak Jaya dan terus lanjutan adalah Puncak Papua. Ini menghubungkan sekian jumlah kabupaten, karena itu diharapkan supaya ini menjadi, menjadi perhatian, karena ini masuk ruas nasional dan juga perlu juga diperhatikan di sini terkait dengan jaringan, jaringan jalan. Sejauh ini, kami di Tanah Papua belum ada jaringan jalan sehingga ketika orang masuk ke sana, entah kita dari Jakarta maupun orang asing kalau masuk ke sana kehilangan jalan, kita ada di titik mana ini. Karena itu, diharapkan supaya bisa ada jaringan jalan yang harus dibangun di Tanah Papua, baik di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan maupun juga Papua Tengah.

Dan terkait yang usulan program akan kami sampaikan nanti pada kesempatan mendatang.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya saya persilakan Pak Hamka, kemudian siap-siap Pak Sumail setelah ini.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini ada Pak Munir, Dirjen Pembiayaan dan sebagainya,**

Saya hanya ingin menyampaikan syukur dan terima kasih pada seluruh jajaran Kementerian PUPR karena ini adalah *legacy* yang kita sudah buat sama-sama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah dilanjutkan dengan turunannya dengan adanya Inpres. *Alhamdulillah*, masyarakat dan pemerintah daerah *men-support* itu semuanya, memang harapan kita bagaimana mempercepat kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan RPJM mereka. Memang kendalanya memang adalah tentu tidak secara serta-merta bisa terpenuhi semuanya, terkendala pada anggaran, tapi ini adalah terobosan yang patut kita syukuri dan hargai dan berterima kasih kepada kita semua yang hadir pada hari ini khususnya di Komisi V dan Kementerian PUPR, lahirnya Undang-Undang Nomor 22.

Terima kasih ke Balai juga yang hadir Pak Asep ya komunikasinya cukup dan Pak Dirjen sudah meninjau daerah saya, melihat Inpresnya, melihat beberapa proyek, *alhamdulillah* berjalan dengan baik. Hanya satu catatan yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen *batch 2* berdasarkan khusus di daerah pemilihan saya, Pak Dirjen, *batch 2* itu akan dilaksanakan mungkin pada tahun-tahun depan, apakah menggunakan anggaran yang ada pada paparan ini atau kah belum? sehingga *batch 2* ini kira-kira bisa selesai *enggak* sebelum Pemilu misalnya, ataukah setelah Pemilu. Ini yang bisa kami janjikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat bahwa *Insyallah batch 2* ini akan selesai, apalagi kami menghadapi pemilihan umum yang akan datang tentu apanya, harapan-harapan dari masyarakat itu kita harus sampaikan dengan baik. Mudah-mudahan anggaran yang tersedia itu masuk pada *batch 2*.

Selanjutnya, saya ingin menitipkan kepada pengusaha jalan tol Pak Munir. Undang-Undang Nomor 22 juga sudah selesai salah satu pasal yang krusial pada waktu kita bahas itu adalah masalah konsesi Pak, Pak Munir. Harus ada turunan aturan daripada undang-undang ini, tentu peraturan menteri, utamanya masalah konsesi baik untuk pengembangan maupun yang eksisting ya. Oleh karena itu, barangkali Pak Munir, Pak, perusahaan jalan tol, perusahaan jalan tol ya bisa memikirkan itu dengan baik. Ada keluhan dari masyarakat seharusnya sudah, kalau hitung-hitungan secara, secara biasa saja bahwa kalau sudah selesai masa konsesi berarti jalan tol itu sudah tidak berbayar, tapi itu tidak seperti itu karena masih ada namanya preservasi dan perbaikan. Cuma masalahnya adalah kadang kala masih lebih tinggi biaya jalan tolnya dibanding pada saat semula. Ini mungkin menjadi bahan untuk kita semua untuk bisa memikirkan itu dan yang selanjutnya ribut-ribut mengenai melepaskan konsesi dari PT Hutama Karya misalnya, apakah itu *business to business* memang, apakah dibenarkan dan saya yakin dan PT Hutama Karya itu mengalami hambatan likuiditas karena jalan tolnya tidak ekonomis. Ini catatan saya yang menjadi bahan pemikiran untuk saya semuanya, kita semuanya.

Dan yang terakhir kepada Dirjen Pembiayaan seperti apa yang disampaikan Pak Aras tolong dipikirkan Mamminasata, Pak, ya, KPBU-nya seperti apa supaya bisa selesai dengan baik.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Ya saya persilakan Pak Sumail, kemudian setelah itu siap-siap, Pak Sudewo.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Pembiayaan dan seluruh hadirin, Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.,

Kalau saya melihat dari sisi anggaran di Ditjen Bina Marga memang kami mengamati ada penurunan sekitar 1,17 triliun. *Nah*, harapan saya ini tidak juga mengganggu rencana prioritas maupun Renstra dari pemerintah dari tahun 2020 ke 2024, karena bidang jalan ini sangat besar perhatian publik dan ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang keberlanjutan Jalan Tol Probwangi. Pak Munir hadir di sini dan kami tempo hari sudah melakukan peninjauan sampai Besuki yang masuk wilayah Kabupaten Situbondo, namun masih kurang lebih 120 kilo lagi, Pak, mencapai ujung di daerah Ketapang. Masyarakat selalu bertanya kapan ini dilaksanakan. Saya lihat di apa *leaflet* yang disampaikan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan tidak ada di situ ulasan sama sekali. *Nah*, apakah ini ditinggalkan atau bagaimana? karena juga masyarakat ingin segera itu terkoneksi, tersambung untuk memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengesampingkan tentu potensi-potensi lokal di sana bahwa, kalau kita lihat di Jawa Tengah begitu ada jalan tol kemudian UMKM di situ tidak bertumbuh ataupun kemudian mandek, itu yang kedua.

Terus selanjutnya, dua bulan yang lalu di Pelabuhan Ketapang terjadi macet yang itu barangkali menjadi apa namanya satu kejadian yang paling lama sepanjang sejarah, Pak, hampir 8 hari. *Nah*, tentu ini juga harus kita pikirkan begitu nanti jalan tol sudah sampai di ujung Ketapang, tepatnya di pelabuhan. Saya berpikir kiranya sudah saatnya kita mulai merencanakan Jembatan Jawa-Bali, Pak. Karena kalau tidak, begitu tol sudah tersambung kapasitas tampung pelabuhan yang cuman kurang lebih bisa menampung 100 atau 150 truk, maka di situ akan ada antrian Panjang. Di beberapa media

memang kami baca masih belum ada kesesuaian antara tokoh-tokoh masyarakat di Bali, bahwa pengennya Bali tetap menjadi eksklusif daerah tersendiri, tapi kalau kita bicara secara keutuhan NKRI, saya kira kita tidak lagi harus ada batas di antara itu. Mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana kita duduk bersama, terlebih nanti dari Denpasar atau Mengwi ke Gilimanuk juga sudah akan tersambung walaupun progresnya kami mendengar juga mandek hingga hari ini.

Nah, yang keempat kaitannya dengan pembukaan atau *launching* dari Pelabuhan Jangkar menuju Lembar, Pak, tol laut. Sebelum menuju pelabuhan ada kurang lebih 5 kilometer ya, karena itu sudah menghubungkan antar kabupaten, antar provinsi sudah sepatutnya bahwa APBN hadir di sana dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar truk-truk yang menuju ke sana, karena tanggal 15 di-*launching*, tanggal 16 dia lagi *enggak* ada lagi truk, Pak, mau datang ke sana, selain masalah tarif tentang juga kondisi jalan mau menuju ke pelabuhan, pendek sekali jaraknya, Pak, 5 sampai 7 kilometer ya. Di sisi pangkalnya setelah kita keluar dari jalan nasional itu sudah bagus, tapi di ujung atau mendekati pelabuhan kurang lebih ya 600 sampai 1 kilometer itu perlu pembenahan dari kita karena jalan yang menyempit sehingga kita mendukung juga keinginan-keinginan daerah dalam rangka mengakselerasi, transportasi, dan kemudian apa namanya kesetaraan, terus kemudian pemerataan dalam hal pembangunan, itu yang keempat.

Selanjutnya, karena kami juga kadang-kadang melintas di dari Banyuwangi menuju Jember, ini sudah bertahun-tahun Gunung Gunitir itu menjadi penyebab kemacetan karena banyak juga truk-truk muatan berat di situ, Pak, melintas di situ, jalannya berkelok-kelok dan rawan longsor. Saya ingin dapat gambaran tentang lingkaran selatan yang menghubungkan Banyuwangi sampai Jember, kira-kira progresnya sampai mana itu.

Yang terakhir ucapan terima kasih saya terhadap Dirjen Bina Marga tentu juga dengan Pembiayaan, ada banyak program-program yang sudah masuk ke Dapil, kaitannya dengan Inpres Nomor 3/2003 yang reguler di Kabupaten Bondowoso tinggal sedikit lagi, karena Bondowoso juga bagian selingkar dari Ijen-nya juga akan diharapkan bisa menikmati apa namanya pesona eksotik Ijen. Dulu orang berwisata ke Ijen itu lewat Bondowoso, begitu Banyuwangi bertumbuh berkembang maka hari ini sedikit ketinggalan. *Nah*, tentu kami ingin ada keseimbangan dalam pembangunan. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sudewo, kemudian setelah itu Pak Mulyadi siap-siap.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ini dikasih kesempatan terakhir oleh Pimpinan, saya datang pertama kali, ruangan masih kosong saya sudah ada di sini.

KETUA RAPAT:

Pak Sudewo ini tidak terakhir, Pak, di tengah-tengah.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Tapi dikasih terakhir, saya sampai pesan sama Pak Eddy Santana kalau ada panggilan saya ketiduran tolong dibangun.

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, pertama yang soal Inpres, Inpres Nomor 3 Tahun 2023 itu hanya sampai batas jalan kabupaten dan jalan provinsi tidak masuk sampai jalan poros desa, padahal undang-undang itu sampai jalan poros desa. Kita sudah lihat kondisi jalan poros desa di beberapa daerah itu sebenarnya sangat memprihatinkan maka itulah pada saat kami menyusun undang-undang bersama pemerintah itu sepakat bahwa jalan poros desa juga layak untuk diakomodir dalam Inpres ya, dalam hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, tapi Inpres Nomor 3 Tahun 2023 berbicara lain, jalan poros desa tidak termasuk yang diakomodir, tapi *oke*lah itu Inpres yang sekarang ini berjalan. Saya berharap kepada pemerintah Kementerian PUPR untuk dilakukan revisi terhadap Inpres ini supaya jalan poros desa itu bisa diakomodir, artinya *linear* dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Yang kedua, saya mengkritisi soal Inpres sebagaimana yang disampaikan oleh kawan yang lain. Mekanismenya tolong direvisi juga, dievaluasi bahwa itu adalah domain dari kami, Komisi V, jadi tidak perlu harus prosedurnya berbelit-belit sampai harus melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kesannya kita harus mendapatkan persetujuan, kalau hanya sepengetahuan sih *oke*, tapi kalau persetujuan ini ada nuansa politik juga yang masuk dalam prosedur atau mekanisme pengusulan Inpres ini. Jadi tolong dievaluasi.

Yang ketiga soal anggaran, tadi disinggung oleh kawan juga bahwa ditahun 2024, Inpres itu hanya teralokasikan 1,5 triliun dan itupun hanya untuk *multiyears* atau kelanjutan dari tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah yang dialokasikan untuk *multiyears* itu, *multiyears* yang sudah berjalan itu apakah juga menggunakan dana Inpres?

Apakah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan bila *multiyears* atau program yang sudah berjalan tidak Inpres kemudian dilanjutkan dengan Inpres *gitu*, ini aturan mainnya bagaimana. Saya kira Pak Dirjen Bina Marga sangat paham ini ya, tapi perlu kami mendapatkan satu penjelasan. Kemudian kalau hanya 1,5 triliun bagaimana optimis kami untuk di Tahun Anggaran 2024 yang sedang berjalan nanti, apakah memang ada dari Kementerian Keuangan yang akan mengalokasikan untuk anggaran baru dalam Inpres itu *gitu*. Kita kan punya pengalaman di tahun 2023 bahwa di Tahun Anggaran berjalan 2023 mendapatkan dana dari Kementerian Keuangan sangat terbatas ya, kemudian hal itu supaya tidak terulang kembali di tahun 2023 sudah kita rencanakan, tapi faktanya hanya muncul 1,5 triliun, bagaimana hal ini untuk Tahun Anggaran berjalan di 2024 nanti.

Kemudian soal Inpres yang keempat, saya hanya ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah, dari PUPR bahwa pada rapat sebelumnya pernah kami sampaikan ada semacam kendala dalam pengalokasian Inpres ya, pengalokasian anggaran Inpres yaitu terkait dengan aturan main yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah faktor fiskal, ada fiskal sedang, ada fiskal rendah, ada fiskal tinggi *gitu*, dalam undang-undang tidak melihat faktor ini tapi oleh Kementerian Keuangan muncul peraturan yang semacam ini. *Nah*, apakah Kementerian PUPR sudah pernah mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan supaya aturan ini, persyaratan ini ditanggalkan, dilakukan evaluasi tidak perlu harus melihat bagaimana kondisi fiskal suatu daerah, tapi yang penting ruas jalan tersebut dalam kondisi yang rusak berat di mana daerah memang mengusulkan itu artinya tidak mampu menangani. Apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan? Itu pertama soal Inpres.

Yang kedua, saya apresiasi kepada Pak Dirjen Bina Marga, punya anggaran sebesar 55 triliun, dukungan manajemennya hanya sebesar 2,39 triliun, artinya efisiensi dan efektivitas di situ betul-betul menjadi perhatian Pak Dirjen Bina Marga. Saya melihat pemaparan yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan satu hari yang lalu, dia punya anggaran 7,6 triliun, tapi dukungan manajemennya 2,9 triliun, sungguh tidak proporsional, tidak sebanding, hanya sayang pada saat RDP kemarin dengan Dirjen Udara tidak ada waktu untuk melakukan pendalaman hal itu *gitu*. Saya apresiasi kepada Pak Dirjen Bina Marga. Khusus untuk Jalan Purwodadi-Solo, Purwodadi-Semarang, Purwodadi-Blora itu kan jalan provinsi, tapi ditangani oleh Kementerian PUPR. Saya ini setiap saat merasakan dampak dari kondisi yang sangat rusak Jalan Solo-Purwodadi dan Purwodadi-Semarang, karena rumah saya di Solo, Purwodadi itu adalah daerah pemilihan saya, Pati itu kampung saya, Blora daerah pemilihan saya, jadi sering lewat di situ, kondisi jalan ini memang sangat memprihatinkan ya, ya ini statusnya adalah jalan provinsi.

Beruntung Pak Menteri PUPR sangat iba dengan kondisi itu, kemudian ditangani *gitu*. Saya sampai melipir-melipir masuk kampung untuk menghindari jalan itu, Pak, jalan kabupaten, jalan desa di wilayah Kabupaten Sragen, wilayah Kabupaten Purwodadi supaya bisa lebih lancar menghindari jalan

rusak jalan provinsi, Solo-Semarang-Purwodadi, Solo-Purwodadi dan Purwodadi-Blora, untung ada hibah. Hanya yang disayangkan ya kan, ini hibah yang diberikan oleh Kementerian PUPR juga tidak diimbangi oleh pemerintah provinsi, karena tidak mungkin semua dalam kondisi yang rusak itu akan ditangani oleh pemerintah pusat, tidak mungkin. Karena pemerintah pusat sendiri punya tanggung jawab formal sesuai undang-undang itu adalah jalan nasional, sementara beban jalan nasional itu pun sangat besar yang tidak mungkin cula, pula untuk ditangani dengan tersedianya APBN, itu pun masih disematkan untuk membantu jalan provinsi ini. Tapi sayang sisanya yang masih rusak itu juga tidak ada *support gitu* sehingga meskipun itu sudah ditangani oleh PUPR Pusat masih ada beberapa titik yang kondisinya rusak berat, ini sangat membantu tetapi juga belum menyelesaikan masalah. Tapi kami juga berterima kasih kepada Kementerian PUPR utamanya kepada Pak Menteri PUPR dan kepada Pak Dirjen Bina Marga dengan semua jajarannya, utamanya Balai Jalan di Provinsi Jawa Tengah.

Yang kedua saya, yang ketiga Pantura, Pantura ini kan daerah pemilihan saya. Jadi Demak-Kudus, Kudus-Pati, Pati-Rembang, Rembang sampai Tuban itu Pantura itu memang dalam kondisi yang rusak ringan dan rusak sedang, Pak, ada beberapa titik bahkan itu rusak berat. Mudah-mudahan di tahun 2024 menjadi perhatian Pak Dirjen Bina Marga untuk ditangani.

Yang, saya hanya ingin memberikan masukan kepada Dirjen Bina Marga, selama ini mungkin terabaikan, selama ini memang kenyataannya terabaikan, tapi dengan masukan ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan di Pak Dirjen Bina Marga untuk, untuk dialokasikan menjadi sebuah program, yaitu putaran balik di jalan nasional itu, itu tolong di-*manage* dengan baik supaya putaran balik itu tidak menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Kalau itu misalnya didesain secara baik *gitu*, ada pelebaran pada saat titik-titik putaran balik, dengan mulai pembebasan lahan atau mencari titik tertentu yang memang memungkinkan untuk dilakukan pelebaran sehingga jalan yang lalu lintas yang akan melaju terus itu tidak terkendala oleh kendaraan yang akan putar balik, ya itu meskipun itu banyak sekali tapi mungkin bisa dimulai beberapa titik terlebih dulu.

Yang saya ingin masukkan juga kepada Pak Dirjen Bina Marga. Pada saat mengerjakan konstruksi itu pasti menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas, itu pasti, tapi bagaimana dampak kemacetan lalu lintas itu bisa dieliminir ya, bisa dikurangi sedemikian rupa supaya perjalanan atau lalu lintas ini tidak terlalu terganggu gitu ya maka saya ingin memberikan masukan pada saat metode pengerjaannya itu betul-betul diperhatikan dan waktu pekerjaannya. Jadi jangan sampai jam 4 sore kemudian berhenti ditinggal begitu saja, Pak, ditinggal begitu saja. Mungkin metode pengerjaannya yang dirubah sampai malam sehingga ini juga terkait dengan penganggaran *gitu* ya, karena ini terkait dengan penganggaran maka saya tepat untuk memberikan masukan pada saat sekarang ini.

Yang terakhir pada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Pembiayaan Infrastruktur itu kalau dilihat dari anggarannya memang sedikit Pak hanya

setengah triliun sekitar 500 miliar, tetapi posisinya sangat strategis karena kalau kinerjanya Pembiayaan Infrastruktur itu bagus, itu bisa meringankan beban APBN kita. Jadi mana yang bisa di KPBU kan, apakah itu jalan tol? apakah itu sepam? apakah itu perumahan? Ya, itu tergantung pada kinerja Pembiayaan Infrastruktur ya. Jadi Pembiayaan Infrastruktur itu harus melakukan beberapa metode ya, melakukan inovasi ya dan juga menjalin kerjasama antar lembaga.

Yang terakhir saja, ini sudah penegasan dari saya beberapa kali soal jalan tol Demak-Tuban. Itu sudah 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun yang lalu. Awal saya sudah pernah koordinasi sama Dirjen Pembiayaan Infrastruktur meskipun Dirjen-nya pada saat itu Pak Eko tapi saya koordinasinya dengan Pak Heri, kami akan menawarkan pemrakarsa ya, *unsolicited gitu*, tapi karena pemerintah katanya ini akan dilakukan studi kelayakan oleh pemerintah sendiri silakan oleh pemerintah. Beberapa kali saya tanyakan, terakhir saya tanyakan adalah di awal tahun 2023, konon katanya September FS-nya itu sudah selesai. *Nah*, sekarang ini saya ketemu dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, memang saya paham bahwa Dirjen Bina Marga tidak begitu mengikuti soal ini, ini lebih dominannya ke Pembiayaan Infrastruktur, beruntung sekarang ini kita ketemu dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, sesungguhnya sudah sampai mana? Kalau memang Demak-Tuban itu dirasa terlalu berat untuk direalisasikan secara keseluruhan, ruas tertentu saja, mungkin Demak-Rembang itu sudah sangat membantu, Pak, sudah sangat membantu, meskipun perencanaannya total Demak-Tuban, Tuban-Gresik kemudian sambung dengan *existing* sekarang itu tapi paling tidak, ada satu *blueprint* untuk realisasinya yaitu Demak-Rembang.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudewo.

Selanjutnya kami silakan Pak Mulyadi.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., MM.):

Izin-izin Ketua, saya menyerahkan ini aja, izin boleh?

KETUA RAPAT:

Oh.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., MM.):

Kan ada agenda.

KETUA RAPAT:

Boleh-boleh. Bu Neng Eem mau bertanya juga? Mungkin kalau mau bertanya nanti setelah, *oh oke*.

Silakan Pak Mulyadi kemudian setelah itu siap-siap Pak Ruslan.

F-P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):

Baik.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pak Ketua Rapat yang saya hormati serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang hadir yang saya banggakan, Bapak Dirjen Bina Marga beserta seluruh jajaran yang, Bapak Balai Jawa Barat datang *enggak* Pak ya? Oh hadir ya, saya nunggu telepon Bapak, Pak dari 3 minggu yang lalu katanya mau telepon balik, Kemudian ada Pak Dirjen Pembiayaan juga Badan Pengatur Jalan Tol hadir Pak ya? Oke Pak selamat kenal Pak, saya baru lihat Bapak juga soalnya,

Pertama tentu saya sama dengan rekan-rekan mengapresiasi terhadap program Inpres yang *alhamdulillah* di Dapil saya *Insyallah* akan dilaksanakan, terima kasih juga ke Pak Brawijaya yang mendedikasikan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi yang sudah kami lakukan, Pak, minggu lalu, dan saya kira program percepatan jalan daerah ini saya kira terobosan, Pak Dirjen. Jadi saya kira harus dipertahankan, kenapa? karena kami di Dapil yang tahu persis situasi di mana kebutuhan jalan yang diintervensi oleh APBN itu betul-betul vital, Pak. Ini sampai hari ini saya masih apa dihubungi oleh tokoh-tokoh wilayah yang mengucapkan terima kasih, Pak, karena memang sangat sulit untuk mengakses lewat APBD yang notabene kecamatan itu adalah kecamatan tertinggal di Kabupaten Bogor yang jaraknya, Pak, tidak jauh dari Istana Bogor, tidak jauh dari Istana Cipanas sebenarnya maka keberadaan program Inpres itu sudah menjadi terobosan yang luar biasa walaupun dalam tanda petik masih harus dimaksimalkan Pak Dirjen dan saya berharap ini terus digulirkan, Pak, dan Bapak sudah memberikan solusi yang luar biasa utamanya terkait kemacetan Puncak, Pak, karena itu adalah opsi terbaik pada saat Puncak tersumbat, maka dia akan masuk ke Hanjawa keluar dengan beberapa opsi Sentul atau Citereurep, Pak, itu mudah-mudahan bisa maksimal Pak. Juga tentu mudah-mudahan Kecamatan Sukamakmur itu namanya, Pak, di Kabupaten Bogor betul-betul bisa membawa kemakmuran terhadap masyarakat, Pak, karena hasil bumi dan destinasi wisatanya banyak.

Kemudian Pak Dirjen, saya juga harus menyampaikan terkait program-program yang Bapak laksanakan. Saya lihat di Jawa Barat, Pak, ya, ada beberapa *item*, tapi saya cuman mengingatkan tentang keberlanjutan pembangunan jalur pantai selatan, Pak, ya. *Insyallah*, saya minggu ini saya akan coba lagi lihat jalur pantai selatan, Pak, ya. Saya juga akan coba laporkan ke Bapak kondisi terakhir terutama terkait *traffic*, dan terpenting saya kira di program 2024 saya tidak ada, Pak, upaya untuk peningkatan atau optimalisasi jalur pantai selatan, terutama terkait konektivitas menuju jalur pantai selatan itu, Pak. Saya sudah masuk di beberapa konektivitas akses menuju jalur pantai selatan itu, saya kira itu juga perlu diintervensi oleh APBN, Pak, ya. Payung hukumnya kan sudah jelas, Pak, ya undang-undang revisi Jalan itu, dan itu penting, Pak, karena buat saya itu destinasi wisata andalan berikutnya dan mungkin juga industri perikanan harusnya berkembang di sana, Pak.

Kemudian, Pak, saya titip aspirasi juga Pak oleh masyarakat dari perbatasan Serpong, Gunung Sindur Bogor, Pak ya, itu jalan yang sangat padat tapi mohon maaf dengan segala hormat pemerintah harus segera hadir, Pak, untuk membantu proses revitalisasi, Pak, saya lihat biaya preservasi besar tapi tolong *dong* alokasikan juga untuk wilayah perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat itu.

Kemudian juga kalau Bapak mendengar laporan mungkin nanti dari Bapak Kepala Balai terkait *flyover* Yasmin kota Bogor, Pak, itu padat luar biasa, Pak. Kalaupun memungkinkan itu *flyover* juga menjadi prioritas Bapak ya kan.

Nah, hal-hal seperti ini saya sampaikan untuk bagian dari *sharing* saja Pak karena kami di lapangan juga diakses oleh masyarakat, dan mudah-mudahan komunikasi kita, Pak, dibuka sebaik-baiknya seperti Pak Dirjen yang sangat selalu responsive, terima kasih, kenapa Pak? Karena ini Anggota Parlemen itu ya tugasnya ngomong, Pak, kalau misalnya ruang bicara saja kami tidak bisa, kami buntu, Pak, untuk bisa merespon masyarakat. *Eenggak* apa-apa Pak, minimal dijanjikan juga *ndak* apa-apa, diperhatikan gitu aja cukup, Pak, kami juga jadi sudah menyelesaikan amanah saya kira.

Kemudian terkait jalan tol. Pak Munir, saya memberikan masukan, Pak ya, saya diakses oleh warga Karawang Pak terkait pembangunan Jakarta-Cikampek 2 Pak ya, khususnya yang tinggal di wilayah Desa Tamansari, Pak, Kampung Citaman, Pak, yang sempat memblokade, memblokade jalan sehingga pembangunan Japek 2 terhambat. *Nah*, ini orientasi pembangunan kan seharusnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berharap kedepan betul-betul wilayah-wilayah dilintasi *backbone*, saya nyaman banget nih bahasa *backbone*, bahasa Pak Dirjen, betul-betul bukan saja untuk pengguna, Pak, tapi juga untuk warga di sekitarnya. Jadi pembangunan itu harus orientasinya pra, saat dan pasca, Pak ya. Pra-nya masyarakat tidak dirugikan, saatnya masyarakat juga bisa menikmati, pascanya juga mungkin dampak lanjut dari setiap pembangunan itu betul-betul meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Pak, itu terkait Japek II, Pak. Saya titip aspirasi dari teman-teman di Karawang yang minta disuarakan.

Kemudian terkait Cikamuning-Lembang, Pak, saya sudah pernah suarakan, Pak. Itu tolong dikaji, Pak, ya. Saya berkali-kali sudah menyampaikan kalau wisatawan lokal akan ke Bandung, kemudian destinasi wisata, destinasi wisatanya adalah Lembang, mereka mau tidak mau mengakses *exit* Tol Pasteur ya, itu macet, Pak, ya, sebelum gerbang tol ya Bapak-Bapak tahulah dan Ibu tahulah ya bahwa Tol Pasteur *exit* di *weekend* itu luar biasa. *Nah*, maka saya kira itu perlu dipikirkan solusinya, Pak, mungkin apakah ada opsi *exit* lain atau dibuatkan juga *flyover* atau saya pernah usulkan bikin saja *shortcut* dari Cikamuning ke Lembang *gitu* supaya wisatawan yang akan menuju Bandung Utara bisa keluar di Cikamuning kemudian keluar di Lembang. Saya kira juga itu akan menghidupkan destinasi wisata dan mengurangi beban Pasteur, Pak, ya.

Kemudian izin terkait Tol Puncak, Pak, lagi-lagi saya mengingatkan saja, Pak, ya supaya itu tetap dikawal, Pak, untuk dilaksanakan, karena itu *legacy* terbaik buat Bapak-bapak, kenapa? karena sampai hari ini Puncak macetnya sudah anomali ya. Kalau sekarang ada ee apa studi kelayakan atau apapun, jangan hanya ditutup opsi misalnya *exit* Caringin *shortcut* ke Gunung Mas Cisarua, Pak, ya, tapi juga coba dipikirkan opsi lain misalnya saya lihat ada opsi lain lebih pendek dan konon katanya lebih murah yaitu di wilayah sebelum gerbang Tol Ciawi, lurus terus, Pak, di jalur selatan Puncak *existing* itu juga sama Pak, katanya lebih pendek dan biayanya lebih murah, karena tidak perlu membangun *tunnel* segala macam. Aspek teknis Bapak-Bapak yang lebih ahli.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Sekali lagi saya mengapresiasi terima kasih atas upaya-upaya terbaik dan terpenting juga kami ingin mendapatkan *update*, Pak, terkait pembangunan-pembangunan di IKN yang menyedot anggaran yang luar biasa, kalau perlu itu ada ya *roadmap* khususnya, kan saya sudah mengusulkan berkali-kali kalau bisa itu dihadirkan Kepala Otorita IKN ya, bersama Kementerian PUPR ya, supaya apa? Kita tahu persis *gitu loh* bahwa anggaran dan apa anggaran pembangunan yang dialokasikan itu menyedot luar biasa ya. Padahal *nih* Indonesia begitu luas, kalau IKN-nya kita tidak *clear* terkait *roadmap* pembangunan, *timetable* dan anggarannya, ya kita sebagai mitra justru mohon maaf dalam tanda petik menyayangkan *gitu* ya, kalau misalnya kita tidak mengikuti pembangunan IKN tersebut.

Terakhir untuk Pak Dirjen Pembiayaan, Pak. Saya hanya mengingatkan untuk memagari, Pak, kalau apa kerjasama pemerintah dan badan usaha. *Nah*, yang *concern* saya ada selalu berkali-kali saya ingatkan badan usahanya, Pak ya, kadang-kadang badan usaha berimprovisasi mencari sumber pembiayaan lain misalnya, lalu mereka melaksanakan konsep *settlement* salah satunya *debt to equity*. Ya, *debt to equity*, hutang mereka jadi saham *gitu*, kita tidak tahu kemudian pemegang saham baru ini asing, Pak, ya atau punya kepentingan lain. *Nah*, maka saya kira saya sudah mendapat penjelasan dari Pak Dirjen, pokoknya saya harus mengingatkan pagari, Pak, kedaulatan bangsa ini ya, jangan konsep *settlement* pinjaman badan usaha kemudian kedaulatan bangsa kita dipertaruhkan, Pak, karena konsep *debt to equity* itu ternyata membuka peluang asing masuk, tapi pagarnya tidak *clear and clean*.

Itu saja. Sehat selalu Bapak-Bapak dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan untuk kita sehingga berhasil dalam menjalankan amanah.

Pimpinan, terima kasih.

*Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ya, kami persilakan Pak Ruslan, Pak Ruslan Daud, kemudian setelah itu Pak Fadholi siap-siap.

ANGGOTA:

Ketua, apa namanya...

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Ketua, Ketua...

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Eenggak apa-apa ulangi.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Ini ada permainan apa ini, Pak Tamanuri bisa dua kali ini.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Ya, samalah, kami kan bisa mengaminkan saja.

KETUA RAPAT:

Pak, Pak Tamanuri sudah kan, sudah bertanya?

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang berhadir yang kami hormati,

Bapak Dirjen dan seluruh para stafnya, teristimewa seluruh para Ka.Balai yang berhadir pada hari ini se-Indonesia secara khusus adalah Ka.Balai Aceh,

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Tepuk tangan, boleh tepuk tangan?

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Boleh dong, jangan tepuk tangan, amin gitu, tahu sendiri *dong*, amin. Amin.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Tapi Indonesia tetap maju.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Amin.

Jadi pertama gini Pak Dirjen, saya ingin menanyakan gini, proses IKN ini selepas dibahas wujudnya undang-undang dan bla-bla-bla, pernah juga kita dengar yang bahwa IKN ini tidak akan menggunakan uang APBN, itu awalnya, tetapi sekarang ini muncul hampir seluruh uang APBN di Komisi V ini adalah digunakan untuk IKN. Pertanyaannya adalah apa-apa saja yang memang anggaran daripada kementerian ini dianggarkan untuk APBN. Sebab di sini kita *enggak* nampak, *enggak* pernah kita bahas, dari A sampai ke Z *enggak* pernah kita bahas *nih*, tetapi yang kami tahu adalah di sini cuma me-stempel, me-stempel. Kalau memang itu memang juga diamini tidak ada masalah bagi kami, tetapi yang ada masalah dengan kami adalah kalau memang IKN diprioritaskan tetapi jangan usik yang punya adalah seluruh para Anggota, terutama Padat Karya. Apalagi Inpres-an ini yang kemarin 32 triliun ternyata yang terakomodir cuma adalah 14, itupun tersendat-sendat, ada yang sudah kita usul ternyata juga bisa terbuang dan sebagainya maka saya pikir coba dibuat penyesuaian supaya terakomodir aspirasi para Anggota terutama adalah kami-kami yang telah memohon, mendorong kesuksesan pembangunan di Dapil kami masing-masing.

Nah, yang kedua, Pak Dirjen, mengenai jalan tol di Provinsi Aceh, itu Tol Sumatera. *Nah*, tadi Bapak Dirjen telah sampaikan dari Sigli ke Banda Aceh dan juga dari Binjai ke Langsa, tetapi Langsa ini belum dimulai, belum dimulai. *Nah*, Langsa ke Pidie ini kapan kita mulai ini, Pak Dirjen. Sementara yang saya tahu pembebasan lahanpun ini belum. Jadi itu mohon Bapak Dirjen dibantu sesuai dengan judul yaitu Tol Sumatera bisa ter-*connect* antara Aceh dengan Sumut dan sebagainya.

Nah, yang ketiga adalah mengenai yang sudah kita usul beberapa tahun yang lalu. Kami mengapresiasi dan terima kasih Bapak Menteri, dan juga

Bapak Dirjen dan juga seluruh para staf yang telah mengakomodir itu Jalan Cut Meutia, jalan satu-satunya kita ke makam pahlawan nasional. *Alhamdulillah, InsyaAllah* sudah beberapa kali ini sudah terakomodir. Moga-moga tahun 2024 itu pun itu termasuk prioritas kami di Provinsi Aceh, kita tidak bicara Dapil tetapi Provinsi Aceh, sebab itu adalah jalan pahlawan nasional, itu Jalan Cut Meutia.

Nah, seterusnya adalah Pak Dirjen itu pasca banjir kemarin. Itu penggantian Jembatan Blang Mane, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Itu sudah nampak judul di Inpres kemarin, tetapi di saat itu sudah hilang dan sekarang muncul kembali. Dengan kemunculan ini kami mengapresiasi dan terima kasih, bahkan saya berkali-kali saya telepon Bapak Dirjen secara langsung kami mohon itu dapat diakomodir segera, disebabkan adalah itu sangat-sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab jalan itu terputus, apalagi ini ada jalan yang masuk dengan Inpres itu adalah jalan Krueng Simpo ke Blang Mane, tetapi tidak bisa nanti digunakan jalan itu dikarenakan jembatannya putus, jalannya *InsyaAllah, alhamdulillah* ini sudah lagi dikerjain. Maka dalam hal ini saya dapat berita itu tidak bisa, sebab itu skema-skema *multiyears*, tidak ada apa format yang diatur dalam *e-catalog*. Perlu saya mohon di sini bisa dorong di sini supaya dapat dipercepat tendernya, supaya ini bisa dijalankan akhir tahun 2023 ini dan juga akan dilanjutkan tahun 2024. Itu saya mohon Pak Dirjen sama-sama kita percepat termasuk ke P2JK-nya supaya dapat dipercepat secepat-cepat mungkin.

Nah, mungkin yang terakhir, Pak Dirjen. Aceh memang sangat luas, Pak Dirjen, jalan terbentang memang juga sangat luas dan juga sangat rawan, di saat adalah hujan-hujan seperti yang kita rasakan saat ini. Terutama adalah jalan tengah, jalan nasional, jalan yang di Bireuen-Takengon, itu selalu longsor *nih* Pak Dirjen, selalu, dan juga ini saya dapat berita ini lagi tengah hancur-hancuran. Maka dalam kesempatan ini sisihkanlah sedikit anggaran yang sangat-sangat kita prioritaskan, Pak Dirjen, dalam rangka memperbaiki jalan yang longsor di lintas pesisir dan juga tengah dan seluruh Provinsi Aceh supaya kalau memang itu bisa kita selamatkan, *InsyaAllah, alhamdulillah* juga bisa kita selamatkan uang negara.

Sekian dan terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Selanjutnya Pak Fadholi, kemudian setelah itu siap-siap Pak Tubagus.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Yang terhormat Bapak Herry Trisaputra, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Yang saya hormati Pak Hedy Rahadian, Dirjen Bina Marga dan Kementerian PUPR, dan Seluruh mitra yang hadir pada kesempatan hari ini,

Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan-Nya dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PUPR terutama yang hadir pada kesempatan hari ini, sampaikan terima kasih Pak Hedy sebagai Dirjen dan juga Pak juga Pak Herry yang telah memberikan dan mengabdikan kepada masyarakat. Memang perencanaan sudah disusun sedemikian rupa dan tentu ini berlandaskan satu kemaslahatan umat.

Saya hanya sekedar menyampaikan beberapa hal: yang pertama tolong untuk bisa di apa cermati, Pak, mungkin menjadi satu bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah wilayah Jawa Tengah ini kan cukup luas, Pak, 35 kabupaten/kota. *Nah*, Bapak udah bagus *tuh* menempatkan Ka.Balai yang cukup tahan uji dan tahan banting ini, luar biasa ini, dan juga tahan apalagi itu ya.

Nah, harapan saya, Pak ini kalau yang urusan jalan nasional, Pembangunan IKN dan sebagainya ini *monggo* aja kita baik, tetapi saya minta harus ada kemauan yang sangat keras untuk bisa membangun wilayah pedesaan karena kemakmuran desa ini bagian dari kemajuan Indonesia dan tentu ini akan mendukung secara keseluruhan. Jadi dasarnya adalah manfaat, kalau di desanya makmur, Pak, maka Indonesia juga akan makmur, ini Pak.

Nah, salah satu sarana untuk bisa memakmurkan desa dalam rangka untuk bisa meningkatkan akses ekonomi dan sebagainya ini, ternyata masih banyak sekali infrastruktur di desa terutama jalan penghubung desa maupun penghubung antar kecamatan yang oleh kabupaten, ini tidak mampu untuk bisa membiayai. Karena itu, tidak mampu membiayai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan, ini kan wewenang penyelenggaraan di pada Pasal 16 ayat (3) itu:” *wewenang penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan pembinaan pembangunan dan pengawasan jalan kabupaten/kota*”. *Nah*, ini secara spesifik ini ada di Pasal 4:”*Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota*”. Jadikan saya pikir ini sudah satu hal yang sangat jelas bahwa sekarang ini, bahkan bukan sekedar itu, banyak dari beberapa pemerintah kabupaten/kota juga sudah mengajukan dan meminta untuk itu.

Nah, mohon agar dalam rangka kita juga ikut memakmurkan desa dalam rangka membangun ini, perlu ada satu alokasi yang jelas, proporsional, berapa alokasi yang akan digunakan untuk pembangunan jalan desa sebagaimana amanah Undang-Undang ini, dengan dikonfirmasi pada pembangunan yang lainnya. Kalau ini jelas maka kita pun juga dalam rangka sosialisasi di masyarakat nanti jangan sampai kita setelah sosialisasi, tetapi kemudian tidak bisa realisasi.

Maka saya mohon betul agar Pak Dirjen nanti bisa memberikan apa namanya alokasi ini, karena ini pas saatnya adalah *timing*-nya untuk bisa pembahasan anggaran. Karena pada saat ini pas pembahasan anggaran dan merencanakan yang bagus, saya pikir ini bisa dimasukkan sejak awal sehingga kita juga tidak ragu-ragu dan tidak akan menyalahi aturan, itu yang belum.

Dan yang kedua, Pak, kaitannya termasuk masalah jembatan gantung. Ini juga ada beberapa hal tapi terutama ini di samping masalah teknis tetapi juga masalah banyak pindah itu kadang-kadang tidak, tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan pemerintah kabupatennya, sehingga responnya, sehingga mungkin bisa kurang atau sebagainya ini, ini *space*-nya harus pindah, pindah. *Nah*, ini bagaimana solusi ini, karena ketika kemudian dikonsultasikan dengan kepala daerah mungkin di situ ada yang tidak sependapat sehingga mesti harus pindah lokasi dan sebagainya. Ini jadi bagian yang sangat penting, Pak, untuk bisa kita lakukan. Mungkin *enggak* kemudian kalau itu tidak harus jembatan gantung tetapi yang fungsinya itu sama. Jadi, karena jembatan gantung ini kan apa namanya luasnya, apa panjangnya juga harus sudah ditentukan ini, tetapi kalau kemudian hanya panjang yang 20 meter, 15 meter, tetapi fungsinya sama bisa *enggak* itu dilakukan, sehingga kita tidak terpaku hanya pada program jembatan gantung saja.

Jadi, itu dua hal yang saya sampaikan, tapi pada yang lainnya kami ucapkan terima kasih sama Pak Dirjen dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, pembangunan infrastruktur jalan sudah mulai terasa di wilayah Jawa Tengah, dan Dapil saya ini masih termasuk wilayah Indonesia, Pak, jadi terima kasih, Pak.

Kemudian kepada Pak Dirjen Pembiayaan. Ini ada Kementerian PUPR mengusulkan alokasi FLPP tahun 2024 sebanyak 220.000 unit. *Nah*, usulan ini dalam bentuk unit apa sudah *by name*, Pak? Artinya sudah nama orangnya atau baru *by name*. *Nah*, kemudian kalau itu, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keringanan ini? Ini saya pikir, saya usulkan agar ini ada sosialisasi, ini sangat penting sekali, ini program pemerintah yang begitu strategis, tetapi kan penerimanya itu tidak pernah tahu, *enggak* pernah tahu mereka. Ada baiknya kalau ini dilakukan sosialisasi di beberapa daerah bahwa ada program yang semacam ini sehingga orang yang memang betul-betul dia berpenghasilan rendah ini akan mendapatkan bantuan ini. Kalau ini sifatnya hanya kemudian kerja sama hanya dengan bank, dengan pengembang dan sebagainya, ini kan kemudian siapa yang mau dipilih kan, siapa yang menentukan ini bisa dapat apa tidak dapatnya, apakah dari pengembangan atau gimana ini. Ini saya pikir ini usulan yang sangat bagus, program yang

sangat bagus, tetapi harus ada transparansi siapa orang-nya, yang disetujui adalah 166.000 unit, ini apakah unitnya? Apakah orangnya sudah *by name*-nya sudah ada? kan itu. Kalau itu unitnya, siapa nanti yang akan mengisi, dan kemudian ini disebar di mana saja, secara spesifik di Dapil saya ada apa tidak, ini kan persoalannya semacam itu. Karena saya bisa membantu program Bapak di wilayah saya *gitu loh*, tetapi kalau ini tidak pernah ada, kita juga *enggak* bisa.

Tolong ini betul-betul nanti dilakukan saya minta agar ini, apakah juga itu ada. Saya pikir juga bisa dibantu oleh, tapi sifatnya membantu di semua teman-teman sifatnya membantu untuk mendistribusikan program ini di wilayah Dapilnya masing-masing, ini bagian yang sangat penting untuk Bapak lakukan. Jadi perlu ada satu komunikasi yang, ini yang baru FLPP saja, mungkin dari yang lainnya juga ada SSB dan sebagainya, karena ini banyak sekali yang dilakukan, karena ini adalah program-program yang menggunakan dana pemerintah, lain persoalannya kalau itu yang menggunakan dari investasi, ini akan berbeda.

Dan yang kedua, Pak, ini kebetulan kan ada di wilayah saya terkait dengan Bendungan Bodri. *Nah*, ini sejauhmana perkembangannya dan bagaimana rencananya, mungkin kalau Bapak tidak keberatan baik secara, kalau *toh* tidak bisa dijelaskan karena panjang di di rapat ini, setidaknya kami akan meminta info yang lebih jauh terkait dengan Bendungan Bodri karena itu ada, saya tahu persis Singorojo dan sebagainya itu, wilayah itu *gimana*, saya paham itu sehingga kalau mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di dalam rapat ini, mungkin karena terlalu lama atau terlalu panjang, karena nanti juga akan rapat yang lain, saya minta waktu untuk bisa menanyakan persoalan Bendungan Bodri yang kaitannya karena itu di wilayah saya.

Yang lain-lain cukup bagus dan semuanya saya sampaikan bagus. Mudah-mudahan semua dari jasa Bapak ini menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah SWT. *Aamin Allahumma Aamin*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Pak Tubagus, kemudian terakhir Pak Syahrul.

F-P. GOLKAR (H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V, serta
Yang kami hormati Pak Dirjen Pak Hedy dan Pak Herry beserta seluruh
jajaran,**

Pertama tentu apa yang menjadikan agenda dan program selama ini oleh Pak Menteri PUPR melalui Pak Dirjen Bina Marga untuk Banten, kami menyampaikan terima kasih, hampir setiap tahun tentu alokasi anggaran untuk jalan nasional cukup luar biasa dan tentu ke depan kami sangat membutuhkan berkelanjutan. Karena Dapil kami, Banten ada zona industri dan pariwisata di sepanjang pantai yang cukup panjang dan itu membutuhkan, masih membutuhkan sentuhan-sentuhan untuk pembangunan jalan. Mudah-mudahan selama ini tentu sudah sedang berjalan dan kami berharap di tahun 2024 untuk jalur penunjang zona industri Tangerang-Serang kami untuk dapat dilanjutkan Kembali. Dan kemudian juga kami berharap untuk wilayah industri yang Serdang, Bojonegara, dan kemudian Merak, karena itu padat industri dan kemudian padat masyarakat pun, ini agar dapat teranggarkan di tahun 2024. Dan kemudian ada zona untuk industri juga sama di jalur untuk Cilegon, kemudian ke Pasauran, kemudian ke Pandeglang salah satunya penunjang di pesisir pantai untuk wisata agar dapat ditindaklanjuti kembali untuk tahun 2024.

Dan kemudian Pak Dirjen apa yang menjadikan program Pak Menteri terkait Inpres tahun ini sudah bergulir, *alhamdulillah*, itu. Tahun ini sudah berjalan ada beberapa lokasi di Cilegon, Jalan Aat Rusli, *alhamdulillah* itu akses untuk industri dan pariwisata. Pada waktu itu kota Cilegon belum mampu untuk membangun dan saat ini *alhamdulillah* sudah berjalan dan mudah-mudahan bisa dapat tuntas selesai sehingga bisa mengakomodir akses untuk zona industri dan pariwisata untuk Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, dan tentu tahun ini pun ada di kota Serang. Dan mudah-mudahan kami berharap tentu untuk tahun 2024 terkait Inpres, kami ada mengusulkan untuk di wilayah Kota Serang, ada kalau jalan kota Serang, mudah-mudahan bisa dapat dimasukkan untuk terkait jembatan *flyover*. Tujuannya yaitu wilayah di Kota Serang untuk Unyur di situ terjadi kemacetan, ketika ada *flyover*, hanya kecil *flyover* jalannya itu hanya 8 meter, mudah-mudahan bisa dimasukkan ke Inpres *gitu* kan sehingga bisa untuk melerai kemacetan di wilayah kota Serang-Unyur, sehingga apa yang menjadikan masalah di Kota Serang terkait kemacetan dapat terurai.

Kemudian juga berikutnya, berikutnya ada untuk Inpres jembatan di Mekarsari di wilayah kabupaten, itu juga sama aksesnya yaitu antara perbatasan Kabupaten Serang dan Tangerang. Mudah-mudahan selama ini sudah hampir 25 tahun jalan jembatan itu kondisinya apa, jembatan yang kondisinya kayu seperti itu mudah-mudahan bisa dapat teranggarkan juga untuk di Inpres sehingga akses, akses masyarakat lebih baik lagi untuk akses antar Kabupaten Serang melalui ke Kabupaten Tangerang. Dan tentu Pak Dirjen, perlu kami sampaikan juga, kami selalu dari Kota Serang ke Jakarta di sini melalui Tol Jakarta-Serang-Jakarta ada di ruas kilometer 58 ya kalau tidak salah, itu sebelum hari raya itu sudah ada perbaikan. *Nah*, kemudian jalan yang bergelombang, yang rusak saat ini sudah rusak kembali *gitu* kan. *Nah*, ini apakah *spec* perbaikan jalan tersebut seperti apa *gitu*, hanya beberapa bulan belum sampai satu tahun sudah bergelombang sehingga truk-truk yang lewat pun yang tadinya sebelah kiri, karena jalannya bergelombang ke arah sebelah kanan sehingga timbul di sana padat dan macet. Ini harapan kami tentunya di

PJT jalan tol di semua akses jalan tol agar apa yang mereka bangun ini bisa dapat dimanfaatkan lebih lama lagi dan lebih kuat lagi.

Dan itu saja mungkin hal yang dapat kami sampaikan, lebih lengkapnya sudah kami sampaikan aspirasi dan usulan dari kami untuk Banten tentunya waktu RDP dengan Pak Menteri mudah-mudahan bisa dapat ditindaklanjuti untuk dianggarkan di tahun 2024.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INTERUPSI F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mungkin nanti setelah Pak Syahrul ya?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Mau serahkan.

KETUA RAPAT:

Oh silakan-silakan, menyerahkan silakan, ya silakan. Apa ada lagi? Silakan Pak Syahrul.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Dirjen Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur,
Seluruh staf dan karyawan Kementerian PUPR,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama saya langsung saja ke Dapil, Pak Dirjen, khususnya Dirjen Bina Marga. Secara umum *alhamdulillah* jalan nasional di Riau cukup bagus karena ada proyek *multiyears* ya di banyak ruas. Hanya saja berharap *nih*, Pak, dalam preservasi *multiyears* itu kemarin banyak juga pembangunan bahu jalan ya untuk memperlebar sedikit jalan-jalan yang ada di Riau, tetapi ini kayaknya belum keseluruhan, mudah-mudahan ini bisa dituntaskan dalam waktu dekat karena *traffic* Pekanbaru-Sumbar, misalnya itu, sangat-sangat padat sekali, Pak. Jadi membangun bahu jalannya bisa diselesaikan seluruh ruas ya.

Kemudian ada titik yang saya lihat selalu rusak, Pak, khususnya di Bangkinang di M Yamin itu sebelum kota Bangkinang itu rusak terus, diperbaiki rusak lagi, diperbaiki rusak lagi, kayaknya memang perlu penanganan dalam bentuk cor beton, Pak, karena setahu saya itu lebih dari 5 kali itu diperbaiki. Daripada memperbaiki terus menerus lebih baik ya cor beton.

Kemudian saya sebagaimana hanya mengingatkan kembali kemarin sudah direspon oleh Pak Dirjen, kelanjutan pembangunan jalur apa namanya dua jalur Jalan Pekanbaru-Bangkinang pada titik Sungai Pinang dan Bingkuang. *Nah*, ini tak panjang, Pak, hanya sekitar 3 kilo lebih ya itu sebetulnya perencanaannya dulu itu tertinggal. Jadi kalau ini sampai Bangkinang eh Danau Bingkuang berarti jalan yang dulu sudah dibebaskan oleh pemerintah kabupaten dan sudah ditimbun oleh provinsi sudah tuntas, Pak. Ini sebagaimana yang saya sampaikan salah satu janji politik ini, karena akhir tahun mudah-mudahan bisa selesai 2024, Pak.

Kemudian *alhamdulillah*, saya melihat juga kegiatan kita untuk membuat apa namanya jembatan, jembatan alternatif, istilahnya *double*, duplikasi, iya, duplikasi jembatan, bagus sekali, Pak. Ini setidaknya bisa mengurangi kemacetan, karena ya jembatan-jembatan itu tua. Hanya saja ada dua jembatan yang sangat panjang sekali dan sangat vital sekali dan sangat tua sekali yang mudah-mudahan ini menjadi program kita di 2024 apa bisa dilaksanakan yaitu Jembatan Rantau Berangin, Pak, ini sangat tua sekali dan Jembatan Teratak Buluh ya, Rantau Berangin itu arah ke Sumbar, Teratak Buluh itu arah ke Teluk Kuantan, Pekanbaru-Teluk Kuantan.

Kemudian untuk jalan daerah *alhamdulillah*, saya sudah dapat informasi kemarin sudah mulai akan dilaksanakan, ada tahap pertama, kemarin ada empat, kalau tidak salah di tahap kedua ini dari yang di Dapil saya, *alhamdulillah* yang kita usulkan yaitu Jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti. *Nah*, untuk Bapak ketahui saya kebetulan ketemu kemarin dengan Menteri *eh* dengan mantan Gubernur Riau, ini jalan yang sangat vital sekali dan ini memang direncanakan pembangunan jalan pesisir begitu, dan saya sampai kepada ujung paling ujung yaitu di daerah Inhil, itu daerah yang tidak masuk mobil untuk arah ke sana sampai 12 jam. Kalau jalan ini bisa kita tuntaskan, ini bisa memutus mata rantai mereka untuk memasok dan mengeluarkan hasil pertanian mereka. Mereka tidak kekurangan hasil bumi sebetulnya, hasil pertanian, tapi permasalahan terbesar mereka adalah jalan.

Nah, hanya saja memang kita dapat tahun ini hanya 5 kilo, Pak, 5 kilo. *Nah*, kalau bisa ini bisa lebih diprioritaskan, Pak. Apalagi Bapak ketahui bahwasannya Riau adalah provinsi jalan provinsi yang paling rusak, ini kan aneh ini. Riau yang katanya negeri kaya tetapi adalah jalan provinsi yang paling rusak di Indonesia itu adalah Riau. *Nah*, kerusakan itu disebabkan sebetulnya karena hasil bumi yang dikeluarkan melalui mobil CPO, mobil batubara, truk-truk yang memang merusak tidak sesuai tonasenya itu dengan status jalannya. Memang di satu sisi kita harus menertibkan, tapi di sisi lain juga perlu ada perhatiannya pemerintah. *Alhamdulillah*, sekarang melalui Undang-Undang Jalan, melalui Inpres Jalan Daerah ini ada bantuan pemerintah, tapi mohon *nih*,

Pak, sesuai dengan kontribusi Riau ke untuk devisa negara agar di Riau lebih diperhatikan kuotanya agar lebih banyak, kita berharap apalagi yang Simpang Bunut-Teluk Meranti ini di sini ada tempat wisata yang luar biasa yaitu Bono, yaitu dua kejadian yang luar biasa di dunia ini yang hanya ada di Riau, salah satunya yang paling besar yaitu di Teluk Meranti. *Nah*, arah ke sana kami sudah berkunjung, Komisi V sudah berkunjung ke sana kemarin bersama Pimpinan dan Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan, ini potensi luar biasa, Pak. Ini kalau ada kontribusi dari kementerian untuk memperbaiki jalan ini, *Insyallah* kita bisa akan menarik wisatawan untuk berkunjung dalam momen-momen Bono pada setiap tahunnya. Kemudian Lipat Kain-Lubuk Agung begitu juga masih ada 50 kilometer, Pak, ini baru kita angsur 5 kilo dan ada beberapa yang saya usulkan kemarin belum masuk di 2023, mudah-mudahan bisa masuk pada 2024 nanti.

Kemudian selanjutnya adalah *flyover*, Pak, *flyover* Kubang, Kubang-Garuda Sakti. *Nah*, ini saya banyak masukkan dari masyarakat di Riau agar dibangun *flyover* di sini, mohon saya pernah diskusi dengan Ka.Balai dengan pihak Pemprov juga terkait pembebasan lahan agar ini bisa ditindaklanjuti, kalau bisa ini sudah ada gerakannya di 2024 nanti.

Barangkali itu yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan segala upaya kita dalam pembangunan daerah, pembangunan Indonesia ini menjadi amal saleh bagi kita dan *oh* ya untuk Dirjen apa namanya Pembiayaan Infrastruktur, mudah-mudahan bisa dilanjutkan Tol Pekanbaru-Rengat-nya, Pak, dan Rengat-Jambi bisa dapat pembiayaan, karena yang sekarang itu dari Bangkinang ke apa namanya kelanjutan Bangkinang-Pekanbaru-nya, ke Dumai-nya, *alhamdulillah* sudah mulai dikerjakan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Dari Anggota sudah selesai. Sekarang dari meja Pimpinan, Pak Roberth silakan Pak Roberth.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Dirjen Bina Marga dan seluruh jajaran, Dirjen Pembiayaan
Infrastruktur serta seluruh jajaran,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, saya ingin ingatkan kita semua, saya melihat dari tadi rapat pada pagi hingga siang ini seperti kita rapat pengawasan. Jadi masih

suasananya seperti itu. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh kita yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, acaranya satu, acaranya satu, membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024, membahas alokasi anggarannya, bukan kita bahas anggaran, ya kan. Alokasi penempatannya ya maka kenapa itu hari ini kita bahas itu, karena sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan rapat yang telah kita lakukan dengan menteri iya kan, kita memberikan usulan-usulan maka di akhir daripada kesimpulan itu tercantum bersama, minta, Komisi V minta kepada pemerintah, menteri, untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan, masukan Komisi V DPR RI.

Jadi, Pak Dirjen, semua yang hadir apakah itu sudah terjawab semuanya di sini, ya? dan tadi saya melihat teman-teman masukin lagi usulan, apakah itu bisa nanti terjawab? ada perubahan untuk bisa slot yang ada untuk memasukkan usulan-usulan yang masih diberikan. Jadi kalau itu tidak ada, ya mohon maaf, saya dari kemarin mimpin itu yang saya sampaikan, kami tolak dulu harusnya. Kalau kami program-program usulan-usulan yang sudah kami sampaikan itu bukan cuman hari ini, tetapi sudah dari beberapa bulan, malah ada yang dari tahun lalu yang belum terakomodir. Bagaimana dengan usulan-usulan itu ya, dan tidak layak kita bahas seperti ini ya. Kalau saya lihat bahan-bahan mentah semua bahan-bahan yang diberikan, seperti kita lihat rumah ini keluarga ini butuh makan anggarannya sekian, kita *enggak* tahu di dalam rumah itu yang makan berapa orang, ini makannya apa saja ya kan, kita tidak tahu.

Jadi, teman-teman semua, saya ingin untuk kita lebih lagi tajam di dalam setiap rapat-rapat agar tidak seperti ini terus setiap kali kita rapat. Rutinitas kita rapat seperti ini, akhirnya nanti memahami selesai ya kan, bahasa di bawah lagi memperhatikan lagi usulan, memperhatikan itu kapan ada di dalam, saatnya ini kita bahas alokasi ini kita lihat ya, ya dan itu harus kita lakukan itu bukan pada saat ini saja ya kan. Mitra tolong juga berikan kami ya, kapan itu untuk menampung aspirasi itu, untuk duduk bersama dengan Dewan. Jangan cuman pada saat ini saja menyetujui kami duduk berbicara, di mana tempat kami ada di dalam ini, kami bicara konstitusi, Undang-Undang, yang melekat kepada kami Anggota Dewan, ya. Ini bukan kami ngada-ngadain, saya cuma ingatkan kita, mohon maaf ya kan, agar rapat kita setiap kali kita bahas ini betul-betul representasi kita sebagai perwakilan rakyat kita ini ya kan. Dari Komisi I sampai yang lain semua berjalan sesuai melakukan konsinyering itu yang benar, mekanisme itu yang harus dilakukan dalam pembahasan anggaran, alokasi anggaran, bukan seperti ini, bukan seperti ini terus ya.

Jadi, saya cuma ingatkan kita semua ya, tapi kita sudah berjalan, ini kesepakatan kita, kita menunjukkan bagaimana kita, ketidakmampuan kita semua ya, ya maka selalu kita disuguhi oleh bahan yang seperti ini terus ya kan, bahan yang tidak, tidak seperti yang harus semestinya yang harus kita lakukan menurut saya ya. Baik, saya kira itu saya ingatkan kita saja soal itu.

Selanjutnya, saya ingin tanya kepada Pak Dirjen terutama Dirjen Bina Marga dan teman-teman yang lain. Apakah di dalam rapat saat ini kami masih bisa ada slot untuk usulan dari kami? Ya, karena di dalam undang-undang ini aturan juga bahwa usulan DPR itu bisa merubah APBN, dapat merubah APBN ya kan, usulan DPR, representasi masyarakat, representasi daerah bisa merubah itu, jadi tidak satu arah kami ya, ya. Kemarin kami sudah saya pimpin Dirjen Darat, kami sampaikan masih ada, kalau masih ada kami akan memahami menyetujui untuk bisa melakukan itu, kami berikan, tapi kami akan rapat lagi, kami akan minta pertanggungjawaban di mana yang kemarin kami sampaikan ya, gitu. Jadi, Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan ya, saya ingatkan kita semua untuk itu.

Saya kembali melihat untuk Dapil. Saya tidak terlalu banyak bicara seperti teman-teman yang lain, itu menurut saya di pengawasan, tapi saya lebih fokus untuk alokasi anggaran maka saya ingin mempertanyakan untuk alokasi anggaran, terutama Bina Marga. Saya reses ke daerah saya, mungkin Kepala Balainya ada dari Papua, Kepala Balai Papua, ada di atas. Itu para pengusaha orang asli Papua itu bertemu dengan saya dan mereka bertemu dengan Kepala Balai juga, yang sampai Kepala Balai itu diancam-ancam itu oleh pengusaha anak-anak Papua, ya.

Mohon agar pemerintah pusat ikut juga bisa membantu ya pengusaha-pengusaha anak Papua di bawah, ini pengusaha lemah ini karena selalu proyek yang diberikan oleh pemerintah khususnya kementerian itu nilainya besar, tidak mungkin mereka bisa masuk di situ, tidak mungkin Pak Hedy Rahadian, tidak dapat. Tolong berikan slot itu ya yang nilainya 1-2 miliar ini, tolong berikan paket itu ya minimal 20-30 paketlah diberikan, untuk Kepala Balai itu bisa menangani itu ya, kasihan Pak, Bapak di ini, itu diteror itu Kepala-Kepala Balai, Bapak-Bapak diteror, kasihan. Saya diketemuin mereka minta untuk saya usul ganti Kepala Balai, kasihan, saya bilang *enggak* bisa, dia tidak punya hak itu, dia cuma melaksanakan, kebijakan itu semua di atas, kasihan.

Jadi tolong Pak Rahadian, saya minta karena kita bicara alokasi di sini, saya minta ini dialokasikan ya, tercatat ini Pak, ini rapat kita resmi sebagai unsur Pimpinan, saya minta, tolong sampaikan Pak Menteri, ini resmi mereka kasih surat ke saya, resmi juga mereka usul melalui Ka.Balai ya, beliau juga dapat surat itu ya, kalau nanti Bapak minta saya kasih. Tapi pada prinsipnya ini pengusaha lemah anak-anak Papua, pengusaha kecil yang selalu dibuat aturan-aturan yang mereka sangat susah untuk ikut kalau mereka bisa masuk untuk proyek-proyek yang nilainya sudah di atas itu ya kan dan sangat memberatkan mereka karena mereka ikut itu ada aturan yang menyiapkan ini itu, itu dengan biaya, Pak. Bagaimana kalau dia tidak lolos? dia tidak dapat, dia sudah rugi puluhan juta, dari mana dia bisa mendapat itu kembali. Tolong diperhatikan itu agar diberikan slot yang memang ini untuk bisa mereka itu ya, representasi menteri, kementerian ada di sana, itu bisa menjadi wadah untuk mereka di sana bisa melakukan itu, ya Pak Direktur, Pak Wulan ya, saya minta supaya ini harus, karena kita bicara alokasi.

Jadi poin ini saya minta, harus ada alokasi untuk itu Pak Dirjen ya, saya fokusnya ke sana iya kan. Untuk kalau alokasi yang lain, saya lihat sudah cukup baik, Inpres jalan, kita sudah cukup bagus ya, walaupun ada beberapa yang usulan kami belum masuk, kami masih bisa menerima itu, tapi yang ingin kami usul betul-betul saya minta. Saya tidak bicara banyak lagi tentang yang lain-lain karena ini saya didatangi oleh mereka, puluhan orang, malah ratusan orang kalau di seluruh Papua, tapi pengurus pusat mereka semua hadir di tempat saya, berbicara nangis-nangis mereka, bagaimana ya kan. Dan itu kalau Pak Menteri melalui Pak Dirjen tidak bisa menangani itu kasihan saya, sama saja ngadu kami, karena mereka melihat ini yang jadi Kepala Balai orang Papua *kok* begini katanya, Pak ganti dia, saya bilang siapa saja ganti, sama juga, kamu mau ganti siapa iya kan, *enggak* bisa, dulu iya, kamu dibina karena sistemnya masih ini, sekarang memang aturannya begini. Ya, kenapa dulu? ya dulu itu sistemnya beda sama sekarang ya kan. *Nah*, untuk itu harus dibuat lagi diskresi khusus untuk buat itu supaya untuk menangani itu, tidak lagi ribut.

Bapak tahu Papua mempunyai satu payung besar Otonomi Khusus, dia ada masalah besar yang ada di situ pemerintah memberikan diskresi itu, maka seluruh kementerian, seluruh ini juga harus ada diskresi khusus untuk memayungi ada di dalam yang namanya Otonomi Khusus ya. Sebagai program Anggota DPR dari sana, saya selalu bicara soal itu, kenapa? itu menjaga keutuhan negara kita ya. Kalau sampai semua kecewa, semua berteriaknya, Pak, kasihan Presiden yang menjadi simbol negara itu dihujat-hujat, dihujat-hujat.

Jadi, saya kira itu saja Pimpinan yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.
Saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih, Pak Roberth.

Sebelum Pak Dirjen memberikan tanggapan jawabannya, ada sedikit dari saya Pak Dirjen.

Yang pertama terkait dengan anggaran. Kalau kita melihat di sini, ini anggaran kan turun ini ya dari Dirjen Bina Marga turun sebesar 1,17 triliun, kemudian Dirjen Pembiayaan Infrastruktur juga turun sebesar 159,49 miliar. Saya kira sangat kita sayangkan karena kita tahu bahwasannya kedua-dua direktorat ini sangat merupakan salah satu direktorat yang sangat vital untuk dalam pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada saat ini, program-program itu bisa terealisasi dengan baik.

Yang kedua tentang program yang ada di Sumatera Barat, Pak Dirjen. Ini Pak Balai, Pak Tabrani, tadi saya jumpa hadir di sini Pak Tabrani ya. Di sini saya melihat di *slide* 28 ini, target kemantapan jalan tol anggaran 2024 sebesar 92,45%, program infrastruktur konektivitas ada 6 *item*, kemudian preservasi

jalan dan jembatan nasional, pemeliharaan rutin jalan sebesar, berapa *nih*, 1.423, 4,2 kilometer. Mudah-mudahan ini bisa ditambah, Pak, anggarannya untuk Sumatera Barat terutama untuk khusus jalan-jalan nasional.

Kemudian yang ketiga mengenai Inpres Jalan, Pak. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, kami tentu berterima kasih atas program Inpres ini karena banyak apa kabupaten/kota yang terbantu, tetapi memang ada beberapa persoalan yang pertama tadi dikatakan oleh rekan-rekan mengenai usulan. Usulan itu kan usulan dari kami, tetapi harus dikoneksi, dikoneksikan dengan usulan dari Pemda. *Nah, alhamdulillah* kalau kita, saya, Sumatera Barat tidak ada persoalan dengan usulan dengan kabupaten/kota, tetapi usulan-usulan saya masuk juga usulan Pemda itu banyak sekali, Pak, mungkin Pak Tabrani tahu itu. Dari sekian banyak yang kami usulkan antara usulan saya dengan Pemda itu hanya sekian persen sedikit sekali yang terealisasi dengan alasan anggaran yang terbatas. Maka dari itu, saya berharap agar anggaran untuk Inpres Jalan dan Jembatan ini bisa ditingkatkan lagi untuk tahun 2024. Di sini juga ada Pak Syarif, Wakil Ketua Badan Anggaran tadi beliau hadir, nanti kita bisa berkoordinasi, karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan rata-rata pemerintah daerah itu berterima kasih sekali dengan adanya Inpres Jalan dan Jembatan ini.

Kemudian yang ketiga, ini Pak. Ini ada aspirasi ini Pak, aspirasi ada satu desa di tempat saya itu Satu Nagari, di sana itu Nagari Desa itu berbatasan langsung dengan satu desa di Kabupaten Kampar ya, Pak Syahrul, ya? Ini ada hubungannya dengan Pak Syahrul juga *nih*, Pak. Jadi kepala desanya itu dan masyarakat berjumpa dengan saya waktu kunjungan saya ke Riau, saya Pimpin, Pak Syahrul. Posisi jembatan itu, itu masih di Kabupaten Lima Puluh Kota dan jembatan itu dulu pernah dibangun, mobil bisa lewat, jembatan besi, tetapi masyarakat yang menggunakan itu lebih banyak masyarakat di Kabupaten Kampar, satu desa dengan Pak Syahrul. *Nah*, karena posisinya di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kepala desanya minta tolong kepada saya, kemudian mereka sudah masukkan surat ke bupati, bupati sudah ada, mungkin nanti akan saya kasih, saya kasih proposalnya.

Maksud saya begini Pak, karena ini desa ini bermanfaat bagi dua kabupaten dan dua provinsi, mungkin suatu waktu bisa menjadi perhatian, perhatian bagi Pak Dirjen, karena dari bincang-bincang saya dengan kepala desanya, beliau mengatakan kami ini seperti dianaktirikan oleh Kabupaten Kampar ya, karena di ujung, ini Dapilnya Pak Syahrul *nih* Pak, saya bilang kenapa tidak pindah saja ke Kabupaten Lima Puluh Kota, karena memang aturannya itu katanya itu sangat rumit. Artinya begini, Pak, inilah salah satu persoalan-persoalan yang ada di perbatasan-perbatasan tadi karena memang yang lebih banyak menggunakan masyarakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tetapi lokasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat. Saya kira ini bisa menjadi perhatian, Pak Dirjen. Mudah-mudahan, mungkin Pak Syahrul nanti akan, akan memberikan tanggapannya juga atau mungkin proposalnya, karena Dapil beliau juga ini, Pak.

Kemudian yang terakhir yang, yang ketiga. Begini, Pak Dirjen, kami ini kan di Komisi V ini banyak didatangi oleh kepala daerah, bukan hanya dari Dapil kami saja, bahkan dari daerah-daerah lain, baik itu bupati, walikota, ataupun gubernurnya, karena memang seperti teman-teman katakan tadi, kan kita ini DPR RI, tentu yang pertama merupakan kewajiban kita memperjuangkan Dapil, tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan jika ada aspirasi dari daerah-daerah lain, jika ada kepala dinas atau kepala daerah yang ingin berjumpa dengan kita, tidak mungkin kita abaikan. Kalau kita abaikan ya Bapak kan DPR RI, Pak, Tupoksi Bapak kan seluruh Indonesia. *Nah*, pada kesempatan ini, di sini hadir tidak, Pak, Kepala Balai Jambi? hadir Pak ya, salam kenal Pak ya, sekarang ini kan tidak ada wakil dari Komisi V, dulu ada Pak Bakri, kebetulan Pak Kepala Balai, ada Bupati Kepala Daerah Batanghari ketemu dengan saya, Pak, jumpa dengan saya, beliau mengatakan Pak Iqbal bagaimana caranya kami bisa juga mendapatkan program Inpres Jalan dan Jembatan, karena kami, Pak Bakri sudah tidak di sana lagi. *Nah*, artinya saya katakan coba nanti saya bicara dengan Pak Dirjen. *Nah*, kebetulan Pak Kepala Balai hadir di sini, ini tolong bisa dibantu, Pak, aspirasi dari Kabupaten Batanghari, dan mungkin juga bukan hanya Kabupaten Batanghari saja, kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi Pak Kepala Balai, mungkin Pak Kepala Balai sudah pernah komunikasi ya dengan Bupati Batanghari ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari Pak Kepala Balai. Saya kira itu saja Pak Dirjen yang saya sampaikan.

Untuk Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, saya kira dengan adanya penurunan anggaran tetap semangat. Mudah-mudahan Program Pembiayaan tetap terus dilanjutkan. Saya kira itu saja dari saya, dan apakah ada tambahan lain atau interupsi? Cukup ya, cukup?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya minta izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya lagi rapat di partai, jadi saya mohon izin.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan, oke, oke Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke, makasih ya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang pertama Pak Dirjen Bina Marga untuk memberi tanggapannya kemudian dilanjutkan ke Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Yang pertama mungkin saya ingin merespon tadi pertanyaan dari Ibu Novita dan juga teman-teman yang lain mengenal JD, Pak. Jadi JD itu sesuai dengan ketentuan dalam kepresnya bahwa itu bisa *top down* dari Presiden termasuk aspirasi Anggota DPR, tapi juga memungkinkan memang ada usulan-usulan dari daerah. *Nah*, usulan daerah, dari daerah itu tidak perlu apa namanya perlu referensi dari Anggota DPR, tapi usulan siapapun itu, baik itu Pimpinan, Anggota DPR, maupun usulan daerahnya sendiri itu memang harus ada apa semacam pernyataan bahwa daerah bersedia menerima BMN ini, ini yang penting, jadi harus ada berita acara serah terima BMN setelah diselesaikan. Jadi itu sebabnya kenapa kita seperti selalu melibatkan daerah. Sebenarnya melibatkan daerah itu adalah agar dipastikan bahwa setelah pekerjaan ini selesai, ini tidak menjadi barang yang tidak bertuan *gitu*, karena itu sebenarnya mestinya diberikan kepada daerah. *Nah*, jadi saran kami kalau Bapak dan Ibu sekalian punya masalah dengan daerah dalam hal ini, nanti koordinasikan saja ke kami kita akan cari solusi terbaiknya, intinya begitu ya.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Ya, tadi kan Pak Dirjen bilang bisa dari atas *top down* atau Pemda atau kita. *Lah*, kita ini lewat Pemda juga *nginput*-nya atau bisa lewat ke Ka.Balai gitu, Pak? Itu teknisnya.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi begini, nanti Ka.Balai akan memfasilitasi agar Pemda meng-*input*-kan juga, jadi saya pakai bahasa begitu, Bu. Ka.Balai nanti Ka.Balai semua *nih* mendengarkan saya membantu teman-teman Anggota DPR untuk memastikan Pemda meng-*input*-kannya. Karena kalau Ibu meminta bantuan Pemda kan tadi ada masalah psikologis-psikologis tertentu mungkin ya. Jadi nanti biar Balai aja yang ambil alih agar itu di-*input*-kan oleh Pemdanya. Kita pernah satu kasus juga kita lakukan itu. Jadi kita nanti yang kontak dengan Pemdanya agar itu di-*input*-kan *gitu*.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.IKom):

Kalau lewat Ka.Balai juga mereka *enggak* mau *gimana*, Pak?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ya, Pak, gini.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Sama ini, sama entar.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ini kan masalah taktis *nih*, jadi itu serahkan saja ke kami, kan kita punya cara.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Jadi *entar sih* Pemda ada *sih* yang bagus, *gitu*. *Lah*, kebetulan *kok* ketemu yang *enggak* bagus, punya dia *nih* 70 masukin *entar* kita di nomor 81, *gimana tuh?*

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Kan kita yang *at the end of the day* yang memutuskan kan Pak Menteri.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Oh, gitu ya.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi itu *leave it to us* saja nanti, kita akan bantu Ibu.

KETUA RAPAT:

Gimana Bu Novi, oke?

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Biar jelas *sih* soalnya. Jangan sampai nanti ada alasan *oh* Bu belum *ke-input* karena keputusannya dari Bappenas sementara, mumet lagi *nih* sampai ke sana-sana kan *gitu*. Apalagi kabupaten bilang *enggak* perlu lewat Dewan

kok, bisa, *enggak* usah, ya desa-desanya terprovokasi *gitu* kan, ternyata *enggak* ada apa-apanya *nih* Komisi V nggak penting, *gitu loh*.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Final-nya kan yang memutuskan para menteri kan dengan dukungan kita, kan *gitu* kan.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Dirjen, mungkin saya tambahkan ya. Ini kan tahun politik ya, tahun politik, saya pahami psikologis teman-teman termasuk saya juga, kadang-kadang ada program kita tuh ada yang mengklaim-mengklaim *gitu* itu mungkin maksud Bu Novi. Ada seperti Bu Novi bilang mungkin ada juga masyarakat yang mengatakan oknum atau siapapun mengatakan tanpa Anggota DPR pun kami bisa mendapatkan itu, karena memang yang namanya Inpres Jalan dan Jembatan ini kan memang seluruh Indonesia, Pak. *Nah*, artinya kan kami di Komisi V ini kan punya nilai lebih sedikit lah untuk memperkuat agar lebih-lebih cepat dapat seperti itu, begitu Bu Novi ya?

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Ya.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Pimpinan, Pimpinan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Memang kalau masalah di media, kami *enggak* bisa bantu banyak juga...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Dirjen.

Ya, silakan Pak Fadholi.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Begini. Pak Dirjen. Saya menghargai dan itu memang bisa dilakukan melalui usulan pemerintah, mengusulkan ya oke kita setuju dan sepakat. Ketika kemudian ada beberapa kasus-kasus yang mentok itu terjadi, *nah*, kita ini kan sebagai Anggota yang kemudian juga punya kewenangan sesuai dengan MD3 untuk bisa mengusulkan aspirasi. Apakah kalau kita mengusulkan seperti tadi yang banyak disampaikan secara langsung, itu kan semua atas nama Anggota.

Kalau kemudian ini berbeda dengan kepala daerah yang diusulkan, *nah*, apakah tidak ada porsi agar Anggota itu bisa mengusulkan langsung sekalipun itu juga tidak sesuai dengan, *nah*, persoalan nanti pelaksanaan kan selalu aja koordinasi pada pemerintah daerah. Saya pikir itu mungkin perlu diubah.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ya, saya kira kalau ini kan Pak Menteri sudah menyampaikannya, saya tidak perlu mengulangnya, Pak ya. Jadi itu kalau masalah posisi aspirasi Anggota DPR, Pak Menteri sudah jelas posisinya saya tidak perlu mengulang itu. Ini kan hanya di masalah apa namanya bagaimana agar memastikan bahwa daerah itu meng-*input*-kan apa yang Bapak-Bapak usul. Itu nanti saya minta Ka.Balai-nya untuk ambil alih ya memastikan itu *gitu*, ini karena ada masalah psikologis. Nanti kita punya cara bagaimana memaksa mereka untuk memasukkan itu, selama usulan-usulannya memang sudah *oke* ya, dengan catatan, sudah *oke* itu yang pertama adalah memang arahan dari Pimpinan kan ini jangan *crat-cret gitu* Bu, jangan 300 meter sana, 700 meter di sini, karena itu dampaknya *enggak, enggak* nendang ke ekonomi, itu kan...

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju-setuju-setuju, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Kan hal-hal seperti itu ada yang teknokratishlah, ini kan arahan Pimpinan seperti itu. Dan ini mohon maaf memang jalan desa sampai saat ini belum masuk ke dalam lingkup Inpres, karena sebab-sebab yang jelas, karena kan kita perlu prioritas bagaimanapun, tidak mungkin kita menangani semua hal, kita mau prioritas mana dulu untuk saat ini jalan desa, arahan dari Pimpinan adalah tidak masuk dulu.

Jadi kalau menurut saya kita terima aja itu kan bukan hal yang jelek juga, kan memang jalan kabupaten juga banyak yang rusak dengan apa tingkat kemantapan 58% kan juga itu isu yang sangat besar.

Dan mungkin yang terakhir yang banyak apa namanya menjadi kesulitan dalam mengusulkan itu adalah *readiness*, karena apalagi apa namanya apapun itu ya, apalagi jembatan *gitu* kan, itu kan kita perlu waktu untuk desain, siapapun perlu waktu untuk desain dan yang harus mendesain itu adalah memang Pemdanya *gitu*. Jadi ini butuh waktu, kadang-kadang kalau ini *oke* tapi desainnya *enggak* ada ya kita keluarkan dulu, karena memang belum siap untuk dilaksanakan. Jadi ini kan masalah-masalah teknis taktis di lapangan ini yang saya kira kita harus sama-sama nanti bahas kasus per kasus, karena beda-beda, termasuk masalah lahan dan sebagainya. Saya kira itu yang kami sampaikan mengenai IJD.

Kemudian mengenai anggaran seperti kami sampaikan 1,5 triliun itu adalah anggaran yang harus kita alokasikan di dalam reguler kita karena ada IJD yang saat ini terutama yang terkait dengan pekerjaan jembatan, itu kan *enggak* mungkin dipecah. Kalau jalan itu 10 kilometer kita bisa bagi 3 kilometer paket 1, 3 kilometer paket 2, 4 kilometer paket 3, jembatan kan *enggak* mungkin kita bagi-bagi kan *gitu* kan, itu kan satu kesatuan. Jadi inilah terpaksa kita lakukan *multiyears contract* termasuk yang di Aceh tadi jembatan apa Blang Mane itu. *Nah*, ini dulu Aceh contohnya, dulu rencananya *e-catalog* nih waktunya masih cepat, tapi kan proses diskusi kita dengan Bappenas, penganggaran itu ternyata kan *enggak* bisa kita kontrol, baru selesai di akhir-akhir. Begitu sekarang revisi DIPA-nya bisa selesai, kita lihat sudah *enggak* cukup waktunya sehingga terpaksa kita ubah ke lelang, dan itu kita ubah menjadi *multiyears*. Jadi hal-hal seperti itu kan terjadi. *Nah*, yang *multiyears* seperti ini tidak mungkin dibiayai BUN, karena karakter dari dana BA-BUN itu adalah hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi kalau *multiyears* kan sudah direncanakan sebelumnya, ini ada pekerjaan dan ini harus dialokasikan di reguler kita. Jadi kebutuhan *multiyears* dari IJD itu terpaksa kita masukkan di reguler kita sekarang ini 1,5 triliun. *Nah*, nanti yang IJD lainnya kita akan minta Januari nanti melalui BA-BUN lagi *gitu*, tapi kita *enggak* mungkin minta BA-BUN untuk *multiyears* ini, karena ini sudah terprogram, jadi itu tanggung jawab reguler, itu adalah masalah pakem-pakem di Kementerian Keuangan yang harus kita ikuti. Jadi ya kita ikuti saja daripada nanti kita kesulitan kan *gitu* dalam pelaksanaannya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Siap.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, sebentar, Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pertanyaan saya tadi, Pak, apakah di Sulsel ya itu misalnya, *batch 2* itu masuk dalam anggaran 1,5 triliun itu. Itu pertanyaan saya, kan sudah ada perencanaan *batch 2*, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Oke, jadi ini bukan, Pak, ya. Jadi kalau yang 1,5 triliun itu adalah untuk menampung kebutuhan *multiyears* tahun ini yang sisanya ada di tahun depan, *multiyears*, dimulainya tahun ini dan nyambung ke tahun depan. *Nah*, kita sendiri dalam sejarahnya kan panjang itu, Pak, sedang kita tahu adalah yang terakhir bahwa ada saya sebut saja tahap 1A ini sesuai dengan pakem teman-teman, tahap 1A sekitar 7 triliun, itu sudah semuanya saya kira sudah berjalan, itu yang Bapak-Bapak tadi ucapan terima kasih itu kan 1A.

Kemudian sekarang yang 1B dalam taraf revisi, finalisasi revisi DIPAdan pengadaan, ini 1B, besarnya 7 triliun, 14 triliun. *Nah*, nanti ada sedikit nanti dari 14 triliun tentu ada sisa lelangnya kan? Ini kan kita punya *long list nih* bawah, munculkan segala macam yang siap yang mana *gitu* kan, *nah* yang 14 triliun *oke*, kemudian ada sisa lelang kita juga tarik dari sini, nanti yang tahun depan ya *next* antrian berikutnya, kira-kira gitu. Jadi ada 1A, 1B, saya sebut aja 1C, kemudian nanti ada tahap yang disebut tahap 2 itu menjadi tahun depan, karena tahun ini tidak ada lokasi anggaran baru. Itu mungkin kalau apa namanya, memperjelas apa namanya, tahap-tahapannya. Ini semuanya adalah masalah karena memang mereka mengalokasikan anggarannya bertahap seperti itu.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Satu lagi, Pak Dirjen. Titipan sama dari Jambi tadi, ada ke Kepala Balai Jambi ini, titipan dari Bupati PJ Bupati Sarolangun, Pak Bupati, dia telepon saya mohon dititipkan karena agak susah katanya kalau tidak direkomendasi oleh DPR, saya bilang *enggak* begitu Pak Bupati, ajukan saja. Ini-ini yang saya sampaikan mohon menjadi perhatian itu, Pak, Sarolangun Jambi.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Siap, Bapak, tapi kembali saya ingatkan, kebanyakan yang memang sulit masuk itu adalah karena itu *readiness*-nya, jadi mohon *readiness*-nya dipastikan, kalau memang itu sudah siap desain dan sebagainya.

Baik.

Terima kasih, Pak, kemudian yang lain-lainnya, saya kira mungkin kita akan menjawab tertulis karena saya kira juga beberapa sudah tidak ada di ruangan, mohon maaf.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Apa perlu dibantu, Pak Dirjen?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Iya baik, yang lainnya dari yang mohon maaf Pak Irwan sudah *enggak* ada, saya lewat saja dulu. Kemudian Ibu Cen, Bu Cen jembatan ya. Memang kita kalau saya sarankan nanti kerja sama dengan Balainya disiapkan aja, karena ini jembatan butuh periode *design* yang saya kira setahun lah biar matang, nanti disiapkan Pak Stanley yang ganteng itu, mana Stanley-nya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Mana Ka.Balainya, coba bangun, bangun dulu. Aceh memang udah ganteng.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik.

Bu Restu udah *enggak* ada saya kira di.

Baik, kami lanjut. Pak Suryadi, saya sepakat Pak, Pak Suryadi, masih ada? udah *enggak* ada.

Baik, Pak Hartono, makasih Pak Hartono. Ini memang Asbuton ini kan kita harus akui ya kadang-kadang memang di skala laboratorium itu bagus, Pak, tapi begitu skala *manufacturing* itu kan variabelitas tanahnya juga, sehingga kadang-kadang memang kita mendapatkan Asbuton yang kita terima itu tidak masuk *spec*-nya. Jadi memang kita mendorong, kita sudah ada istilahnya *business-match* dengan para produsen Asbuton, kamu sanggupnya berapa produksi, kita sanggupnya menerima berapa sehingga mereka tidak *over product*, *over production*, kita juga tidak apa namanya menggunakan Asbuton untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu sudah kita lakukan dan memang kita memang arahnya sekarang banyak menuju ke penggunaan Asbuton murni dan Asbuton *modified*. Ini terima kasih banyak tadi masukannya, tapi kembali kalau itu tidak masuk di-spesifikasi nanti teman-teman, Pak, yang kena audit Pak, kasihan *gitu*. Jadi kita tetap mendorong agar produsen Asbuton ini produknya mengikuti standar *spec* yang sudah disepakati bersama.

Saya kira yang tadi Provinsi Aceh, kita catat, Pak, ya, tapi kalau ada Kepala Balai Jalan Nasional mengatakan ada longsor *enggak* punya uang itu salah besar, karena kita ada dana istilahnya apa, penanganan mendesak dan tanggap darurat.

Jadi, itu kalau itu berarti Satker PPK-nya laporkan aja ke kami, Pak, dengan Kepala Balainya nanti kita evaluasi itu, ya berarti tidak cukup responsif itu.

Jembatan Musi III tadi, Pak, saya kira nanti kita akan evaluasi secara jaringan ya, apakah itu akan bagian jadi Jalan Tol Lingkar, Pak Eddy Santana ya.

Betung-Tempino-Jambi, ya memang kita tadi seperti kami sampaikan, kita sudah ada dukungan konstruksi, Pak, tapi di semuanya di Jambi itu, cukup besar juga, itu ada tiga paket di sana dan sudah berjalan. *Nah*, yang dari arah Betungnya ini rencananya kita akan melakukan semacam AP sekarang ini di Pak Dirjen, Dirjen PI sedang dilakukan finalisasi. Ini Palembang-Tanjung Api Api ya terpaksa kita harus pelihara *nih*, Pak Ka.Balai ya. Ini memang kita terus terang saja, Pak Eddy, ini kita ini kan kesulitan mencari pelabuhan laut dalam, untuk Sumatera bagian selatan, jadi pelabuhan samudralah. Dulu kita bicara Tanjung Api Api, kemudian juga ternyata tidak cocok karena satu dan lain hal. Kemudian Tanjung Carat tidak jelas juga tanda-tandanya sehingga sekarang ini kita terpaksa menyiapkan *shortcut* ke Pelabuhan Panjang, Pak, karena Sumatera bagian selatan itu *enggak* ada pelabuhan laut dalamnya, pelabuhan samudranya, kami khawatir nanti akan memenuhi penyeberangan ke Priok. Jadi ini memang kami juga sebenarnya mengharapkan betul apa, Tanjung Carat ini untuk bisa berfungsi karena apa namanya, agar ada pelabuhan yang bisa langsung ke luar *gitu*, Pak, untuk ekspor.

Kemudian saya kira yang lainnya, Pak, izin, kami nanti sampaikan tertulis. Kemudian, mungkin Pak Willem sudah tidak ada ya, tapi kami sampaikan bahwa IJD bukan hanya Jawa-Sumatera, jadi seluruh provinsi di Indonesia itu ada IJD-nya kecuali dua provinsi: yang pertama DKI karena memang tidak ada *request* karena udah kaya mungkin, yang kedua Kalimantan Tengah karena *nggak* ada yang *ready*, Pak. Jadi selain itu ada alokasi IJD di provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian apakah ini IJD sebelum Pemilu apa setelah Pemilu, Pak. Gini kalau yang 2024, kami sampaikan realitasnya bahwa begitu 2024 berjalan kita akan ajukan BUN. Jadi ini memang saya *enggak* bisa menjamin bahwa ini kan ini kan *golden time*-nya Februari, Pak, ya secara politik gitu kan, kami *enggak* bisa menjamin bahwa sebelum Februari itu akan ada *progress* kan pengalaman-pengalaman pengurusan anggaran kita, ini kami bicara realitas apa adanya.

Kemudian Tol Probowangi, mungkin nanti Pak Munir atau Pak Herry TZ, tapi intinya adalah Probowangi itu sekarang kita sampai Gending ya. Jadi sampai Gending karena memang, Pak, untuk meneruskan itu, hitung-hitungan BUJT-nya butuh lebih dari 30 triliun dukungan APBN konstruksi. *Nah*, ini kami *sounding-sounding* ke Kementerian Keuangan mereka tidak begitu mendukung *gitu*, Pak, dukungan ini. Jadi kami apa namanya memang agak *cooling down*, agak *slow down* di situ.

Saya kira itu mungkin, Pak, yang bisa kami sampaikan, sisanya mohon izin untuk bisa kita sampaikan melewati secara tertulis saja. Untuk Pak Mulyadi kalau masih ada, kita siap naik motor, Pak, ke pantai selatan Pak Mulyadi, ya nanti diatur dengan Pak Brawijaya.

Nah, mengenai tadi ada banyak masalah *flyover*, kami setuju Pak, karena kami juga, *flyover* itu kan ada dua isu, Pak: yang pertama, kemacetan di perkotaan, yang kedua adalah yang terkait dengan kereta api. *Nah*, ini karena keuangan kita memang sangat terbatas ini kita sekarang lagi merintis bagaimana *flyover-flyover* ini kita biayai secara KPBU ya atau melalui *loan*, Pak, ya. Kita sudah ada komunikasi misalnya dengan Spanyol *gitu* ya untuk apakah memungkinkan ini atau dengan KPBU seperti biasa, tapi kembali bahwa KPBU itu selalu jalan terakhir karena memang *cost of money*-nya relatif tinggi.

Mohon izin Pimpinan, mohon maaf Pak, Pak Wakil Ketua, saya kira itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Walaikumsalam.

Makasih Pak Dirjen Bina Marga.

Selanjutnya Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, yang penting-penting saja, Pak ya.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Baik.

Terima kasih.

Untuk terkait dengan dengan pembiayaan, kami jawab secara umum nanti detailnya akan kami jawab secara tertulis. Ada dua hal: yang pertama berkaitan dengan pembiayaan perumahan tadi, yang pertama berkaitan dengan PSU Pak Hartono ya. Sebetulnya ketika kita menghitung harga rumah yang menjadi acuan subsidi hari ini Fasos-Fasum itu sudah termasuk di dalamnya, Pak, sehingga harusnya itu semua udah tercakup di sana. *Nah*, memang di Dirjen Perumahan disediakan ada fasilitas Fasum yang diberikan oleh Dirjen Perumahan untuk beberapa pengembang itu dilakukan dengan mekanisme di Dirjen Perumahan seperti itu, tapi ketika kita menghitung subsidi itu sudah termasuk, itu yang pertama.

Lalu kemudian memang tadi juga Pak Aras ya menyampaikan kenaikan harga tanah dan seterusnya, ini juga memang masalah di perumahan kita hari ini. Setiap tahun lokasinya itu makin jauh dari tempat kerjanya, Pak, karena mencari harga tanah yang murah sehingga memang solusinya bukan lagi

landed barangkali mari kita sama-sama masuk ke kota dengan pembangunan secara vertikal, *by low rise* ataupun yang tinggi.

Lalu Pak Fadholi tadi berkaitan dengan jumlah unit ya, Pak ya. Tahun 2024 ini akan ada 166.000 unit, Pak, memang berkurang dari rencana semula yang 220.000 karena perhitungan Kementerian Keuangan kemarin mengacu ke target RPJMN yang sebesar 900.000, di mana 166.000 tadi udah menggenapkan jadi 900.000, walaupun target BP Tapera belum bisa berjalan karena iurannya belum dilaksanakan, itu yang tidak dihitung kemarin, tetapi kami terus mencoba ini mencari skema yang bisa memaksimumkan jumlahnya tadi Pak dengan uang yang ada. Jadi yang diikat adalah unitnya, Pak, 166.000, lalu penerima manfaatnya siapa? semua orang, keluarga yang belum pernah mendapat subsidi, pendapatannya dibawah 8 juta dan harus ditinggali dan syarat-syarat yang memang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang ada. *Nah*, satu lagi dia juga harus lolos dari OJK *checking*, karena pada gilirannya ini adalah pinjaman seperti itu. Jadi mekanismenya ada, tinggal pelaksanaannya memang oleh bank penyalur.

Tadi berkaitan dengan sosialisasi kami sepakat sekali, Pak, nanti kami akan tingkatkan itu sehingga lebih banyak, lebih tepat sasaran nanti yang menerima manfaat.

Selanjutnya berkaitan dengan Project KPBU ada beberapa *project* yang ditanyakan tadi, antara lain Mamminasata dari Pak Aras tadi ya, kemudian Demak-Tuban, umumnya memang ini berkaitan dengan *readiness* ya. Arahan Pak Menteri, kita sampai tahun 2024 ini lebih bersifat ke OPOR, jadi memaksimumkan kondisi yang ada. *Nah*, yang kami lakukan adalah bagaimana *project-project* tadi bisa tetap kita lanjutkan ya pada *term* selanjutnya. Artinya di sini bagaimana *readiness*-nya kriterianya bisa tersedia, mulai dari studi kelayakan seperti Mamminasata misalnya, studi kelayakannya sudah ada, tetapi kepastian tanahnya belum karena sudah keluar dari PSN. Jadi nanti ada tahapan lagi nanti kita akan susun bagaimana *project-project* ini kita usulkan kembali ke dalam PSN. Kita pastikan dukungan yang dibutuhkan seperti tadi misalnya Demak-Tuban itu harus butuh dukungan ya, kemudian juga AMDAL dan lain-lain, dan ini akan kita lelang pada *term* selanjutnya.

Lalu tadi ada Puncak II, Puncak ya ini merupakan prakarsa memang terus kita apa kawal prosesnya, hari ini sedang proses persetujuan studi. Jadi ketika dilakukan studi nanti ada proses tujuan prakarsa langsung kita masuk kepelelangan dan seterusnya.

Tadi Pak Suryadi berkaitan dengan HRD di apa NTB, ini juga sedang finalisasi persetujuan prakarsa, segera setelah itu nanti kita akan lakukan usulan AP dan pelelangan, pelelangan investasinya.

Nah, lalu yang tadi berkaitan dengan Probowangi menambahkan, Probowangi ini memang kemampuan badan usahanya hanya sebatas tadi ya disampaikan Pak Dirjen sampai Gending, selebihnya kalau mau dipercepat perlu dukungan pemerintah. *Nah*, ini yang tadi kita harus bicara dengan

Kementerian Keuangan atau kita tunggu nanti sambil berjalan, volumenya nambah, nanti kita lihat lagi *business plan*-nya.

Lalu untuk Betung-Tempino-Jambi tadi, Pak, apa itu akan didanai yang selebihnya dengan apa pembayaran bergulir, berbasis layanan seperti *availability payment*. Jadi penugasan kepada Hutama Karya, nanti yang membayar adalah pemerintah, lalu pendapatannya akan dikumpulkan oleh pemerintah seperti itu, tidak lagi seperti yang selama ini hanya ditugaskan, nanti *gimana* mencari sumber pembiayanya oleh HK, tapi pemerintah bertanggung jawab di sana.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, selebihnya nanti akan dijawab tertulis.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih.

Pak, Pak, silakan, Pak.

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MIFTACHUL MUNIR, MT):

Baik.

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Dewan,

Ada beberapa yang kami catat terutama yang dikritisi oleh Pak Hamka terkait dengan pengakhiran perusahaan Bapak. Jadi fungsi BPJT saat ini Bapak mengacu ke Permen 6/2023 fokusnya adalah di-perusahaan Bapak dan pengawasan sehingga pengaturan terhadap pembinaan turbinnya ada di Direktorat Jenderal Bina Marga dan DJPI sedangkan tugas BPJT fokus di perusahaan sehingga terkait dengan masalah kebijakan tentunya nanti akan menjadi kewenangan dua Dirjen ini, sehingga nanti fungsi peran BPJT hanya sebagai pelaksana. Jadi secara garis besar semuanya sudah disampaikan sama Pak Dirjen, cuma mungkin sedikit masukan, Bapak. Mungkin dengan peran adanya nanti BLU sehingga pendapatan tol terhadap perusahaan yang berakhir, itu nantinya akan masuk di dalam Badan Layanan Umum, itu akan digunakan untuk pembangunan tol-tol yang lain. Itu mungkin kami pahami terhadap regulasi turunan, baik yang ini sekarang disiapkan RPP turunan amandemen dua, maupun Permen yang nanti akan kami siapkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Silakan-silakan.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Sedikit.

Pak Herry, *enggak* ada cerita tentang jalan Tol Bandung-Cilacap *kek*, Cilacap mana *kek gitu*.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Mohon maaf tadi.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Apa *kek* didongengin apa *kek gitu*.

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Ya, Bu mohon. Tadi yang Get...tadi sudah dicatat, cuman kok malah lupa yang terakhir. Jadi mungkin awalnya dari Getaci dulu, Bu, kemarin putus, namun ini kita siapkan untuk pelelangannya. Jadi harapannya, *gimana?* jadi harapannya di bulan September ini pra-kualifikasi sudah dilakukan untuk Getaci, nanti kita lanjutkan lagi untuk yang ruas selanjutnya, September sekarang, Bu.

Makasih.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Tapi kalau, masih jalan terus, Bu, pengadaan tanahnya.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Berapa tahun *sih* rencananya (*suara kurang jelas*)

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Rencana 3 tahun ya seperti itu. Biasanya dimentokin di 50 tahun.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Belum yang 80 ya?

DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HERRY TRISAPUTRA ZUNA S.E., M.T.):

Eenggak, jadi sejauh ini masih dibatasin di 50, gitu, iya.

Terima kasih.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan?

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, Bu Estu dulu baru, Pak.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Iya.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, silakan.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih.

Sedikit saja saya tadi lupa. Ini Pak Dirjen, saya tadi dapat informasi sebenarnya dari kemarin berkaitan pembangunan jalan tol yang menuju Bandara Kediri, itu ada rumah warga yang sudah di, sudah kena apa namanya pembangunan itu, tapi merasa sampai sekarang belum ada penyelesaian terkait dengan persoalan tanahnya, karena mepet kena persis di teras rumahnya sederet itu. Mohon perhatiannya, Pak.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi hanya mohon perhatian ya, udah dijawab, udah dijawab, perlu dijawab *enggak?*

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Enggak perlu dijawab.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Enggak perlu dijawab.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Tapi perlu ditindaklanjuti.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, Pak Syahrul Aidi silakan.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Izin menyampaikan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, silakan.

Baiklah.

Jawaban dari Bina Marga, Dirjen (*suara kurang jelas*), kemudian Dirjen Pembiayaan dan BPTJ, Pak Munir.

Sekarang masuk pada kesimpulan ya. Draf kesimpulan tolong, draf kesimpulannya, draf kesimpulan ditampilkan.

DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA MARGA DAN DIRJEN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PUPR
RABU, 6 SEPTEMBER 2023.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Ditjen Bina Marga pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp62.085.406.920.000,00, Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah 55.399.768.580.000, yaitu selisih 6 triliun lebih, kemudian
 - b. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp206.076.000.000,00, itu Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah Rp159.498.189.000,00, selisih 46 miliar.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangka, dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kriteria, lokus, serta mekanisme pengusulan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang menuju kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Tahun 2022 tentang Jalan.

Bagaimana Komisi V?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin dulu, Pak Dirjen, tadi. Pak, tadi ada yang diusulkan untuk diputuskan itu yang PHLN atau apa Pak Dirjen tadi?

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, silakan Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi kami usulkan, Pak, karena memang saat ini ada dinamika bahwa untuk Serang-Panimbang itu kita usulkan juga ada PDN. Jadi kami usulkan di postur anggaran Bina Marga ini sumber dana PHLN itu kita ubah menjadi sumber dana PHLN dan sumber dana PDN, kami usulkan begitu sehingga nanti keproses ke Banggarnya tidak menjadi masalah.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Sudah masuk ya?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ini, ya, ya Pak, no 4 saya kira.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Oke.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Makasih, Pak.

Mungkin sedikit, Pak, mungkin akan digunakan antara lain untuk penyelesaian Tol Serang-Panimbang Seksi III, agar itu lebih fleksibel, Pak Ketua.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Setuju ya semuanya? setuju, baik. Untuk Anggota yang terhormat setuju. Pemerintah setuju tidak? setuju semua? Pak Dirjen, setuju?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Nomor 3 diperbaiki kalimatnya aja, Pak, yang mengenai Undang-Undang Nomor 2.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Seharusnya bagaimana coba nomor 3.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Saya mohon masukan teman-teman itu resminya bukan tentang jalan saya kira, tentang perubahan ya, ya.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Tentang perubahan Undang-Undang Jalan ya?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Iya.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Nomor 38, tolong, Pak, tolong diganti itu.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Dilihat saja Pak itu resminya Undang-Undang Nomor 2.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Undang-Undang Nomor 2 benar, tentang perubahan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Bukan begitu, ini. Ini bukan begitu, Mas.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 38.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan...

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Masih salah ini, masih salah ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan, di belakang itu tentang perubahan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik, Pak, ini mungkin ini yang ini *nih* udah ada kalimat jelas, Undang-Undang Republik Indonesia, jadi bukan tentang merujuk tentang perubahan bukan begitu, merujuk atas Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Dibaca ulang Pak Dirjen supaya...

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, udah benar.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sudah?

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Ya, sudah.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sudah sesuai ya nomor 3 ya? Sudah ya?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin dulu, Pak Ketua. Satu yang ingin saya pertegas Pak Dirjen, ini IDN ini memang spesifik kepada pembangunan penyelesaian Tol Serang dan Panimbang? atau kita tidak usah sebut itu, kalau kita spesifik di situ, berarti IDN ini khusus untuk itu.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Makanya, Pak, itu kalimatnya kami tadi usulkan pakai antara lain Pak Hamka, agar tidak, tidak terpaku di situ.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Tidak usah kita pakai antara lain, sebut saja IDN boleh dilakukanya.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Oke, setuju, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ya, supaya jangan kita terlihat di situ, Bapak yang diselesaikan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi 2024 titik dihapus ya?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Yes.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Setuju.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke sepakat ya? Anggota Komisi V setuju semua ya?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pemerintah setuju?

PEMERINTAH:

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(PESERTA RAPAT BERTEPUK TANGAN)**

Baik.

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup kami berikan kesempatan kepada salah satu Dirjen Kementerian PUPR untuk menyampaikan sambutan penutup, silakan Pak.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi V,

Para Anggota Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati, kami banggakan,

Kami ucapkan terima kasih atas segala arahan, masukan, kritikan, dan yang itu akan saya kira mempertegas fungsi beban dari Bapak-Ibu sekalian sebagai Anggota Dewan dan juga memberikan kontrol pada apa yang kami lakukan.

Kami mohon maaf kalau ada kata atau ucap yang tidak seharusnya, yang menyinggung, itu bukan niat dari kami. Untuk itu, kami mohon maaf, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

(PESERTA RAPAT BERTEPUK TANGAN)

Begitu pula kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat, kalau ada kata yang kurang berkenan sekali lagi kami mohon dimaafkan.

Dengan demikian rapat hari ini kita tutup dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.35 WIB)

JAKARTA, 6 September 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002